

**PENGARUH PEMANFAATAN APLIKASI E-SPT MASA PPN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

NANI KHARISMA

NIM.105030400111064



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

MALANG

2014

DAFTAR ISI

MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
TANDA PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peneliti Terdahulu	11
1. Ita Salsasalina lingga (2012)	11
2. Oktaviane Lidya Winerungan	12
3. Rendra Pramana (2008)	13
B. Persepsi Wajib Pajak	18
C. Kesiapan Teknologi.....	18
D. Pelayanan	19
E. Model Sosialisasi.....	20
F. Pajak	21
1. Pengertian Pajak	21
2. Fungsi Pajak	22
3. Pembagian Pajak.....	22
4. Sistem Pemungutan Pajak	23
G. Surat Pemberitahuan (SPT).....	24
1. Definisi Surat Pemberitahuan (SPT).....	24
2. Fungsi SPT	24
3. Jenis SPT	25
H. E-SPT.....	26
1. Pengertian E-SPT.....	26
2. Pengguna e-SPT Masa PPN	27
3. Persyaratan Sebelum Melakukan Instalasi Aplikasi e-SPT Masa PPN.....	27
4. Penggunaan Aplikasi e-SPT Masa PPN	28
5. Tata Cara Penyampaian e-SPT	29
6. Tata Cara Pembetulan e-SPT	30
7. Batas waktu Penyampaian atau Pelaporan e-SPT Masa PPN	31
8. Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran e-SPT Masa PPN	31

9. Dikecualikan penggunaan e-SPT Masa PPN	32
10. Tata cara Penerimaan dan Pengemasan SPT Masa PPN	33
11. Keuntungan Penggunaan e-SPT	34
12. Perbedaan PER-44/PJ/2010 dengan PER-11/PJ/2013	35
13. Perbedaan PER-45/PJ/2010 dengan PER-10/PJ/2013	36
I. Kepatuhan Wajib Pajak	38
1. Pengertian Kepatuhan Perpajakan	38
2. Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh	39
J. Kerangka Pemikiran	40
1. Model Konsep	40
2. Model Hipotesis	40
K. Hipotesis	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Konsep, Variabel, Definisi, Operasional, dan Skala Pengukuran	44
1. Variabel	44
2. Definisi Operasional	48
3. Skala Pengukuran	49
D. Populasi dan Sampel	49
1. Populasi	49
2. Sampel	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
1. Sumber Data	51
2. Menurut dari Siapa Data Diperoleh	52
3. Instrumen Pengumpulan Data	52
F. Validitas dan Reabilitas	53
1. Uji Validitas	53
2. Uji Reabilitas	55
3. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas	56
G. Analisis Data	61
1. Statistik Deskriptif	62
2. Uji Asumsi Klasik	62
a) Uji Multikolinieritas	63
b) Uji Heteroskedastisitas	63
c) Uji Normalitas	63
3. Analisis Regresi Linier Berganda	64
a) Koefisien Determinasi (R^2)	65
b) Uji Hipotesis	66
(1) Uji Simultan : Uji F	66
(2) Uji Parsial : Uji t	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data	70
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	70
2. Gambaran Umum Responden	73
3. Gambaran variabel-variabel yang diteliti	78
a. Analisis Deskriptif	78
1) Variabel Persepsi Wajib Pajak	78

2) Variabel Kesiapan Teknologi.....	83
3) Variabel Pelayanan	86
4) Variabel Model Sosialisasi	90
5) Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	94
B. Hasil Uji Asumsi Klasik	100
1. Hasil Uji Multikolieritas	100
2. Hasil Uji Heteroskedastisitas	101
3. Hasil Uji Normalitas	102
C. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	103
1. Hasil Uji Koefisien Determinasi	106
2. Uji Hipotesis	108
a) Hasil Uji Simultan : Uji F	108
b) Hasil Uji Parsial : Uji t	110
c) Hasil Uji Dominan	114
3. Pembahasan	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

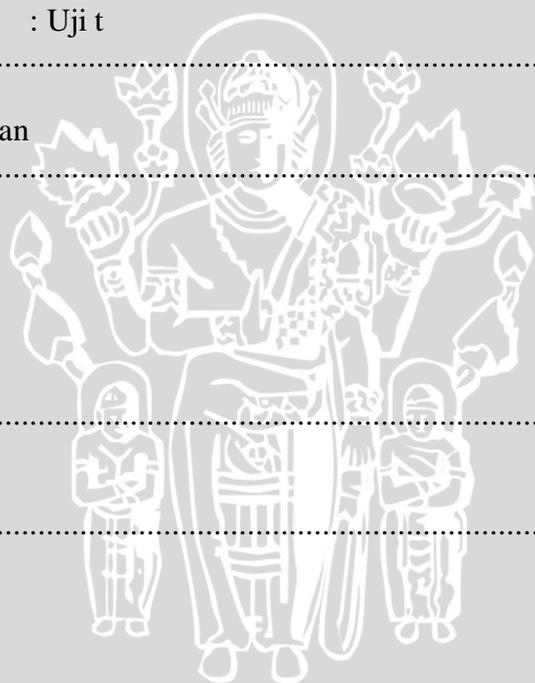
122

B. Saran

124

DAFTAR PUSTAKA

128

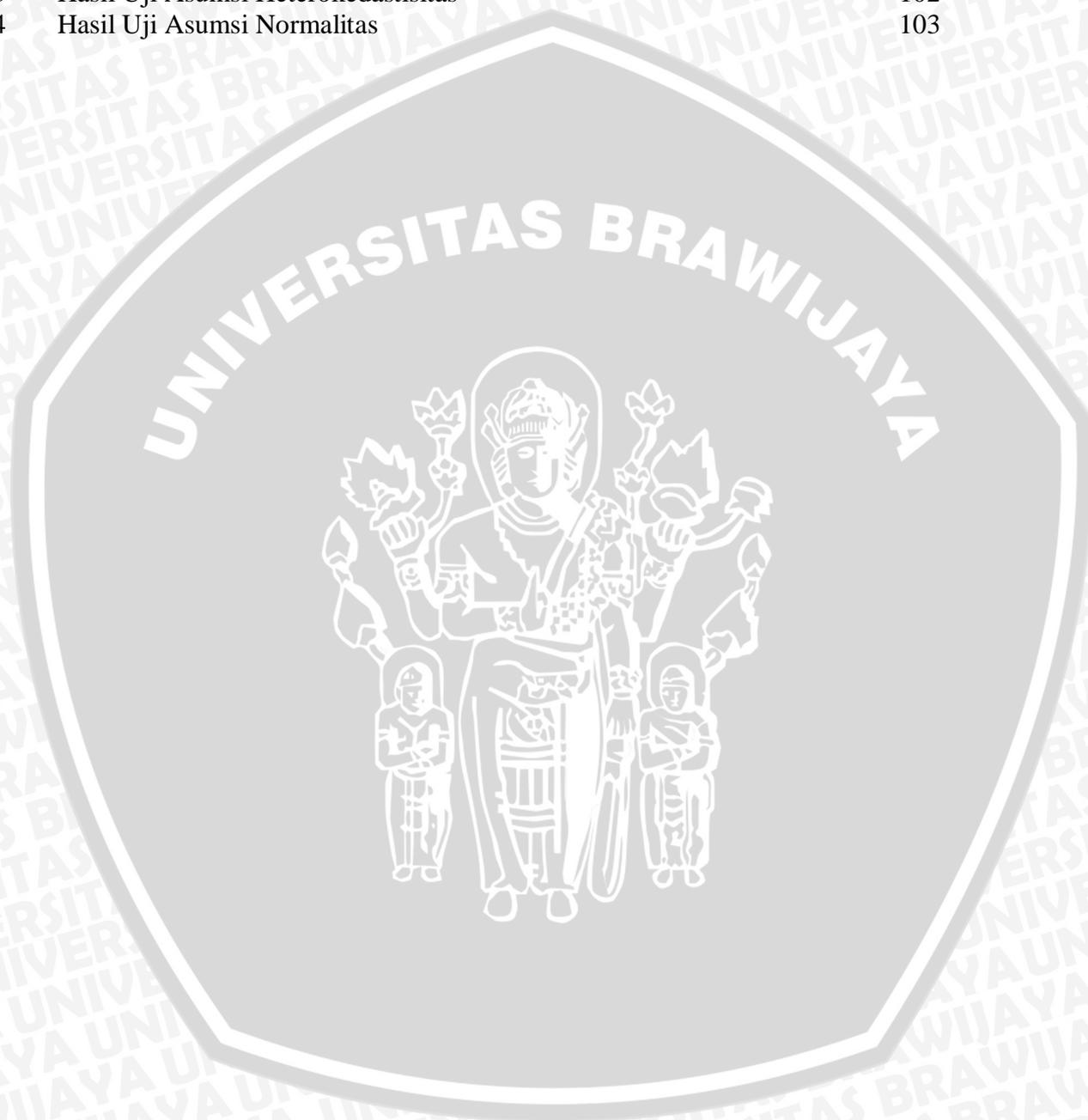


DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Pengguna SPT Masa PPN	5
2	Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Diteliti dengan Peneliti Terdahulu	16
3	Batas Waktu Penyampaian atau Pelaporan SPT Masa PPN	31
4	Batas Waktu Pembayaran Atau Penyetoran Masa PPN	32
5	Perbedaan PER-44/PJ/2010 dengan PER-11/PJ/2013	35
6	Perbedaan PER-45/PJ/2010 dengan PER-10/PJ/2013	37
7	Konsep, Variabel, Indikator	45
8	Skala Pengukuran variabel penelitian	49
9	Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Persepsi Wajib Pajak (X_1)	57
10	Uji Validitas dan Reabilitas variabel Kesiapan Teknologi (X_2)	58
11	Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Pelayanan (X_3)	59
12	Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Model Sosialisasi (X_4)	60
13	Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	61
14	Distribusi Responden Berdasarkan Usia Wajib Pajak	74
15	Distribusi Responden Berdasarkan Usia Wajib Pajak	75
16	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak	76
17	Distribusi Responden Berdasarkan Kelurahan Tempat Usaha Wajib Pajak	77
18	Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Wajib Pajak (X_1)	79
19	Distribusi Frekuensi Variabel Kesiapan Teknologi (X_2)	84
20	Distribusi Frekuensi Variabel Pelayanan (X_3)	86
21	Distribusi Frekuensi Variabel Model Sosialisasi (X_4)	91
22	Distribusi Frekuensi Variabel Tingkat Kepatuhan (Y)	94
23	Hasil Uji Multikolinieritas	101
24	Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	104
25	Hasil Uji Koefisien Determinasi	107
26	Hasil Uji F atau Uji Anova	108
27	Uji Hipotesis Model Regresi Secara Simultan	109
28	Hasil Uji Parsial (Uji t)	110
29	Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial Variabel Persepsi Wajib Pajak (X_1)	111
30	Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial Variabel Kesiapan Teknologi (X_2)	112
31	Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial Variabel Pelayanan (X_3)	113
32	Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial Variabel Model Sosialisasi (X_4)	114
33	Hasil Uji Dominan Pada Analisis Regresi Linier Berganda	115

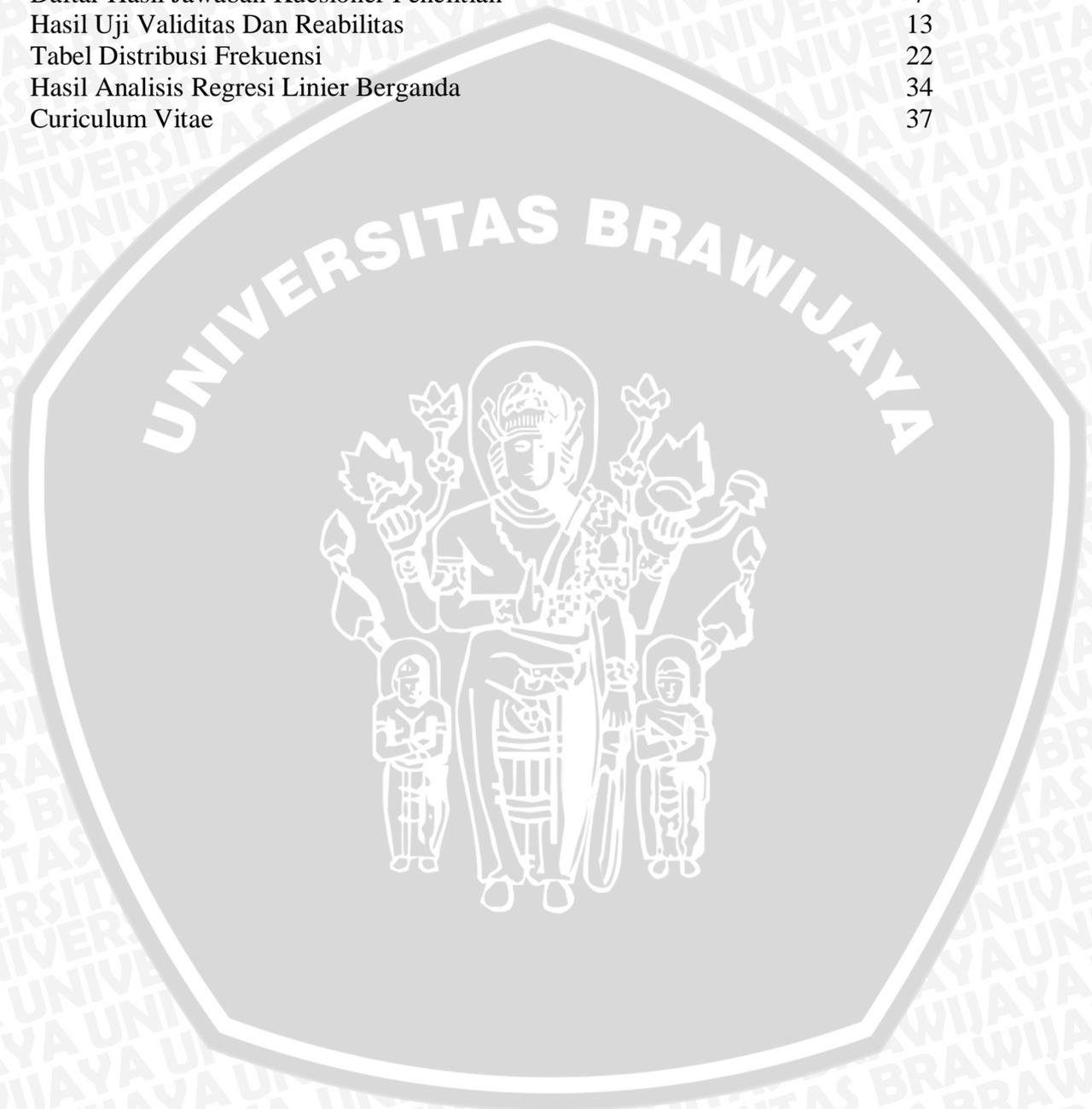
DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Konsep Pemikiran	40
2	Model Hipotesis	40
3	Hasil Uji Asumsi Heterokedastisitas	102
4	Hasil Uji Asumsi Normalitas	103



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul	Halaman
1	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	1
2	Daftar Pertanyaan Kuesioner	2
3	Daftar Hasil Jawaban Kuesioner Penelitian	7
4	Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas	13
5	Tabel Distribusi Frekuensi	22
6	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	34
7	Curriculum Vitae	37



BAB 1**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia saat ini, mengalami perkembangan teknologi informasi yang pesat dari tahun ke tahun yang mengarah pada era globalisasi. Sebagai Warga Negara Indonesia, kita dituntut untuk selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang mempengaruhi tatanan masyarakat baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan aspek-aspek lainnya. Tidak terkecuali lembaga-lembaga pemerintah juga turut melakukan perubahan dan pengembangan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu lembaga pemerintah yang melakukan perubahan dan pengembangan secara rutin ialah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dimana departemen tersebut dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan saat ini penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan.

Adanya tuntutan untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, mendorong DJP terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Sehingga penggalan potensi penerimaan pajak dari beberapa jenis pajak yang ada, dapat dipungut secara optimal dengan berpedoman pada asas keadilan sosial. Selain itu, DJP melakukan modernisasi perpajakan di segala bidang, salah satu modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP adalah pengembangan sistem informasi dan

pengembangan aplikasi perpajakan. “Tujuan yang ingin dicapai oleh DJP dalam modernisasi pajak adalah untuk menerapkan *good government* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *good government* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan, dan akuntabel, dengan memanfaatkan *system* informasi teknologi yang handal dan terkini (Rahayu, 2010:109)”. Sesuai pernyataan di atas, maka target penerimaan pajak yang direncanakan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien bahkan penerimaan pajak dapat lebih tinggi dibandingkan dengan target penerimaan pajak.

Selain itu modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP telah menghasilkan beberapa kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan menerapkan sistem komputerisasi dalam setiap pekerjaan yang ada dalam kantor pelayanan pajak. Sistem tersebut menghasilkan aplikasi komputer yang dapat memudahkan bagi Wajib Pajak maupun petugas pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Aplikasi-aplikasi tersebut adalah kunci dari perbaikan birokrasi yang sebelumnya menyusahkan wajib pajak. Oleh karena itu, perbaikan awal yang perlu dilakukan DJP menurut Rahayu (2010:121-122) :

Perbaikan *business process*, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting dalam penerapan program modernisasi DJP, yang mana program tersebut diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Diharapkan dengan diterapkannya *system full automation*, akan tercipta suatu *business process* yang efisien dan efektif karena proses administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, dan *paperless*, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun waktu. *Business process* dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung pegawai DJP dengan Wajib Pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN. Di samping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya *built-in control system*,

karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.

Berikut adalah langkah dalam *business process* menurut Rahayu (2010:122) :

Langkah awal perbaikan dalam *business process* adalah penulisan dan dokumentasi *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Selain penulisan *Standard Operating Procedures* SOP, perbaikan *business process* yang perlu dilakukan antara lain membuat suatu aplikasi-aplikasi komputer untuk memudahkan kinerja pegawai dalam melayani Wajib Pajak secara optimal dan untuk wajib pajak berguna dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya antara lain adalah dengan penerapan *e-system* (Sistem Elektronik).

Beberapa peraturan perpajakan mengenai penerapan *e-system* (Sistem Elektronik) sebagai berikut : Pertama, KEP 88/PJ 2004 tentang Penyampaian Surat pemberitahuan Elektronik bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dipandang perlu untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan. Kedua, PER 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik. Produk *e-system* yang diterapkan oleh DJP sebagai bentuk dari modernisasi perpajakan ialah dengan dibukanya fasilitas *e-registration* (pendaftaran NPWP secara online melalui internet), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital, *e-filing* (pengiriman SPT secara *online* melalui internet), dan *e-payment* (fasilitas pembayaran *online* untuk PBB). Semua fasilitas penerapan *e-system* tersebut diciptakan guna memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan aplikasi-aplikasi dalam mempermudah kinerja pegawai pajak ialah SIDJP (Sistem Informasi DJP), SIKKA (Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva), Portal DJP, *e-Nofa*, dll.

Produk *e-system* yang saat ini mulai terus dilakukan pembaharuan salah satunya adalah *e-SPT*. *E-SPT* merupakan suatu strategi yang dilakukan DJP untuk

mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPT, mempermudah dalam pelayanan, efisien dalam penyimpanan data wajib pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas peneliti ingin meninjau lebih khusus pada pemanfaatan aplikasi *e-SPT* Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam pelaporan, yang mana dalam penerapan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah kinerja pegawai pajak dan mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pada diterbitkannya Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-6/PJ/2009 khususnya pasal 3 ayat 1(a) (Casavera, 2009:21) adalah penyampaian Surat Pemberitahuan secara *e-SPT* diharapkan wajib pajak dapat menyampaikan langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir, yang dikirimkan adalah formulir induk SPT Masa dan/atau SPT Tahunan hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan.

Penelitian ini juga melakukan pembatasan pada KPP Pratama Surabaya Genteng yang terletak di pusat kota Surabaya yang sebagian besar merupakan wilayah perkantoran dan pertokoan serta pemukiman padat penduduk, dari sini dapat diketahui bahwa sektor perdagangan, industri dan kegiatan jasa adalah sektor yang menonjol dan strategis berpengaruh besar terhadap wilayah ini terutama sosial ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Ruang lingkup wilayah KPP Pratama Surabaya Genteng meliputi 5 kelurahan antara lain Kelurahan Embong Kaliasin, Kelurahan Ketabang, Kelurahan Peneleh, Kelurahan Genteng, dan Kelurahan Kapasari (Monografi Fiskal KPP Surabaya Genteng, 2012:4). Berikut adalah jumlah pelaporan

wajib pajak pengguna *e-SPT* Masa PPN dan pelaporan SPT masa PPN secara manual di KPP Patama Surabaya Genteng adalah :

Tabel 1 Data Jumlah Pelaporan Wajib Pajak Pengguna SPT Masa PPN

Jenis Wajib Pajak	2010	2011	2012	Jan s.d. Juni 2013
Manual	11.885	9.524	5.233	3.771
<i>e-SPT</i>	650	3.086	4.716	3.565
Jumlah	12.535	12.610	12.949	7.336

Sumber: Diolah dari Pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Genteng, 6 Agustus 2013

Melihat dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN sampai dengan juni 2013 dan sektor usaha yang menonjol sesuai dengan pernyataan diatas, KPP Pratama Surabaya Genteng memiliki potensi dalam peningkatan pelaporan pajak khususnya pada Pelaporan SPT Masa PPN dengan menggunakan *e-SPT*. Apalagi saat ini ditunjang dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-10/PJ/2013 dimana dalam peraturan tersebut merupakan perubahan dari PER-45/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-11/PJ/2013 dimana dalam peraturan tersebut merupakan perubahan dari PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Peraturan tersebut menjelaskan tentang kewajiban untuk wajib pajak dalam penyampaian SPT Masa PPN 1111 dan 1111 DM secara elektronik yang mana dengan persyaratan tertentu. Untuk memenuhi target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Ada beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak,

dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penggunaan *e-SPT* dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat.

Berdasarkan pernyataan di atas mendorong peneliti untuk meneliti lebih mendalam tentang pemanfaatan aplikasi *e-SPT* masa PPN atas penerapan PER-10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 yang mana dalam peraturan yang terbaru mewajibkan wajib pajak menggunakan *e-SPT* dengan beberapa kriteria khusus serta untuk mengetahui sejauh mana dampak penerapan tersebut terhadap tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, dalam penulisan penelitian skripsi ini peneliti memilih judul **“Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi *e-SPT* Masa PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh secara simultan antara variabel Persepsi Wajib Pajak, Kesiapan Teknologi, Pelayanan, dan Model Sosialisasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak atas diterapkannya PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013 ?
2. Apakah ada pengaruh secara parsial antara variabel Persepsi Wajib Pajak, Kesiapan Teknologi, Pelayanan, dan Model Sosialisasi terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak atas diterapkannya PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013 ?

3. Manakah yang lebih dominan diantara variabel Persepsi Wajib Pajak, Kesiapan Teknologi, Pelayanan, dan Model Sosialisasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng atas diberlakukannya PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh secara simultan antara variabel Persepsi Wajib Pajak, Kesiapan Teknologi, Pelayanan, dan Model Sosialisasi terhadap tingkat kepatuhan pada Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Genteng atas diterapkannya PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh secara parsial variabel Persepsi Wajib Pajak, Kesiapan Teknologi, Pelayanan, dan Model Sosialisasi terhadap tingkat kepatuhan pada Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Genteng atas diterapkannya PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan variabel yang lebih dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng atas diberlakukannya PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa kontribusi sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademisi :

- a. Bagi pengembangan ilmu Perpajakan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Prodi Perpajakan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Elektronik Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (*e-SPT* Masa PPN) terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Genteng.
- b. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini, Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai ilmu pengetahuan di bidang ilmu perpajakan terutama PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan perkembangannya, serta meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Elektronik Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (*e-SPT* Masa PPN) terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Genteng.

2. Kontribusi Praktis

Kantor Pelayanan Pajak sebagai penyedia layanan *e-SPT* dan menerapkan *e-SPT* Masa PPN dapat mengetahui bagaimana Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi

Elektronik Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (*e-SPT* Masa PPN) dalam Pelaporan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Genteng.

3. Kontribusi Masyarakat

- a. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini, Penulis berharap masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami penerapan *e-SPT* Masa PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masyarakat dapat termotivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak maka pendapatan negara akan meningkat pula, ketika peningkatan pendapatan tersebut terwujud maka hal tersebut akan bermanfaat pula bagi kesejahteraan masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan tentang inti dari penulisan penelitian ini. Perincian sistematika pembahasan antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, Penulis memberikan gambaran umum mengenai penyusunan penelitian skripsi yang meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian yang berguna untuk memberikan gambaran awal untuk para pembaca untuk mempermudah dalam mengerti dan memahami mengenai masalah akan dibahas dalam laporan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi E-SPT Masa PPN Dalam Pelaporan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng”.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan teori dan konsep yang terkait dengan kebijakan Menteri Keuangan tentang Penerapan *e-SPT* Masa PPN dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Teori dan konsep dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur akademik maupun dari lembaga atau institusi yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai deskripsi objek penelitian, deskripsi statistik data, analisis data dan interpretasi data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Selain itu dari hasil penelitian penulis mencoba untuk memberikan saran dan masukan yang dapat digunakan oleh instansi tempat dilakukannya penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa peneliti terdahulu yang menjadi sumber referensi dalam penelitian ini :

1. Ita Salsasalina lingga (2012)

Penelitian Ita Salsasalina lingga (2012) ini mengambil judul “Pengaruh Penerapan *e-SPT* PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Majalaya”. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan *e-SPT* PPN pada KPP Pratama Majalaya menurut persepsi wajib pajak, (2) Untuk mengetahui efisiensi pengisian SPT menggunakan aplikasi *e-SPT* PPN menurut persepsi wajib pajak, (3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penerapan *e-SPT* PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak, (4) Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *e-SPT* PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *Summate Rating Method Likert Scale* yaitu Pengukuran skala ini dilakukan dengan cara menetapkan bobot, kemudian menambahkan untuk mendapatkan suatu jumlah dari masing-masing indikator yang hendak diukur. Mempertimbangkan keterbatasan jangka waktu penelitian

dan waktu yang dapat disisihkan oleh calon responden untuk mengisi kuesioner, penulis menetapkan jumlah sampel minimal adalah 30 responden.

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini ada 2, yaitu Variabel Bebas atau *Independent Variable* (X) adalah Penerapan e-SPT PPN. Indikator variabel ini adalah : (1) Urgensi diterapkannya sistem e-SPT. (2) Tujuan penerapan sistem e-SPT. (3) Sosialisasi kepada wajib pajak. (4) Kendala dalam penerapan e-SPT. Sedangkan Variabel Terikat atau *Dependent Variable* (Y) Data informasi yang menjadi variabel dependen adalah efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak. Indikator variabel ini adalah: (1) Kecepatan, (2) Keakuratan, (3) Efisiensi Ruang Penyimpanan/Pengarsipan.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, seberapa jauh pengaruh variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat dilakukan dengan cara membandingkan *p value* dengan $\alpha = 0,05$. Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh *p value* sebesar 0,009. Dengan kata lain karena nilai *p value* $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya penerapan e-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

2. Oktaviane Lidya Winerungan (2013)

Penelitian Oktaviane Lidya Winerungan (2013) ini mengambil judul “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. Teknik pengambilan sampel

adalah *random sampling*. Responden terbagi dua yaitu 25 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Manado dan 25 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Bitung.

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini ada 2, yaitu Variabel Bebas atau *Independent Variable* (X) adalah (1) Sosialisasi, (2) Pelayanan Fiskus, (3) sanksi perpajakan. Sedangkan Variabel Terikat atau *Dependent Variable* (Y) adalah kepatuhan WPOP. Hasil analisis yang dilakukan, adalah (1) Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung, (2) Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bitung lebih besar dari pada pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Manado. Hal ini menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Manado dan KPP Bitung lebih tinggi dibandingkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado.

3. Rendra Pramana (2008)

Melakukan penelitian mengenai Penerapan Aplikasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Elektronik (e-SPT) Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik Analisa Jalur (*Path Analysis*) dan teknik Uji Statistik,

Adapun variabel yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung dengan melihat koefisien antara lain :

1. Variabel aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 (X_1) berpengaruh langsung terhadap kepatuhan.
2. Variabel (X_1) berpengaruh langsung terhadap variabel pengolahan data PPN (X_2).
3. Variabel (X_2) berpengaruh langsung terhadap variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Variabel X_1 tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Y) sehingga untuk mencapai Y harus melalui variabel X_2 atau variabel pengolahan data PPN.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Sampling Purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jumlah anggota sampel yang dipergunakan oleh peneliti sebanyak 30 Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang sebagai responden dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap seluruh hasil hipotesis, maka gambaran tentang hasil penelitian tersebut adalah :

1. Hipotesis I

Hasil analisa penelitian ini membuktikan bahwa variabel aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 berpengaruh signifikansi terhadap pengolahan data PPN.

Artinya jika penerapan aplikasi e-SPT dilakukan maka akan semakin

membantu wajib pajak dalam mengolah data PPN meskipun dengan jumlah transaksi yang banyak.

2. Hipotesis II

Hasil penghitungan diketahui variabel aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 (X_1) secara langsung mencapai variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Y) dengan nilai koefisien korelasi (0,158). Untuk mengetahui pengaruh tidak variabel X_1 melalui X_2 terhadap Y maka dilakukan regresi variabel aplikasi e-SPT terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pengolahan data PPN secara bersama-sama diperoleh nilai F_{hitung} 0,439 lebih kecil dari F_{tabel} 3,320 atau signifikansi F 0,649 lebih besar dari 5 % (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X_1 terhadap Y melalui X_2 tidak ada pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berarti ada variabel lain di luar variabel penerapan aplikasi e-SPT 1107 dan pengolahan data PPN yang sekiranya mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Yang Diteliti Penulis Dengan Peneliti Terdahulu adalah :

Tabel 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Diteliti dengan Peneliti Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Ita Salsalina Lingga, (2012)	Pengaruh Penerapan <i>e-SPT</i> PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Majalaya	penerapan <i>e-SPT</i> PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.	Objek yang diteliti oleh penulis sama yaitu mengenai Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.	Perbedaan peneliti dengan Ita Salsalina lingga terletak pada yang ditelitinya yaitu a. Jika Ita meneliti tentang <i>e-SPT</i> PPN secara umum maka peneliti hanya meneliti tentang <i>e-SPT</i> Masa PPN. b. Fokus penelitian yang digunakan berbeda, jika Ita fokus penelitian pengaruh penerapan <i>e-SPT</i> PPN menurut persepsi wajib pajak jika penulis meneliti pengaruh penggunaan aplikasi <i>e-SPT</i> Masa PPN atas penerapan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 dalam pelaporan SPT Masa PPN terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng.
Oktaviane Lidya Winerungan (2013)	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung	(1) Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung, (2) Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap	Variabel independen yang digunakan sama yaitu Sosialisasi dan pelayanan fiskus sedangkan variabel dependen yang digunakan sama yaitu kepatuhan	Obyek dan tempat yang diteliti berbeda yaitu kalau oktaviane obyek yang digunakan Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung sedangkan kalau peneliti tentang <i>e-SPT</i> Masa PPN Terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Studi Pada Wajib pada

		kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bitung lebih besar dari pada pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Manado.		KPP Pratama Surabaya Genteng)
Rendra Pramana (2008)	Penerapan Aplikasi Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (<i>e-SPT</i>) Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	aplikasi <i>e-SPT</i> Masa PPN 1107 berpengaruh signifikansi terhadap pengolahan data PPN	Objek yang diteliti oleh penulis sama yaitu mengenai Surat Pemberitahuan secara Elektronik terhadap tingkat kepatuhan	<p>a. Responden yang diteliti Rendra hanya menggunakan PKP sedangkan peneliti responden yang akan diteliti menggunakan PKP dan Non PKP.</p> <p>b. Fokus penelitian yang digunakan berbeda, jika Rendra fokus penelitian tentang <i>e-SPT</i> Masa PPN 1107 jika penulis fokusnya <i>e-SPT</i> Masa PPN 1111 dan <i>e-SPT</i> Masa PPN 1111 DM.</p>

B. Persepsi Wajib Pajak

Rakhmat (2004:25) dalam Iprianto (2013:89) mendefinisikan “persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi yang menafsirkan pesan”. Menurut Robbins (2008:176) dalam Iprianto (2013:89) “secara implisit persepsi suatu individu terhadap suatu obyek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi Individu lainnya terhadap obyek yang sama”. Fenomena ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang jika digambarkan tampak sebagai berikut Robbins (2008:176) dalam Iprianto (2013:89) :

1. Faktor dalam situasi seperti waktu, keadaan/tempat kerja, keadaan sosial.
2. Faktor yang mempersepsi sikap, motif, kepentingan, pengalaman, pengharapan.
3. Faktor pada target seperti hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan.

Berdasarkan pernyataan di atas makna persepsi wajib pajak adalah suatu penafsiran individu (wajib pajak) terhadap pesan yang telah diberitahukan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) dalam hal peraturan dan segala hal tentang pajak yang mana dapat berguna untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya .

C. Kesiapan Teknologi

Makna Kesiapan teknologi pada awalnya dipengaruhi oleh wajib pajak itu sendiri, apakah dari dalam diri wajib pajak tersebut siap untuk menerima kemajuan teknologi khususnya dalam hal ini pelaporan menggunakan *e-SPT* Masa PPN. Jika Wajib Pajak bisa menerima sebuah teknologi baru maka Wajib Pajak tersebut tidak ragu-ragu untuk melaporkan pajaknya menggunakan *e-SPT* Masa PPN. “Kesiapan teknologi informasi juga mempengaruhi kemajuan pola pikir wajib pajak, artinya

ketika wajib pajak tersebut siap untuk menerima teknologi yang baru berarti pemikiran wajib pajak tersebut semakin maju ini berarti wajib pajak bisa beradaptasi dengan teknologi yang setiap tahun semakin berkembang Desmayanti (2012:27)". Hal ini didukung juga oleh penelitian Lai (2008) dalam Desmayanti (2012:28) "Bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi teknologi kesiapan (*technology readiness*) yaitu keyakinan (*optism*), inovasi (*innovativeness*), ketidaknyamanan (*discomfort*), dan ketidakamanan (*insecurity*)".

D. Pelayanan

"Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006 dalam Winerungan, 2013:963)". Menurut Rahayu (2010:28) dalam (winerungan, 2013:963) menyatakan "Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara". Tujuan pelayanan prima ini adalah:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Tercapainya produktifitas aparat perpajakan

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan pajak merupakan pilar utama dalam perpajakan. Ketika pelayanan pajak dioptimalkan maka kepedulian masyarakat akan pemenuhan perpajakannya akan terpenuhi dan target penerimaan pun juga akan terpenuhi.

E. Model Sosialisasi

Menurut Mustofa (2007) dalam Restiani (2011:17), “sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif”. Sedangkan menurut Basamalah (2007) juga disebutkan dalam Restiani (2011:17), “sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, normadan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif”. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu sosialisasi perpajakan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh DJP untuk memberikan pemahaman, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai pemberlakuan segala sesuatu yang berhubungan dengan perundang-undangan perpajakan. Untuk itu DJP selaku badan yang menangani perpajakan, telah mengatur mengenai penyeragaman kegiatan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat khususnya wajib pajak yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ./2007. Berdasarkan peraturan tersebut media informasi yang dapat digunakan dalam melakukan sosialisasi perpajakan meliputi media televisi, koran, spanduk, flyers (poster dan brosur), billboard/mini billboard, dan radio. Penyampaian informasi tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan bukan secara teknis sesuai di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh

wajib pajak dan pemahaman akan peraturan perundang-undangan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak.

F. Pajak

1. Pengertian Pajak

Beberapa pengertian atau pandangan tentang definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Diantaranya mengemukakan definisi pajak menurut para ahli antara lain : Pertama, berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua, menurut Prof. Dr. P.JA. Andriani (diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo 1991:2) dalam (Harjo, 2013:4) adalah :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara menyelenggarakan pemerintahan.

Ketiga, Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmad Soemitro SH (1990:5) dalam (Harjo, 2013:4), adalah : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Berdasarkan pengertian di atas dapat

disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran rutin wajib pajak kepada Negara dan penerapannya dapat dipaksakan, dimana manfaatnya tidak langsung diterima oleh wajib pajak tetapi digunakan untuk keperluan Negara dan kemakmuran masyarakat.

2. Fungsi Pajak

Pajak yang dikenakan masyarakat mempunyai 2 fungsi pajak (Fidel, 2010:6), yaitu:

- (a) Fungsi Finansial (*Budgetar*)
Fungsi pajak ialah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja Negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Tujuan ini biasanya disebut “*revenue adequacy*” yaitu bahwa pemungutan pajak tersebut ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai belanja Negara.
- (b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Fungsi pajak itu bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan kas negara, tetapi untuk melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya.

3. Pembagian Pajak

Pembagian pajak dapat digolongkan 3 macam, yaitu menurut golongan, sifat dan pemungutnya (Agustinus & Kurniawan, 2009:2-3), antara lain :

- (a) Menurut Golongan :
 - (1) Pajak Langsung : pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - (2) Pajak Tidak Langsung : Pajak yang pembebanannya dilimpahkan ke pihak lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- (b) Menurut Sifat :
 - (1) Pajak Subyektif : Pajak yang berpangkal atau berdasarkan subyeknya yang selanjutnya syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak .
Contoh : Pajak Penghasilan

- (2) Pajak Obyektif : pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPNBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)
- (c) Menurut Pemungut :
 - (1) Pajak Pusat : pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Materai
 - (2) Pajak Daerah : pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dll.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 3 (Mardiasmo, 2009:7-8), yaitu :

- (a) *Official Assesment System*
Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.
Cirinya :
 - (1) Wewenang untuk menentukan pajak terutang ada pada fiskus
 - (2) Wajib pajak bersifat pasif.
 - (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus.
- (b) *Self Assesment System*
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya :
 - (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - (2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - (3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- (c) *With Holding System*
adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

G. Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Definisi Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No 16 tahun 2009 Pasal 1 angka 11 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah : “Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan undang-undang No 28 tahun 2007 pasal 1 angka 12 juga disebutkan pengertian dari Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), yaitu “Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak (jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang)”. Aturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Berdasarkan pengertian SPT di atas dapat disimpulkan bahwa SPT ialah Media yang digunakan wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak (Devano dan Rahayu, 2006:150), adalah :

- (a) Memberikan data dan angka yang relevan dengan penghitungan kena pajak.
- (b) Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
- (c) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (wajib pajak dalam hal penghasilan).
- (d) Melaporkan pembayaran pajak dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (wajib pajak dalam hal penghasilan).
- (e) Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM) bagi Pengusaha Kena Pajak.

Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) bagi Pengusaha Kena Pajak (Lingga, 2012:10-11), yaitu :

- (a) Merupakan sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dalam masa pajak dan/atau tahun pajak.
- (b) Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- (c) Melaporkan tentang pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Jenis SPT (Surat Pemberitahuan)

Jenis-Jenis SPT (Surat Pemberitahuan) ada 2 macam (Devano dan Rahayu, 2006:151), yaitu :

- (a) SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan, penghitungan, dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak. Adapun jenis-jenis SPT Tahunan ialah :
 - (1) SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kode SPT 1770, dan SPT 1770S.
 - (2) SPT Wajib Pajak Badan dengan kode SPT 1771, dan SPT 1771S.
 - (3) SPT Tahunan PPh Pasal 21 kode SPT 1721.
 - (4) SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Badan yang melakukan Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris.

(b) SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak. Adapun jenis-jenis SPT Masa ialah :

- (1) SPT Masa PPh : SPT Masa PPh pasal 21/26, SPT Masa PPh pasal 22, SPT Masa PPh pasal 23/26, SPT Masa PPh pasal 25, SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2, SPT Masa PPh pasal 15.
- (2) SPT Masa PPN (Siti Resmi, 2013: 131-132) adalah :
 - SPT Masa PPN 1111, yang digunakan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang menggunakan mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran (normal).
 - SPT Masa PPN 1111 DM, yang digunakan oleh pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan.
 - SPT PPN 1107 PUT, SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN, atau formulir 1107 PUT, yang digunakan oleh pemungut PPN.

H. *e-SPT*

1. Pengertian *e-SPT*

Pengertian *e-SPT* berdasarkan PER-6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik yaitu : “*e-SPT* adalah suatu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”. Ahli lain berpendapat bahwa Pengertian *e-SPT* adalah:

Penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian *e-SPT* menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Liberti Pandiangan, 2008:35).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *E-SPT* adalah media penyampaian SPT beserta lampiran-lampirannya secara elektronik,

media ini untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Pengguna *e-SPT* Masa PPN

Pengguna *e-SPT* Masa PPN adalah Wajib Pajak badan maupun orang pribadi yang melaporkan *e-SPT* Masa PPN, dimana berdasarkan pasal 1 ayat 2, UU No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dijelaskan bahwa: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

3. Persyaratan Sebelum Melakukan Instalasi Aplikasi E-SPT Masa PPN

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, 2011 dalam User Manual eSPT Masa PPN, Setiap aplikasi memiliki spesifikasi kebutuhan yang berbeda agar dapat dijalankan di komputer user. Standar kebutuhan minimal untuk dapat menjalankan aplikasi *e-SPT* PPN adalah :

- (a) Perangkat Keras :
 - Pentium III 600 Mhz
 - 32 Mb RAM
 - 40 Mb Harddisk space
 - CD-ROM Drive
 - VGA dengan minimal resolusi layar 800 x 600
 - Mouse
 - Keyboard

- (b) Perangkat Lunak :
- Microsoft Office XP
 - Microsoft Office Access atau Microsoft Data Access Component.
 - Microsoft.NET Framework 3.5

4. Penggunaan Aplikasi *e-SPT* Masa PPN

Ringkasan Penggunaan Aplikasi *e-SPT* berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, (2011) dalam (User Manual *e-SPT* Masa PPN, 2011:7) meliputi :

- (a) Ubah *Setting Regional* komputer menjadi format Indonesia.
Langkah-langkahnya :
- (1) Buka Control panel - Pilih Region and Language
 - (2) Kemudian ubah format menjadi Indonesia
- (b) Lakukan instalasi *e-SPT* PPN dari folder setup yang diberikan.
- (1) Buka folder *e-SPT* PPN - lalu Doble klik file setup
 - (2) Klik Accept, kemudian muncul kotak dialog
 - (3) Klik Yes, lalu ikuti langkah selanjutnya sampai muncul kotak dialog.
 - (4) Lalu Klik radio button I Agree kemudian klik tombol Next
 - (5) Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\DJP*e-SPT* PPN 1111\
 - (6) Klik tombol Next pada Windows Confirmation Installation
 - (7) Sistem akan menampilkan proses Copying File dalam bentuk progress bar. Setelah beberapa saat akan tampil Layar Installation Complete. Klik Close untuk mengakhiri proses instalasi.
 - (8) Untuk Windows 7, jika aplikasi diinstall di C maka database yang tersimpan di folder db akan dijumpai kosong (hanya sebagai shortcut). Untuk mendapatkan file asli yang menyimpan data-data transaksi yang telah diinput klik tombol compatibility files di eksplorer.
 - (9) Ketika Aplikasi *e-SPT* PPN 1111 telah terinstal dalam Komputer/Laptop maka file tersebut akan tersimpan dalam folder C:\Program Files\DJP*e-SPT* PPN 1111. Dalam Folder tersebut terdapat User Manual Penggunaan Aplikasi *e-SPT* PPN 1111 tersebut dalam format Ms Word, yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan Aplikasi *e-SPT* PPN 1111.
- (c) Sediakan Database sesuai dengan kebutuhan.
- (d) Lakukan koneksi ke database yang telah dibuat sebelumnya melalui menu Program → Koneksi Database.

- (e) Klik Nama Database yang akan digunakan – pilih.
- (f) Input profil wajib pajak pada form Profil Wajib Pajak.
- (g) Input data Lawan Transaksi melalui menu Tools → Referensi → Lawan Transaksi atau Impor data Lawan Transaksi melalui menu Tools → Impor Data → Lawan Transaksi.
- (h) Dalam hal penomoran faktur dipilih secara Auto, atur nilai awal nomor sekuen melalui menu Tools → Referensi → Nomor Faktur.
- (i) Input data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dengan cara manual (diinput satu persatu) melalui menu Input Data → Pajak Keluaran dan Input Data → Pajak Masukan atau Impor data Faktur melalui menu Tools → Impor Data → Faktur Pajak dan Tools → Impor Data → Faktur VAT Refund.
- (j) Lakukan posting data faktur pajak yang telah diinput melalui menu Input Data → Posting Data atau melalui tombol Posting pada form Daftar Faktur Pajak Keluaran dan form Daftar Faktur Pajak Masukan.
- (k) Aktifkan menu SPT PPN 1111 untuk menampilkan SPT yang dibuat melalui menu Setting → Setting SPT PPN 1111.
- (l) Tampilkan SPT pada Lampiran A1, Lampiran A2, Lampiran B1, Lampiran B2, Lampiran B3, Lampiran AB dan SPT Induk melalui menu SPT.
- (m) Lengkapi data SPT Induk dan Lampiran AB pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih).
- (n) Inputkan SSP (jika ada) pada menu SPT → Surat Setoran Pajak. Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui tombol Cetak pada setiap form Induk SPT dan Lampiran. Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT → Buat CSV.

5. Tata Cara Penyampaian *e-SPT*

Adapun tata cara pelaporan *e-SPT* berdasarkan PER-6/PJ/2009 mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik adalah sebagai berikut :

- (a) Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi *e-SPT* pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- (b) Wajib pajak menggunakan aplikasi *e-SPT* untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain :
 - (1) Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.

- (2) Bukti pemotongan/pemungutan PPh.
 - (3) Faktur Pajak.
 - (4) Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.
 - (5) Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak
- (c) Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi *e-SPT* dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi *e-SPT*.
 - (d) Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
 - (e) Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi *e-SPT*.
 - (f) Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi *e-SPT*.
 - (g) Wajib pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan disimpan dalam media elektronik (CD, *flash disk*).
 - (h) Wajib pajak menyampaikan *e-SPT* ke KPP tempat wajib terdaftar dengan cara:
 - (1) Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa kurir ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau
 - (2) Melalui *e-filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (i) Atas penyampaian *e-SPT* secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT sedangkan penyampaian *e-SPT* melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.
 - (j) Atas penyampaian melalui *e-filing* diberikan bukti penerimaan elektronik.

6. Tata Cara Pembetulan *e-SPT*

Berdasarkan Modul Sosialisasi *e-SPT* yang telah dilakukan oleh DJP, berikut tata cara pembetulan *e-SPT* adalah:

- (a) Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (*e-SPT*), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (*e-SPT*).

- (b) Pembetulan atas SPT yang disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (*e-SPT*) atau dalam bentuk kertas (*hardcopy*).

7. Batas waktu penyampaian atau pelaporan SPT Masa PPN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 yang mana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 bahwa batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah :

Tabel 3 Batas Waktu Pelaporan SPT Masa PPN

No	Pihak yang menyampaikan SPT	Pihak yang Menyampaikan SPT	Batas waktu penyampaian SPT
1	PPN dan PPNBM	Pengusaha Kena Pajak	Paling lama akhir bulan berikutnya
2.	PPN dan PPNBM DJBC	Bea Cukai	Paling lama 7 hari setelah akhir masa pajak
3.	PPN dan PPNBM	Pemungut pajak selain bendaharawan	Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.

Sumber : Waluyo, 2011: 38-39

Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian dan pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyampaian dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

8. Batas Waktu Pembayaran Atau Penyetoran Masa PPN

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 yang berlaku per 1 April 2010 sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri keuangan nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4 Batas Waktu Pembayaran Atau Penyetoran Masa PPN

No	Pihak yang pemotong/pemungut	Batas waktu Pembayaran atau penyetoran atau pelunasan
1	PPN atau PPN dan PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN	Harus disetor paling lama 7 hari berikutnya setelah masa pajak berakhir
2.	PPN atau PPN dan PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai pemungut PPN	Harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
3.	PPN atau PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk.	Harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Sumber : Waluyo, 2011: 41

Catatan : Ketika tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

9. Dikecualikan penggunaan *e-SPT* Masa PPN

Berdasarkan PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013 yang mana diperjelas dalam Surat Edaran SE-18/PJ/2013 dan Surat Edaran SE-17/PJ/2013, Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (Setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik), PKP orang pribadi yang:

- (a) Melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan
- (b) Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Berdasarkan kriteria diatas maka Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik.

10. Tata cara Penerimaan dan Pengemasan SPT Masa PPN

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-40/PJ/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengemasan SPT Masa di KPP berkenaan dengan Pengolahan SPT di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, maka kepada PKP yang akan melaporkan SPT Masa PPN harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- (a) Sebelum diterima oleh petugas, SPT Masa PPN tersebut wajib diteliti oleh petugas *Help Desk*.
- (b) Penelitian fisik SPT meliputi :
 - (1) Ukuran kertas yang sesuai adalah Folio (F4) atau ukuran 8,5" x 13".
 - (2) Jenis formulir yang digunakan harus sesuai.
 - (3) Kondisi fisik SPT yang sesuai adalah bersih dan tidak dilipat.
 - (4) Layout SPT yang sesuai adalah presisi.
- (c) Penelitian pengisian dan lampiran SPT meliputi :
 - (1) Identitas Wajib Pajak (nama dan NPWP), masa pajak, tahun pajak.
 - (2) Status SPT (normal atau pembetulan).
 - (3) Status pembayaran (Lebih Bayar atau Kurang Bayar atau Nihil).
 - (4) Apabila Kurang Bayar, NTPN harus dicantumkan.
 - (5) Apabila Lebih Bayar, kolom kompensasi atau restitusi harus diisi.
 - (6) Kelengkapan penulisan elemen-elemen (tidak menggunakan singkatan dan simbol-simbol).
 - (7) Ketepatan pemindahan angka-angka pada lampiran SPT ke SPT Induk.
 - (8) Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilampirkan adalah SSP lembar ketiga Asli.
- (d) Satu SPT Masa PPN hanya digunakan untuk melaporkan satu masa pajak.
- (e) SPT Masa PPN dengan status pembayaran nihil tanpa kegiatan (SPT Masa PPN yang tidak terdapat transaksi dan pada induk SPT tidak

terdapat kompensasi) hanya wajib melaporkan SPT induk tanpa lampiran.

- (f) Dalam hal wajib pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak lengkap, petugas akan mengembalikan SPT Masa PPN tersebut untuk dilengkapi oleh Wajib Pajak

Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan, supaya dalam pelaporan SPT Masa PPN tidak dikembalikan oleh petugas di Kantor Pelayanan Pajak atau di KP2KP.

11. Keuntungan Penggunaan *e-SPT*

Dalam penggunaan aplikasi *e-SPT* ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh diantaranya :

- (a) Aplikasi dibuat untuk mudah digunakan (*User Friendly*) dan dilengkapi dengan petunjuk pemakaian.
- (b) Tampilan aplikasi mendekati formulir SPT aslinya.
- (c) Administrasi data SPT yang lengkap.
- (d) Meng-*update* data SPT induk dari lampiran-lampirannya secara otomatis.
- (e) Perhitungan perpajakan dalam SPT dilakukan secara otomatis sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (f) Membuat *file* SPT elektronik yang telah di-enkripsi untuk keamanan data SPT.
- (g) Mencetak SPT induk beserta lampirannya.
- (h) Menyediakan fasilitas penyesuaian tarif yang digunakan.
- (i) Dapat digunakan oleh banyak pemakai dalam waktu bersamaan (*multi user*).

- (j) Ubah *username* dan *password* aplikasi.
- (k) Cukup sekali mengisi profil wajib pajak pada aplikasi yang berlaku untuk berbagai masa dan tahun pajak.
- (l) Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
- (m) Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

12. Perbedaan PER-44/PJ/2010 dengan PER-11/PJ/2013

Berdasarkan PER-44/PJ/2010 dan PER-11/PJ/2013 terdapat perbedaan penting dalam penggunaan *e-SPT* Masa PPN. Adapun perbedaan tersebut diantaranya :

Tabel 5 Perbedaan PER-44/PJ/2010 dengan PER-11/PJ/2013

No	Pasal	PER-44/PJ/2010	PER-11/PJ/2013
1.	diantara ayat (1) dan ayat (2) disipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a).	Tidak ada	Pajak Masukan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat dikreditkan namun tidak dilakukan pengkreditan oleh PKP, harus dilaporkan dalam Formulir 1111 B3.
2.	Pasal 3 ayat 2	SPT Masa PPN 1111 baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik dapat digunakan oleh PKP.	Setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik.
3.	Pasal 3 ayat 3	SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik wajib digunakan oleh PKP yang sama kriterianya dengan Pasal 3 ayat (2)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKP orang pribadi yang : 1. melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh

		<p>PER-44/PJ/2010 huruf a-e dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.</p>	<p>lima) dokumen (Faktur Pajak/ dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan</p> <p>2. jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik.</p>
4.	Pasal 5 ayat 1	<p>PKP dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam hal SPT Masa PPN 1111 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak disampaikan dalam bentuk data elektronik.</p>	<p>PKP dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5).</p>

Sumber : PER-44/PJ/2010 dengan PER-11/PJ/2013, Agustus 2013

13. Perbedaan PER-45/PJ/2010 dengan PER-10/PJ/2013

Berdasarkan PER-45/PJ/2010 dan PER-10/PJ/2013 terdapat perbedaan penting dalam penggunaan *e-SPT* Masa PPN. Adapun perbedaan tersebut diantaranya :

Tabel 6 Perbedaan PER-45/PJ/2010 dengan PER-10/PJ/2013

No	Pasal	PER-45/PJ/2010	PER-10/PJ/2013
1.	Pasal 3 ayat 2	SPT Masa PPN 1111 DM baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik dapat digunakan oleh PKP yang: a. menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan; atau b. menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan, dengan jumlah tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.	Setiap PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan peredaran usaha atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik.
2.	Pasal 3 ayat 3	SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik wajib digunakan oleh PKP yang sama kriterianya dengan Pasal 3 ayat (2) PER-44/PJ/2010 huruf a-e dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKP orang pribadi yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan peredaran usaha atau

		<p>dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.</p>	<p>kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya yang:</p> <p>a. melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/ dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan</p> <p>b. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik.</p>
3.	Pasal 5 ayat 1	<p>PKP dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam hal SPT Masa PPN 1111 DM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak disampaikan dalam bentuk data elektronik.</p>	<p>PKP dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam hal SPT Masa PPN 1111 DM disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)</p>

Sumber : PER-45/PJ/2010 dengan PER-10/PJ/2013, Agustus 2013

I. Kepatuhan Perpajakan

1. Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Pengertian Kepatuhan pajak, (Harjo, 2013:67) adalah “Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D Nowak (Rahayu, 2010:138) sebagai “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pengertian Wajib Pajak patuh (Rahayu, 2010:142) adalah

Wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Sebenarnya pemberian penghargaan bagi wajib pajak sudah pasti akan member motivasi dan *deterrent effect* yang positif bagi wajib pajak lain untuk menjadi wajib pajak patuh.

2. Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh (Rahayu, 2010:142). Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak pada Wajib Pajak patuh (Rahayu, 2010:143) adalah :

- (1) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib

Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen pajak.

(2) Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan untuk PPh dan 7 hari untuk PPN.

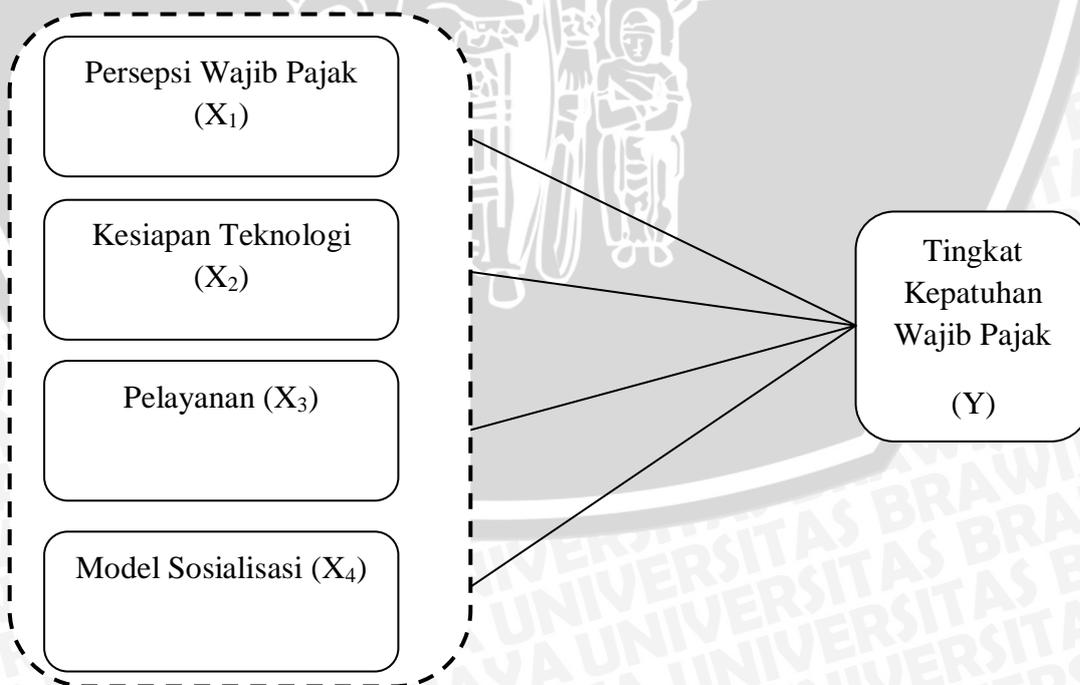
J. Kerangka Pemikiran

1. Model Konsep



Gambar 1 Konsep Pemikiran

2. Model Hipotesis



Gambar 2 Model Hipotesis

K. Hipotesis

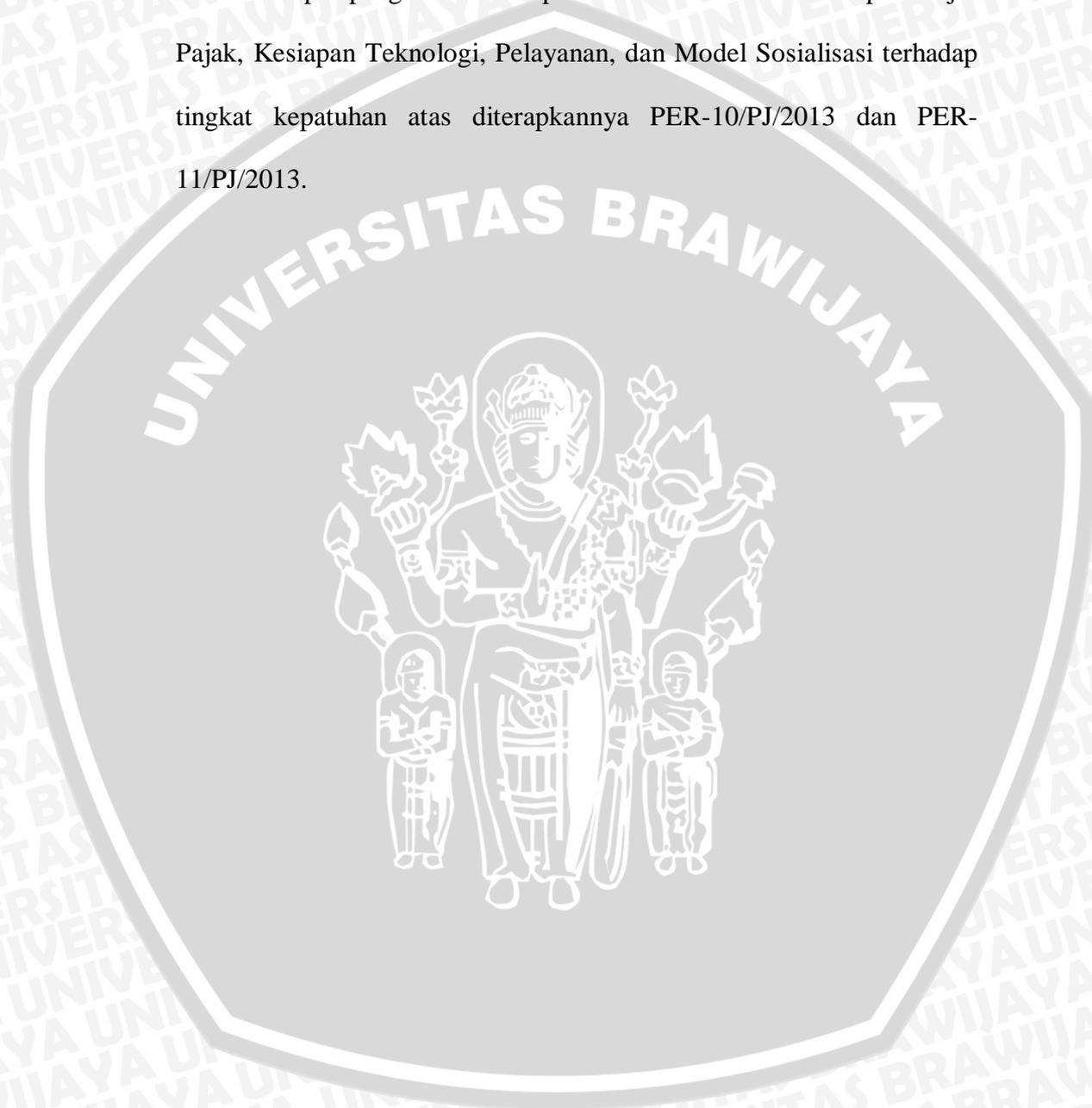
Menurut Sugiyono (2002) dalam (Pramana, 2008:60) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah, belum jawaban yang empiris.

Berdasarkan permasalahan yang ada, landasan teori dan peneliti memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan peneliti terdahulu. Perbedaannya adalah subyek pajak yang digunakan dalam penelitian serta dasar hukum yang dipergunakan dalam peneliti dan pengaruhnya terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya. Sehingga alasan pemilihan hipotesis adalah untuk membuktikan seberapa pengaruhnya penerapan aplikasi *e-SPT* Masa PPN terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak jika ditinjau dengan diterbitkannya PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013. Berikut adalah Hipotesis yang akan dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini :

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara variabel Persepsi Wajib Pajak, Kesiapan Teknologi, Pelayanan, dan Model Sosialisasi terhadap tingkat kepatuhan atas diterapkannya PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013.
2. H_1 : Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel Persepsi Wajib Pajak, Kesiapan Teknologi, Pelayanan, dan Model Sosialisasi terhadap

tingkat kepatuhan atas diterapkannya PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013.

3. H2 : Terdapat pengaruh secara parsial antara variabel Persepsi Wajib Pajak, Kesiapan Teknologi, Pelayanan, dan Model Sosialisasi terhadap tingkat kepatuhan atas diterapkannya PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi *e-SPT* Masa PPN Dalam Pelaporan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng), Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah *explanatory research*. Menurut Masri Sangarimbun menjelaskan bahwa *explanatory research* adalah “Penelitian yang menjelaskan hubungan klausal antara variabel-variabel yang telah ditentukan (Sangarimbun dan Efendi, 2006:5)”. Sehingga, pengujian hipotesis merupakan pengujian pengaruh antara dua variabel atau lebih, untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini termasuk penelitian *survey* kuantitatif karena mengambil sampel dari suatu populasi yang berada di KPP Surabaya Genteng, meneliti tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemanfaatan aplikasi *e-SPT* Masa PPN atas diterapkannya PER-10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng dan wajib pajak yang melaporkan *e-SPT* Masa PPN di wilayah Surabaya Genteng. Alasan pemilihan lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surabaya Genteng dan wajib pajak terdaftar pengguna *e-SPT* Masa PPN di wilayah Surabaya Genteng, dikarenakan Wilayah KPP Pratama Surabaya Genteng terletak di pusat kota yang sebagian besar, merupakan wilayah perkantoran dan pertokoan serta pemukiman padat penduduk, dari sini dapat diketahui bahwa sektor perdagangan, Industri dan kegiatan jasa adalah sektor yang menonjol dan strategis berpengaruh besar terhadap wilayah ini terutama sosial ekonomi dan bidang-bidang lainnya (Laporan Monografi Fiskal KPP Pratama Surabaya Genteng, 2012:11-13) yang mana memungkinkan responden untuk diteliti pada penelitian ini.

C. Konsep, Variabel, Definisi Operasional, dan Skala Pengukuran

1. Variabel

Agar konsep-konsep dapat diteliti, harus dioperasionalkan dengan mengubah dan menjabarkan menjadi variabel-variabel tertentu. Menurut Sugiyono (2008:38), variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini variabel bebas (Independen) yang diteliti adalah Variabel Persepsi Wajib Pajak (X_1), Kesiapan Teknologi (X_2), Pelayanan, (X_3), dan Model Sosialisasi (X_4). Sedangkan variabel terikat (Dependen) adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

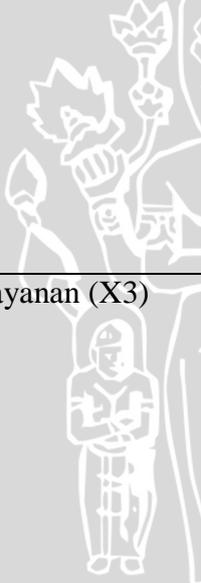
2. Definisi Operasional

Berdasarkan pendapat ahli Naresta, (2004) dalam (Salim, 2011:50) “Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan

kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur kontrak atau variabel”. Berdasarkan Konsep tersebut, maka definisi operasional dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 7 Konsep, Variabel, Indikator

Konsep	Variabel	Indikator
Pemanfaatan Aplikasi e-SPT Masa PPN	Persepsi Wajib Pajak (X_1)	<p>$X_{1,1}$)E-SPT Masa PPN merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan dan kemudahan sistem administrasi KPP kepada Wajib Pajak.</p> <p>$X_{1,2}$)Penerapan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 tentang mewajibkan Wajib Pajak menggunakan Aplikasi e-SPT Masa PPN menurut pendapat wajib pajak.</p> <p>$X_{1,3}$)Kejelasan tentang bahasa peraturan.</p> <p>$X_{1,4}$)Kejelasan wajib pajak dalam memahami isi dan makna dari peraturan tersebut.</p> <p>$X_{1,5}$)Kesesuaian penerapan PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013 dengan tingkat kesiapan teknologi informasi dan kesiapan Sumber Daya Manusia pegawai KPP Pratama Surabaya Genteng.</p> <p>$X_{1,6}$)Penetapan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 tentang mewajibkan Wajib Pajak menggunakan Aplikasi e-SPT Masa PPN memudahkan wajib pajak dalam penggunaan aplikasi e-SPT</p>

		<p>Masa PPN</p> <p>X_{1.7}) Penetapan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 tentang mewajibkan Wajib Pajak menggunakan Aplikasi e-SPT Masa PPN apakah mempersulit wajib pajak dalam pelaporan.</p>
<p>Kesiapan Teknologi (X₂)</p>		<p>X_{2.1}) Penyediaan sarana dan fasilitas software, serta hardware yang baik.</p> <p>X_{2.2}) Kesiapan Pihak KPP dalam menangani kendala-kendala dalam system aplikasi e-SPT Masa PPN.</p> <p>X_{2.3}) Kemampuan pegawai KPP Pratama Surabaya Genteng dalam melakukan sistem pengoperasian aplikasi e-SPT Masa PPN.</p>
<p>Pelayanan (X₃)</p>		<p>X_{3.1}) Jadwal pelayanan yang ada sudah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>X_{3.2}) Jumlah Pegawai dalam melayani wajib pajak sudah sesuai.</p> <p>X_{3.3}) Sikap Pegawai dalam melayani wajib pajak.</p> <p>X_{3.4}) Kemampuan Pegawai dalam penyampaian informasi kepada wajib pajak dapat dipahami dengan mudah oleh wajib pajak.</p> <p>X_{3.5}) Pegawai menguasai pengoperasian media elektronik secara baik.</p> <p>X_{3.6}) Proses pelayanan kepada wajib pajak</p>

	<p>Model Sosialisasi (X4)</p>	<p>X_{4.1})Suasana Sosialisasi X_{4.2})Metode Sosialisasi X_{4.3})Materi yang disampaikan X_{4.4})Waktu penyelenggaraan X_{4.5})Kemampuan pegawai pajak dalam menjawab pertanyaan wajib pajak dapat dipahami dengan mudah oleh wajib pajak</p>
<p>Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<p>Y_{1.1})Kejelasan dan pemahaman wajib pajak atas penerapan pemberlakuan penerapan peraturan tersebut. Y_{1.2})Kemudahan penggunaan aplikasi e-SPT Masa PPN Y_{1.3})Kesigapan pegawai dalam membantu pelaksanaan penerapan peraturan tersebut. Y_{1.4})Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (perhitungan dan pelaporan SPT). Y_{1.5})Pelayanan kurang memuaskan kepada wajib pajak. Y_{1.6})Kurangnya sosialisasi atas pemberlakuan peraturan terbaru. Y_{1.7})Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak. Y_{1.8})Pemberitaan media masa yang menyudutkan Departemen Keuangan khususnya DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Y_{1.9})Kurang tegasnya dasar hukum dan hukuman atas penyelewengan pajak.</p>

Sumber : Lampiran 2

3. Skala Pengukuran

Pengukuran atau *measurement* adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam proses pengumpulan data. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan pengukuran gejala kontinum. “Gejala Kontinum ialah gejala yang berkelanjutan atau merupakan rangkaian kesatuan. Di dalam gejala kontinum terdapat variasi menurut tingkatan, atau kontinuitas kesinambungan dan gradi dari ciri-ciri (Soewadji, 2012 :160-163)”. Ada 3 jenis skala untuk pengukuran gejala kontinum yaitu : a. Skala Ordinal, b. Skala Interval, c. Skala Rasio. Dalam skala pengukuran peneliti menggunakan skala Interval (selang, antara jarak). Skala Interval ditentukan angka skala yang mempunyai jarak sama antar titik-titik yang berdekatan, sehingga dalam skala ini di dapat gambaran keadaan gejala kontinum yang lebih teliti. Tingkat pengukuran interval digunakan untuk mengurutkan orang atau suatu obyek dengan orang atau obyek lainnya (Soewadji, 2012:163). Sesuai dengan pemilihan Skala Interval sebagai skala pengukuran, maka metode atau teknik skala pengukuran data yang digunakan oleh peneliti adalah Skala Likert, dimana menurut (Sugiyono, 2008 dalam Soewadji, 2012:163-164) skala likert digunakan sebagai alat pengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Ketika melakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang akan diuji, pada setiap jawaban akan diberikan skor. Skala Likert menggunakan lima tingkatan jawaban yang dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 8 Skala Pengukuran variabel penelitian

No	Pertanyaan	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-Ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Likert dalam Soewadji, 2012:163-164

Catatan : Untuk jawaban negatif atau tidak puas Likert member skor dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Adapun keuntungan yang akan peneliti dalam pemilihan Skala Likert adalah (Sugiyono, 2008 dalam Soewadji, 2012:163-164) :

1. Memiliki banyak kemudahan : antara lain mudah membuat skor, mudah dalam menyusun pertanyaan tentang sifat/sikap, mudah diinterpretasikan.
2. Mempunyai reabilitas tinggi dalam mengurutkan manusia berdasarkan intensitas sikap tertentu.
3. Luwes dan fleksibel peneliti bebas menetapkan jumlah pertanyaan, demikian juga jumlah alternatif jawabannya.
4. Sering digunakan dalam penelitian social.
5. Biasanya digunakan untuk pengukuran ordinal

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

“Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan-hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai *test* atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian” (Nawawi, 1991:14 dikutip dalam Jusuf Soewadji, 2012:129). Menurut Bungin (2008:99) dalam (Soewadji, 2012:130) :

Populasi merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga obyek-obyek ini dapat menjadi sumber data penelitian.

Berdasarkan pernyataan di atas populasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sejumlah 3.565 Wajib Pajak, Jumlah tersebut berdasarkan dari jumlah total Wajib Pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan *e-SPT* antara bulan Januari-Juni 2013 pada KPP Pratama Surabaya Genteng.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008:81) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu. Kesimpulannya, “sampel adalah biasanya diambil dengan beberapa cara sesuai dengan teori yang sudah ada sehingga sampel yang digunakan penelitian tersebut dapat mewakili keseluruhan dari populasi. Pedoman dalam menentukan jumlah sampel yang digunakan oleh peneliti adalah Rumus Slovin. Berikut adalah penjelasan dari rumus slovin dalam penentuan jumlah sampel yang digunakan oleh peneliti :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan : N = Populasi
n = Sampel

Berdasarkan rumus di atas peneliti akan meneliti tentang pengaruh aplikasi *e-SPT* Masa PPN terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng) dimana, peneliti mengambil jumlah populasi dari seluruh wajib pajak terdaftar antara januari sampai dengan juni 2013 sejumlah 3565 Orang Wajib Pajak. Dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Jadi Jumlah sampel minimal yang harus digunakan oleh peneliti adalah :

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1+Ne^2} \\ &= \frac{3.565}{1+ 3.565 (0,1)^2} \\ &= 97,27 = 97 \end{aligned}$$

Jadi, n (minimal)/sampel yang harus digunakan oleh peneliti adalah 97 orang responden, dimana teknik yang digunakan dalam penyebaran kuesioner adalah *Acidental Sampling* dimana responden yang diambil oleh peneliti adalah responden yang melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan *e-SPT*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data

a. Data Intern

Data yang diperoleh/dikumpulkan dalam lingkungan lembaga, badan, instansi, di lingkungan pengumpul sendiri. Maksudnya data yang

diperoleh/dikumpulkan berdasarkan pada yang ada di KPP Surabaya Genteng.

b. Data ekstern

Data ekstern adalah data yang dikumpulkan dari sumber lain di luar lembaga dimana si pengumpul data berada.

2. Menurut dari siapa data diperoleh

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari obyek yang diteliti (Soewadji, 2012:147). Data ini diperoleh dari hasil jawaban kuesioner para responden yang menjadi sampel pada penelitian ini. Adapun kuesioner sibebarkan pada Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan yang melaporkan SPT Masa PPN.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi (Soewadji, 2012:147). Data sekunder penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi, Peraturan Perundang-undangan, serta data pelaporan Wajib Pajak yang melaporkan SPT manual dan Elektronik diterapkannya PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013 yang diperoleh dari KPP Surabaya Genteng.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan di dalam proses pengumpulan data agar kegiatan tersebut sistematis dan terstruktur

(Fransiska, 2012:69). Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Teknik Angket (*Questionare*)

Teknik pengumpulan data dengan metode Teknik Angket adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan angket atau kuesioner. Daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur ditujukan kepada responden untuk di isi berkenaan dengan informasi yang dibutuhkan, yang nantinya digunakan sebagai data.

2. Dokumenter (*Secondary sources*)

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, rapat, agenda, dll (Soewadji, 2012:160). Berdasarkan pengertian tersebut peneliti menggunakan instrument penelitian documenter berupa : Buku-buku, jurnal, skripsi, data dari KPP Pratama Surabaya Genteng, dan Peraturan perundang-undangan.

F. Validitas dan Reliabilitas

Instrumen pengumpulan data yang baik adalah harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu *valid* dan *reliable*. Adapun penjelasan dari persyaratan instrument pengumpulan data akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Validitas adalah persoalan yang berhubungan pertanyaan sejauh mana suatu alat ukur telah mengukur apa yang seharusnya diukur (Soewadji, 2012:173). Sedangkan menurut Simamora (2004:172), validitas

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrument. Suatu Instrumen dikatakan valid apabila instrument tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan dan mampu mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2010:211). Hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2011:121). Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus korelasi *product moment* dengan angka kasar, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Keterangan :

- r_{xy} = Koefisien korelasi variabel bebas dan variabel terikat
- n = Banyaknya sampel
- X = Item/pertanyaan
- Y = Total Variabel
- ΣY = Jumlah skor dalam variabel Y
- ΣY^2 = Jumlah kuadrat masing-masing skor Y
- ΣX^2 = Jumlah kuadrat masing-masing skor X
- ΣXY = Jumlah perkiraan variabel X

Valid tidaknya suatu item instrument dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi *Product Moment Person* dengan level 5%. Apabila probabilitas hasil korelasi lebih besar dari 0,05 (5%), maka instrument dinyatakan tidak valid. Pengujian validitas instrument dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara skor jawaban instrument dengan skor total instrument, dikatakan valid apabila nilai koefisien antar item dengan total item mempunyai taraf signifikan di

bawah atau sama dengan 5%. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut :

- a. Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pertanyaan valid.
- b. Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tidak valid.

2. Uji Realibilitas

Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya terhadap butir-butir pertanyaan yang dinyatakan valid uji keandalannya, bersifat tetap, stabil dan konsisten. Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran artinya pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama akan memberikan hasil yang sama dengan beberapa kali pengukuran selama aspek yang diukur tidak berubah (Kuncoro, 2003:154). Realibilitas atau tingkat ketepatan atau *consistency* adalah tingkat kemampuan suatu alat atau instrument penelitian dalam mengumpulkan data atau informasi secara tetap atau konsisten dari individu (Soewadji, 2012:184).

Pengujian reliabilitas yang digunakan peneliti adalah menggunakan reliabilitas instrument Konsistensi Gabungan dengan teknik koefisien *cronbach alpha* (α) dengan bantuan SPSS. *Cronbach Alpha* adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain (Sekaran, 2006) dalam (Nazir, 2009:225). Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,6$ atau sama dengan 0,6. Pengujian

reliabilitas instrument Konsistensi Gabungan dilakukan dengan menguji skor antar item dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* (Arikunto, 2010:239) sebagai berikut :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

- r_{11} = Koefisien reliabilitas instrumen yang dicari
 k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
 $\sum \sigma_b^2$ = Jumlah variansi skor butir soal ke-i
 i = 1, 2, 3, 4, ..., n
 σ_t^2 = Variansi total

3. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

a. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Persepsi Wajib Pajak (X_1)

Berdasarkan atas pengujian Validitas yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa item dalam Variabel Persepsi Wajib Pajak (X_1) dinyatakan valid, hal ini dikarenakan probabilitas lebih kecil dari 0,05 (Lebih tepatnya kurang dari 0,01). Sedangkan hasil pengujian Realibilitas memiliki koefisien Korelasi (*Alpha Cronbach*) sebesar 0,644. Hasil Reabilitas tersebut dinyatakan reliabel karena berdasarkan kriteria indeks koefisien reabilitas, variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,6 atau sama dengan 0,6. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas untuk variabel Persepsi Wajib Pajak (X_1) disajikan secara lengkap pada Tabel 9.

Tabel 9 Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Persepsi Wajib Pajak (X_1)

No	Item	Koefisien Korelasi	Probabilitas	Keterangan
1	$X_{1.1}$	0,672	0,000	Valid
2	$X_{1.2}$	0,524	0,003	Valid
3	$X_{1.3}$	0,583	0,001	Valid
4	$X_{1.4}$	0,493	0,006	Valid
5	$X_{1.5}$	0,474	0,008	Valid
6	$X_{1.6}$	0,648	0,000	Valid
7	$X_{1.7}$	0,662	0,000	Valid
Koefisien Korelasi (Alpha Cronbach) = 0,644				Reliabel

Sumber : Lampiran 3

Keterangan :

- $X_{1.1}$ = *e-SPT* Masa PPN bentuk peningkatan pelayanan dan Kemudahan sistem administrasi
- $X_{1.2}$ = Penerapan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 tentang mewajibkan wajib pajak dalam penggunaan *e-SPT*
- $X_{1.3}$ = Bahasa yang terdapat PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 tentang mewajibkan wajib pajak dalam penggunaan *e-SPT*
- $X_{1.4}$ = Wajib pajak dalam memahami isi dan makna dari peraturan tersebut
- $X_{1.5}$ = Kesesuaian penerapan PER-10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 dengan tingkat kesiapan teknologi informasi dan kesiapan Sumber Daya Manusia
- $X_{1.6}$ = Aplikasi *e-SPT* Masa PPN memudahkan wajib pajak dalam penggunaan
- $X_{1.7}$ = Tata cara pelaporan sesuai Penetapan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013

b. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Kesiapan Teknologi (X_2)

Berdasarkan atas pengujian Validitas yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa item dalam variabel Kesiapan Teknologi (X_2) dinyatakan valid, hal ini dikarenakan probabilitas lebih kecil dari 0,05 (Lebih tepatnya kurang dari 0,01). Sedangkan hasil pengujian Realibilitas memiliki koefisien Korelasi (*Alpha Cronbach*) sebesar 0,608. Hasil Reabilitas tersebut dinyatakan reliabel karena berdasarkan kriteria indeks koefisien reabilitas, variabel dapat

dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,6 atau sama dengan 0,6. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas untuk variabel Kesiapan Teknologi (X_2) disajikan secara lengkap pada tabel 10.

Tabel 10 Uji Validitas dan Reabilitas variabel Kesiapan Teknologi (X_2)

No	Item	Koefisien Korelasi	Probabilitas	Keterangan
1	$X_{2,1}$	0,795	0,000	Valid
2	$X_{2,2}$	0,729	0,000	Valid
3	$X_{2,3}$	0,760	0,000	Valid
Koefisien Korelasi (Alpha Cronbach) = 0,608				Reliabel

Sumber : Lampiran 3

Keterangan :

$X_{2,1}$ = Tersedianya sarana dan fasilitas *software*

$X_{2,2}$ = Kendala dalam *system* aplikasi *e-SPT* Masa PPN.

$X_{2,3}$ = Kemampuan pegawai

c. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Pelayanan (X_3)

Berdasarkan atas pengujian Validitas yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa item dalam variabel Pelayanan (X_2) dinyatakan valid, hal ini dikarenakan probabilitas lebih kecil dari 0,05 (Lebih tepatnya kurang dari 0,01). Sedangkan hasil pengujian Realibilitas memiliki koefisien Korelasi (*Alpha Cronbach*) sebesar 0,601. Hasil Reabilitas tersebut dinyatakan reliabel karena berdasarkan kriteria indeks koefisien reabilitas, variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,6 atau sama dengan 0,6. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas untuk variabel Pelayanan (X_3) disajikan secara lengkap pada tabel 11.

Tabel 11 Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Pelayanan (X_3)

No	Item	Koefisien Korelasi	Probabilitas	Keterangan
1	$X_{3,1}$	0,565	0,001	Valid
2	$X_{3,2}$	0,589	0,001	Valid
3	$X_{3,3}$	0,533	0,002	Valid
4	$X_{3,4}$	0,522	0,003	Valid
5	$X_{3,5}$	0,585	0,001	Valid
6	$X_{3,6}$	0,607	0,000	Valid
Koefisien Korelasi (Alpha Cronbach) = 0,601				Reliabel

Sumber : Lampiran 3

Keterangan :

$X_{3,1}$ = Jadwal Pelayanan

$X_{3,2}$ = Jumlah Pegawai

$X_{3,3}$ = Sikap Pegawai

$X_{3,4}$ = Kemampuan Pegawai

$X_{3,5}$ = Penguasaan Pegawai dalam media elektronik

$X_{3,6}$ = Proses Pelayanan

d. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Model Sosialisasi (X_4)

Berdasarkan atas pengujian Validitas yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa item dalam Variabel Model Sosialisasi (X_4) dinyatakan valid, hal ini dikarenakan probabilitas lebih kecil dari 0,05. Sedangkan hasil pengujian Realibilitas memiliki koefisien Korelasi (alpha cronbach) sebesar 0,609. Hasil Reabilitas tersebut dinyatakan reliabel karena berdasarkan kriteria indeks koefisien reabilitas, variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,6 atau sama dengan 0,6. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas untuk Variabel Model Sosialisasi (X_4) disajikan secara lengkap pada tabel 12.

Tabel 12 Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Model Sosialisasi (X₄)

No	Item	Koefisien Korelasi	Probabilitas	Keterangan
1	X _{4.1}	0,776	0,000	Valid
2	X _{4.2}	0,526	0,003	Valid
3	X _{4.3}	0,613	0,000	Valid
4	X _{4.4}	0,483	0,007	Valid
5	X _{4.5}	0,730	0,000	Valid
Koefisien Korelasi (Alpha Cronbach) = 0,609				Reliabel

Sumber : Lampiran 3

Keterangan :

X_{4.1} = Suasana Sosialisasi

X_{4.2} = Metode Sosialisasi

X_{4.3} = Materi yang Disampaikan Sosialisasi

X_{4.4} = Waktu penyelenggaraan sosialisasi

X_{4.5} = Kemampuan pegawai pajak

e. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan atas pengujian Validitas yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa item dalam Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid, hal ini dikarenakan probabilitas lebih kecil dari 0,05. Sedangkan hasil pengujian Realibilitas memiliki koefisien Korelasi (*Alpha Cronbach*) sebesar 0,746. Hasil Reabilitas tersebut dinyatakan reliabel karena berdasarkan kriteria indeks koefisien reabilitas, variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,6 atau sama dengan 0,6. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas untuk Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X₄) disajikan secara lengkap pada tabel 13.

Tabel 13 Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Item	Koefisien Korelasi	Probabilitas	Keterangan
1	X _{1.1}	0,546	0,002	Valid
2	X _{1.2}	0,563	0,001	Valid
3	X _{1.3}	0,516	0,004	Valid
4	X _{1.4}	0,614	0,000	Valid
5	X _{1.5}	0,531	0,003	Valid
6	X _{1.6}	0,520	0,003	Valid
7	X _{1.7}	0,644	0,000	Valid
8	X _{1.8}	0,505	0,004	Valid
9	X _{1.9}	0,494	0,006	Valid
Koefisien Korelasi (Alpha Cronbach) = 0,746				Reliabel

Sumber : Lampiran 3

Keterangan :

- Y_{1.1} = Kejelasan dan pemahaman wajib pajak atas penerapan Peraturan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013
- Y_{1.2} = Kemudahan penggunaan aplikasi e-SPT Masa PPN
- Y_{1.3} = Kesigapan pegawai dalam pelaksanaan Peraturan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013
- Y_{1.4} = Pelaksanaan kewajiban Perpajakan (perhitungan dan Pelaporan SPT)
- Y_{1.5} = Pelayanan kepada wajib pajak
- Y_{1.6} = Sosialisasi
- Y_{1.7} = Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak.
- Y_{1.8} = Pemberitaan media masa
- Y_{1.9} = Ketegasan dasar hukum dan hukuman atas tindak pidana pajak.

G. Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah analisis data, tahap dimana merupakan suatu tahap penelitian inti dan bersifat kritis. Setelah melakukan pengumpulan, pengklasifikasian, dan pengelompokan data, maka tahap selanjutnya yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah merangkum data agar lebih komunikatif dan informatif. Tahap analisis memudahkan dalam menginterpretasikan sebagai dasar dalam penyusunan hasil penelitian. Analisis data dalam

penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Salah satu pokok statistik yaitu menyederhanakan data informasi supaya lebih sederhana dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Adapun analisis data statistik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikolieritas

Multikolieritas terjadi apabila koefisien antar variabel bebas (X_1 dan X_2 , X_2 dan X_3 , X_3 dan X_4 , dsb) lebih besar dari 0,60 (Pendapat lain : 0,5 dan 0,9). Sedangkan jika multikolieritas koefisien antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r \leq 0,60$). Cara lain dalam penentuan ada atau tidak adanya multikolieritas sebagai berikut (Sunyoto, 2010:99):

- (1) Nilai *tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan dalam statistik (α).
- (2) Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

Nilai *tolerance* (α) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dapat dicari dengan menggabungkan kedua nilai tersebut adalah(Sunyoto, 2010:100):

- Besar nilai *tolerance* (α) :

$$\alpha = 1/VIF$$

- Besar nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) :

$$VIF = 1/\alpha$$

b) Uji Heteroskedastisitas

Persamaan regresi linier berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama disebut Homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama / berbeda disebut Heteroskedastisitas. “Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui grafik *scatterplot* antara *Z Prediction* (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (Sumbu Y = Y prediksi – Y riil)(Sunyoto,2010:101)”. “Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar, maupun bergelombang-gelombang (Sunyoto, 2010:102)”.

c) Uji Normalitas

“Uji Normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan” (Sunyoto, 2010:103). “Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) berdistribusi mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik” (Sunyoto, 2010:109). Berdasarkan pernyataan diatas maka pengambilan keputusan

normalitas data pada analisis regresi adalah ketika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka kesimpulannya model regresi tersebut memenuhi normalitas, sedangkan ketika data tersebut menyebar lebih jauh dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka kesimpulannya model regresi dalam penelitian tersebut tidak memenuhi uji normalitas.

3. Analisis Linier Berganda

“Analisis linier berganda (*multiple regression*) adalah suatu perluasan dari teknik regresi apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas untuk mengadakan prediksi terhadap variabel terikat (Arikunto, 2006:295)”. Jika parameter dari suatu hubungan fungsional antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel yang diestimasikan, maka analisis yang dikerjakan berkenaan dengan regresi berganda (*multiple regression*). Analisis regresi berganda mempunyai kaedah yang sama seperti analisis regresi sederhana (Nazir, 2009:463). Jika hubungan antara satu variabel dependen dengan dua variabel independen berbentuk:

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4X_4$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
X1	= Variabel Persepsi Wajib Pajak
X2	= Variabel Kesiapan Teknologi
X3	= Variabel Pelayanan
X4	= Variabel Model Sosialisasi
a ₀	= Konstanta
a ₁ , a ₂ , a ₃ , a ₄	= Koefisien masing-masing faktor
e	= Kesalahan

Koefisien regresi dapat dicari dengan mudah, berikut rumus yang digunakan dalam menemukan koefisien regresi :

$$a_0 = \frac{\sum Y - a_1 \sum X_1 - a_2 \sum X_2 - a_3 \sum X_3 - a_4 \sum X_4}{n}$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang diperoleh, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian untuk mengetahui apakah koefisien regresi yang diperoleh mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terpengaruh, baik secara simultan atau parsial dan mengetahui pula seberapa besar pengaruhnya. Pelaksanaan pengolahan data dengan analisis regresi berganda perlu dilakukan beberapa pengujian antara lain :

a) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Adapun rumus koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{a_1 \sum x_1 y + a_2 \sum x_2 y + a_3 \sum x_3 y + a_4 \sum x_4 y}{\sum y^2}$$

Berdasarkan hal tersebut ditunjukkan bahwa nilai Koefisien R^2 antara 0 (nol) sampai dengan 1. Koefisien 0 (nol) berarti variabel bebas (Persepsi Wajib Pajak, Kesiapan Teknologi, Pelayanan, dan Model Sosialisasi) sama sekali tidak berhubungan atau mempengaruhi variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak) apabila koefisien determinasi mendekati 1 maka semakin berhubungan.

b) Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji adanya perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diidentifikasi karena adanya Persepsi Wajib Pajak, Kesiapan Teknologi, Pelayanan, dan Model Sosialisasi. Hipotesis yang telah dirumuskan oleh peneliti akan diuji sebagai berikut :

(1) Uji Simultan : Uji F test atau Uji Anova (*Analysis of variance*) digunakan untuk melakukan pengujian tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4) secara keseluruhan terhadap variabel terikat (Y). Adapun tahapan dalam melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji F adalah :

(a) Merumuskan Hipotesis

Dalam merumuskan hipotesis dengan menggunakan uji F memiliki kriteria sebagai berikut ;

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, maka variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

$H_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4$, maka variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, paling tidak salah satu dari variabel bebas tersebut.

(b) Menentukan Tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang diharapkan yaitu $\alpha = 10\%$ atau *confidence interval* sebesar 90% dan *degree of freedom*

(K-1) dan (n-K) dimana n adalah jumlah observasi dan K adalah variabel *regresor*.

(c) Menghitung nilai F_{hitung}

Rumus untuk mencari nilai F_{hitung} adalah :

$$F = \frac{MSR}{MSE}$$

Keterangan :

MSR = *Mean Square Regression*

MSE = *Mean Regression Residual*

(d) Membandingkan nilai probabilitas F_{hitung} dengan α untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika Probabilitas $F_{hitung} \leq \alpha$ maka H_0 ditolak.

Jika Probabilitas $F_{hitung} > \alpha$ maka H_0 diterima.

(e) Membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} melalui ketentuan sebagai berikut :

Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

(2) Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial variabel-variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4) secara keseluruhan terhadap variabel terikat (Y). Adapun tahapan dalam melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t adalah :

(a) Merumuskan Hipotesis

$H_0 : \beta_i = 0$, maka variabel-variabel bebas (X_i) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y).

$H_1 : \beta_i \neq 0$, maka variabel-variabel bebas (X_i) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y).

(b) Menentukan Tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi masing-masing = 0,00. Karena *probability* masing-masing variabel = 0,00 jauh lebih kecil dari nilai $P = 0,1$.

(c) Merumuskan t_{hitung}

Menurut Supranto (2010:63), pengujian yang dilakukan untuk menentukan T_{hitung} dengan rumus adalah

$$T_{hitung} = \frac{b}{Sb}$$

Keterangan :

b = Koefisien regresi

Sb = Simpangan Baku koefisien regresi

(d) Membandingkan probabilitas t_{hitung} dengan nilai α

Hipotesis nol probabilitas nol maka akan diterima atau ditolak dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika probabilitas $t_{hitung} \leq \alpha$ berarti H_0 ditolak

Jika probabilitas $t_{hitung} > \alpha$ berarti H_0 diterima

Jadi, ketika H_0 ditolak berarti dengan tingkat kepercayaan 90% ($\alpha = 10\%$) variabel yang diuji terhadap variabel dependen.

- (e) Membandingkan probabilitas t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} dengan persyaratan sebagai berikut :

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng yang beralamat di Jalan Kayoon No 48, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Letak KPP Pratama ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Semampir di sebelah utara, Kecamatan Simokerto di sebelah timur, Kecamatan Gubeng serta Kecamatan Tegalsari di sebelah selatan, dan Kecamatan Bubutan serta Kecamatan Sawahan di sebelah barat. Berdasarkan Letak KPP Pratama Surabaya Genteng tersebut, maka KPP Pratama ini merupakan salah satu wilayah sangat strategis di pusat kota sehingga banyak kegiatan usaha yang ada disini.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng sebelum berdiri merupakan bagian dari tiga wilayah Kantor Pelayanan Pajak :

- a. Kecamatan Bubutan wilayah kerja dari KPP Surabaya Utara
- b. Kecamatan Simokerto wilayah kerja dari KPP Surabaya Timur
- c. Kecamatan Genteng wilayah kerja dari KPP Surabaya Selatan

Sejalan dengan tingkat perkembangan perekonomian yang cukup tinggi di sektor perdagangan, industri dan jasa di Kota Surabaya, maka untuk lebih meningkatkan efektifitas penerimaan dan pengawasan di bidang perpajakan

dipandang perlu untuk membentuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng dengan wilayah kerja seperti tersebut di atas. Dasar Hukumnya adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994.

Untuk meningkatkan efektifitas kinerja dan pemenuhan target penerimaan pajak nasional tahun 2001 Direktorat Jenderal Pajak mengadakan reorganisasi di lingkungannya, salah satunya dengan pemecahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak termasuk juga wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng yang dibagi menjadi dua yaitu wilayah kerja KPP Surabaya Genteng dan wilayah kerja KPP Surabaya Simokerto. Sehingga ada perubahan wilayah kerja KPP Surabaya Genteng sebagai berikut :

a. Kecamatan Bubutan

- Kelurahan Bubutan
- Kelurahan Tembok Dukuh
- Kelurahan Jepara
- Kelurahan Alun-alun Contong
- Kelurahan Gundih

b. Kecamatan Genteng

- Kelurahan Genteng
- Kelurahan Embong Kaliasin
- Kelurahan Kapasari

Dasar Hukum Pemecahan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 yang ditetapkan tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Untuk lebih meningkatkan penerimaan dan kinerja serta mewujudkan pelayanan prima kepada wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak mengadakan reorganisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ./2007 yang ditetapkan pada tanggal 5 November 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, II, dan III. Berdasarkan peraturan tersebut, pada tanggal 13 November 2007 ditetapkan sebagai tanggal pelaksanaan operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, dengan wilayah kerja Kecamatan Genteng meliputi lima kelurahan yaitu:

- Kelurahan Embong Kaliasin
- Kelurahan Ketabang
- Kelurahan Genteng
- Kelurahan Peneleh
- Kelurahan Kapasari

Waktu Pelayanan KPP Pratama Surabaya Genteng adalah senin s/d jumat mulai pukul 08.00 s/d 16.00, hari besar dan hari libur nasional tutup. Selain melakukan penelitian di KPP Pratama Surabaya Genteng, penelitian ini juga melakukan penelitian langsung kepada wajib pajak yang berada di kecamatan genteng. Hal ini dikarenakan saat melakukan penelitian penyebaran kuesioner di KPP Pratama Surabaya Genteng peneliti kurang mendapatkan jumlah kuesioner yang dibutuhkan dalam penelitian dan pada waktu penyebaran kuesioner tidak banyak wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN.

2. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan e-SPT. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 97 Wajib Pajak melalui teknik pengumpulan data penyebaran kuesioner. Karakteristik responden disusun berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis wajib pajak, dan kelurahan tempat usaha responden. Adapun gambaran umum responden dalam penelitian ini adalah :

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden menurut usia berdasarkan penyebaran kuesioner pada wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan *e-SPT*. Hasil distribusi responden berdasarkan usia ini berasal dari data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner. Berdasarkan 97 jumlah kuesioner yang disebar, menunjukkan bahwa responden mengenai usia responden saat ini. Penyajian data hasil jawaban responden tersebut dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Wajib Pajak

No	Usia (tahun)	Jumlah (Wajib Pajak)	Persentase (%)
1	21-28	41	42,27
2	29-36	26	26,80
3	37-44	13	13,40
4	45-52	8	8,25
5	diatas 53	4	4,12
6	TAI*	5	5,16
Jumlah		97	100

Keterangan : TAI* = Tidak Ada Informasi

Berdasarkan data tabel 14 tentang distribusi responden berdasarkan usia wajib pajak, maka dapat dilihat bahwa yang menempati posisi pertama atau sebagian besar responden yang melaporkan SPT Masa PPN menggunakan *e-SPT* berusia 21-28 tahun sejumlah 41 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 42,27%, posisi kedua responden yang berusia 29-36 tahun sejumlah 26 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 26,80%, posisi ketiga responden yang berusia 37-44 tahun sejumlah 13 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 13,40%, posisi keempat responden yang berusia 45-52 tahun sejumlah 8 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 8,25%, posisi kelima responden yang berusia diatas 53 tahun sejumlah 4 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 4,12%, dan pada terakhir responden yang tidak mencantumkan informasi usianya sejumlah 5 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 5,15%.

b. Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin berdasarkan penyebaran kuesioner pada wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN

dengan menggunakan *e-SPT*. Hasil distribusi responden berdasarkan jenis kelamin ini berasal dari data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner. Berdasarkan 97 jumlah kuesioner yang disebar, menunjukkan bahwa responden mengenai jenis kelamin responden saat ini. Penyajian data hasil jawaban responden tersebut dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Wajib Pajak

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	55	56,70
2	Perempuan	37	38,14
3	TAI*	5	5,16
Jumlah		97	100

Keterangan : TAI* = Tidak Ada Informasi

Berdasarkan data tabel 15 tentang distribusi responden berdasarkan jenis kelamin wajib pajak, maka dapat dilihat bahwa yang menempati posisi pertama atau sebagian besar responden yang melaporkan SPT Masa PPN menggunakan *e-SPT* berjenis kelamin laki-laki sejumlah 55 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 56,70%, posisi kedua responden yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 37 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 38,14%, dan pada posisi terakhir responden yang tidak mencantumkan informasi jenis kelamin sejumlah 5 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 5,16%.

c. Karakteristik Responden berdasarkan jenis wajib pajak

Karakteristik responden menurut usia berdasarkan penyebaran kuesioner pada wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan *e-SPT*. Hasil distribusi responden berdasarkan jenis wajib

pajak ini berasal dari data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner. Berdasarkan 97 jumlah kuesioner yang disebar, menunjukkan bahwa responden mengenai jenis wajib pajak responden saat ini. Penyajian data hasil jawaban responden tersebut dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

No	Jenis Wajib Pajak	Jumlah (Wajib Pajak)	Persentase (%)
1	Orang Pribadi	51	52,58
2	Badan	41	42,27
3	TAI*	5	5,15
	Jumlah	97	100

TAI* = Tidak Ada Informasi

Berdasarkan data Tabel 16 tentang distribusi responden berdasarkan jenis wajib pajak, maka dapat dilihat bahwa yang menempati posisi pertama atau sebagian besar responden yang melaporkan SPT Masa PPN menggunakan *e-SPT* berjenis wajib pajak orang pribadi sejumlah 51 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 52,58%, posisi kedua ditempati oleh jenis wajib pajak badan sejumlah 41 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 42,27%, dan pada posisi terakhir responden yang tidak mencantumkan informasi jenis wajib pajak sejumlah 5 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 5,15%.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelurahan Tempat Usaha

Responden

Karakteristik responden menurut Kelurahan Tempat Usaha Responden berdasarkan penyebaran kuesioner pada wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan *e-SPT*. Hasil distribusi

responden berdasarkan kelurahan tempat usaha ini berasal dari data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner. Berdasarkan 97 jumlah kuesioner yang disebar, menunjukkan bahwa responden mengenai jenis kelamin responden saat ini. Penyajian data hasil jawaban responden tersebut dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17 Distribusi Responden Berdasarkan Kelurahan Tempat Usaha Wajib Pajak

No	Kelurahan Tempat Usaha Wajib Pajak	Jumlah (Wajib Pajak)	Persentase (%)
1	Kelurahan Embong Kaliasin	37	38,14
2	Kelurahan Ketabang	29	29,90
3	Kelurahan Genteng	17	17,53
4	Kelurahan Peneleh	8	8,25
5	Kelurahan Kapasari	4	4,12
6	TAI*	2	2,06
Jumlah		97	100

TAI* = Tidak Ada Informasi

Berdasarkan data Tabel 17 tentang distribusi responden berdasarkan kelurahan tempat usaha wajib pajak, maka dapat dilihat bahwa yang menempati posisi pertama atau sebagian besar responden yang melaporkan SPT Masa PPN menggunakan *e-SPT* di kelurahan embong kaliasin sejumlah 37 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 38,14%, posisi kedua ditempati oleh kelurahan Ketabang sejumlah 29 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 29,90%, posisi ketiga ditempati oleh kelurahan Genteng sejumlah 17 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 17,53%, posisi keempat ditempati oleh kelurahan peneleh sejumlah 8 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 8,25%, posisi kelima ditempati oleh kelurahan kapasari sejumlah 4 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 4,12%, dan pada posisi

terakhir responden yang tidak mencantumkan informasi kelurahan tempat usaha sejumlah 2 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 2,06%.

3. Gambaran Variabel-Variabel yang Diteliti

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan distribusi frekuensi jawaban responden (wajib pajak) dari hasil penyebaran kuesioner pada 97 wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan *e-SPT*. Jawaban dari 97 responden tersebut dapat dideskripsikan pada hasil distribusi frekuensi yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Variabel Persepsi Wajib Pajak (X_1)

Terdapat tujuh item pertanyaan dalam variabel Persepsi Wajib Pajak yang telah diajukan kepada 97 responden (wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan *e-SPT* dimana teknik yang digunakan ialah kuesioner). Berdasarkan jumlah kuesioner yang telah disebar menunjukkan jawaban mengenai indikator-indikator yang mewakili Variabel Persepsi Wajib Pajak (X_1). Berikut penyajian data hasil jawaban responden berdasarkan Variabel Persepsi Wajib Pajak (X_1) dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18 Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Wajib Pajak (X_1)

Indikator	Alternatif Jawaban										Mean
	5		4		3		2		1		
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
$X_{1,1}$	55	56,70	31	31,96	8	8,25	2	2,06	1	1,03	4,41
$X_{1,2}$	35	36,08	48	49,49	11	11,34	1	1,03	2	2,06	4,16
$X_{1,3}$	13	13,40	45	46,39	31	31,96	8	8,25	0	0	3,65
$X_{1,4}$	13	13,40	46	47,42	32	32,99	5	5,16	1	1,03	3,67
$X_{1,5}$	21	21,65	33	34,02	33	34,02	9	9,28	1	1,03	3,66
$X_{1,6}$	22	22,68	35	36,09	23	23,71	14	14,43	3	3,09	3,61
$X_{1,7}$	23	23,71	31	31,96	27	27,83	9	9,28	7	7,22	3,56
<i>Grand mean</i>											3,8

Sumber : Lampiran 2 dan Lampiran 5

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Ragu-Ragu

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan Tabel 18 untuk indikator $X_{1,1}$ yaitu *e-SPT* Masa PPN merupakan bentuk peningkatan pelayanan dan kemudahan sistem administrasi dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab sangat setuju sebesar 55 orang dengan tingkat persentase 56,70%. Responden yang menjawab setuju sebesar 31 orang dengan tingkat persentase 31,96%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 8 orang dengan tingkat persentase 8,25%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 2 orang dengan tingkat persentase 2,06%. Posisi terakhir ialah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 1 orang dengan tingkat persentase 1,03%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{1,1}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 4,41. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak sangat setuju bahwa *e-SPT* Masa PPN merupakan salah satu bentuk

peningkatan pelayanan dan kemudahan sistem administrasi KPP kepada wajib pajak.

Indikator $X_{1,2}$ yaitu penerapan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 48 orang dengan tingkat persentase 49,49%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 35 orang dengan tingkat persentase 36,08%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 11 orang dengan tingkat persentase 11,34%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 1 orang dengan tingkat persentase 1,03%. Posisi terakhir ialah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 2 orang dengan tingkat persentase 2,06%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{1,2}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 4,16. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak setuju bahwa penerapan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 tentang mewajibkan wajib pajak menggunakan aplikasi *e-SPT* Masa PPN.

Indikator $X_{1,3}$ yaitu Bahasa digunakan dalam PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 45 orang dengan tingkat persentase 46,39%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 31 orang dengan tingkat persentase 31,96%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 13 orang dengan tingkat persentase 13,40%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab tidak setuju sebesar 8 orang dengan tingkat persentase 8,25%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{1,3}$

maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,65. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak setuju bahwa bahasa yang terdapat dalam PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 tentang mewajibkan wajib pajak menggunakan *e-SPT* Masa PPN susah dimengerti oleh wajib pajak.

Indikator $X_{1,4}$ yaitu pemahaman wajib pajak tentang PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 46 orang dengan tingkat persentase 47,42%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 32 orang dengan tingkat persentase 32,99%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 13 orang dengan tingkat persentase 13,40%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 5 orang dengan tingkat persentase 5,16%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang dengan tingkat persentase 1,03%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{1,4}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,67. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak setuju bahwa wajib pajak kurang memahami isi dan makna dari PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 tentang mewajibkan wajib pajak menggunakan *e-SPT* Masa PPN karena banyak kalimat yang bersifat ambigu.

Indikator $X_{1,5}$ yaitu penerapan PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013 dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa ada dua jawaban terbesar yaitu responden menjawab setuju sebesar 33 orang dengan

tingkat persentase 34,02% dan responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 33 orang dengan tingkat persentase 34,02%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 21 dengan tingkat persentase 21,65%. Responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 9 orang dengan tingkat persentase 9,28%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang dengan tingkat persentase 1,03%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{1.5}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,66. Hal ini menunjukkan ada 2 jawaban wajib pajak yang terbesar tentang terdapat ketidaksesuaian penerapan PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013 dengan tingkat kesiapan teknologi informasi dan kesiapan Sumber Daya Manusia pegawai KPP Pratama Surabaya Genteng yaitu setuju dan ragu-ragu.

Indikator $X_{1.6}$ yaitu kemudahan wajib pajak dalam penggunaan aplikasi *e-SPT* dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 35 orang dengan tingkat persentase 36,09%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 23 orang dengan tingkat persentase 23,71%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 22 orang dengan tingkat persentase 22,68%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 14 orang dengan tingkat persentase 14,43%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 orang dengan tingkat persentase 3,09%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{1.6}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,61. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar

responden setuju atas penetapan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 tentang mewajibkan Wajib Pajak menggunakan Aplikasi e-SPT Masa PPN yang bermaksud memudahkan wajib pajak dalam penggunaan aplikasi *e-SPT* Masa PPN.

Indikator $X_{1.7}$ yaitu Aplikasi e-SPT Masa PPN apakah mempermudah wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 31 orang dengan tingkat persentase 31,96%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 27 orang dengan tingkat persentase 27,83%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 23 orang dengan tingkat persentase 23,71%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 9 orang dengan tingkat persentase 9,28%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 7 orang dengan tingkat persentase 7,22%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{1.7}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,56. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak masih ragu-ragu atas penetapan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 tentang mewajibkan wajib pajak menggunakan Aplikasi e-SPT Masa PPN yang mempermudah wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya

2) Variabel Kesiapan Teknologi (X_2)

Terdapat tiga item pertanyaan dalam variabel Kesiapan Teknologi (X_2) yang telah diajukan kepada 97 responden (wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan *e-SPT* dimana teknik

yang digunakan ialah kuesioner). Berdasarkan jumlah kuesioner yang telah disebar menunjukkan jawaban mengenai indikator-indikator yang mewakili Variabel Kesiapan Teknologi (X_2). Berikut penyajian data hasil jawaban responden berdasarkan Variabel Kesiapan Teknologi (X_2) dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19 Distribusi Frekuensi Variabel Kesiapan Teknologi (X_2)

Indikator	Alternatif Jawaban										Mean
	5		4		3		2		1		
	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%	
$X_{2.1}$	10	10,31	37	38,15	36	37,11	12	12,37	2	2,06	3,42
$X_{2.2}$	6	6,19	25	25,77	43	44,33	19	19,59	4	4,12	3,10
$X_{2.3}$	11	11,34	21	21,65	40	41,24	18	18,55	7	7,22	3,11
<i>Grand Mean</i>											3,21

Sumber : Lampiran 2 dan Lampiran 5

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Ragu-Ragu

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan Tabel 19 untuk indikator $X_{2.1}$ yaitu penyediaan sarana dan fasilitas software, serta hardware dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 37 orang dengan tingkat persentase 38,15%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 36 orang dengan tingkat persentase 37,11%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 12 responden dengan tingkat persentase 12,37%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 10 orang dengan tingkat persentase 10,31%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 2 dengan tingkat persentase 2,06%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{2.1}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,42. Hal ini menunjukkan bahwa

sebagian besar wajib pajak setuju atas kurang tersedianya sarana dan fasilitas software, serta hardware yang baik dari pihak KPP dalam pelaksanaan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013.

Indikator $X_{2.2}$ yaitu Kesiapan Pihak KPP dalam menangani kendala-kendala dalam *system* aplikasi *e-SPT* Masa PPN dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab ragu-ragu sebesar 43 orang dengan tingkat persentase 44,33%. Responden yang menjawab setuju sebesar 25 orang dengan tingkat persentase 25,77%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 19 orang dengan tingkat persentase 19,59%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 6 orang dengan tingkat persentase 6,19%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase 4,12%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{2.2}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,10. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak ragu-ragu atas kesiapan Pihak KPP dalam menangani kendala-kendala dalam *system* aplikasi *e-SPT* Masa PPN.

Indikator $X_{2.3}$ yaitu Kemampuan pegawai KPP Pratama Surabaya Genteng dalam melakukan sistem pengoperasian aplikasi *e-SPT* Masa PPN dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab ragu-ragu sebesar 40 orang dengan tingkat persentase 41,24%. Responden yang menjawab setuju sebesar 21 orang dengan tingkat persentase 21,65%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 18

orang dengan tingkat persentase 18,55%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 11 orang dengan tingkat persentase 11,34%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 7 orang dengan tingkat persentase 7,22%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{2.3}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,11. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak masih ragu-ragu atas kemampuan pegawai KPP Pratama Surabaya Genteng dalam melakukan sistem pengoperasian aplikasi *e-SPT* Masa PPN.

3) Variabel Pelayanan (X_3)

Terdapat enam item pertanyaan dalam Variabel Pelayanan (X_3) yang telah diajukan kepada 97 responden (wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan *e-SPT* dimana teknik yang digunakan ialah kuesioner). Berdasarkan jumlah kuesioner yang telah disebar menunjukkan jawaban mengenai indikator-indikator yang mewakili Variabel Pelayanan (X_3). Berikut penyajian data hasil jawaban responden berdasarkan Variabel Pelayanan (X_3) dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20 Distribusi Frekuensi Variabel Pelayanan (X_3)

Indikator	Alternatif Jawaban										Mean
	5		4		3		2		1		
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
$X_{3.1}$	22	22,68	41	42,27	20	20,62	11	11,34	3	3,09	3,70
$X_{3.2}$	15	15,46	44	45,36	17	17,53	17	17,53	4	4,12	3,51
$X_{3.3}$	16	16,5	46	47,42	23	23,71	11	11,34	1	1,03	3,67
$X_{3.4}$	6	6,18	40	41,24	39	40,21	11	11,34	1	1,03	3,40
$X_{3.5}$	17	17,52	38	39,18	27	27,84	12	12,37	3	3,09	3,56
$X_{3.6}$	19	19,59	42	43,3	26	26,80	9	9,28	1	1,03	3,71
<i>Grand Mean</i>											3,58

Sumber : Lampiran 2 dan Lampiran 5

- 5 = Sangat Setuju
- 4 = Setuju
- 3 = Ragu-Ragu
- 2 = Tidak Setuju
- 1 = Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan Tabel 20 untuk indikator $X_{3.1}$ tentang jadwal pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 41 orang dengan tingkat persentase 42,27%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 22 orang dengan tingkat persentase 22,68%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 20 orang dengan tingkat persentase 20,62%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 11 orang dengan tingkat persentase 11,34%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 3 orang dengan tingkat persentase 3,09%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{3.1}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,70. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak setuju atas jadwal pelayanan yang ada sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator $X_{3.2}$ tentang jumlah pegawai dalam melayani wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 44 orang dengan tingkat persentase 45,36%. Ada dua jenis jawaban yang memiliki jumlah yang sama yaitu Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 17 orang dengan tingkat persentase 17,53% dan responden yang menjawab tidak setuju sebesar 17 orang dengan tingkat persentase 17,53%. Responden yang menjawab

sangat setuju sebesar 15 orang dengan tingkat persentase sebesar 15,46%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase 4,12%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{3,2}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,51. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak setuju atas jumlah Pegawai kurang memenuhi dalam melayani wajib pajak.

Indikator $X_{3,3}$ yaitu Sikap Pegawai dalam melayani wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 46 orang dengan tingkat persentase 47,42%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 23 orang dengan tingkat persentase 23,71%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 16 orang dengan tingkat persentase 16,5%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 11 orang dengan tingkat persentase 11,34%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang dengan tingkat persentase 1,03%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{3,3}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,67. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden setuju atas sikap pegawai dalam melayani wajib pajak ramah dan bersahabat.

Indikator $X_{3,4}$ yaitu Kemampuan Pegawai dalam penyampaian informasi kepada wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 40 orang dengan tingkat persentase 41,24%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar

39 orang dengan tingkat persentase 40,21%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 11 orang dengan tingkat persentase 11,34%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 6 orang dengan tingkat persentase sebesar 6,18%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang dengan tingkat persentase 1,03%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{3,4}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,40. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak setuju atas kemampuan Pegawai dalam penyampaian informasi kepada wajib pajak dapat dipahami dengan mudah oleh wajib pajak.

Indikator $X_{3,5}$ yaitu penguasaan pegawai dalam pengoperasian media elektronik dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 38 orang dengan tingkat persentase 39,18%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 27 orang dengan tingkat persentase 27,84%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 17 orang dengan tingkat persentase 17,52%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 12 orang dengan tingkat persentase 12,37%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 orang dengan tingkat persentase 3,09%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{3,5}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,56. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak setuju bahwa pegawai dalam proses pelayanan kepada wajib pajak menguasai pengoperasian media elektronik secara baik.

Indikator $X_{3,6}$ yaitu proses pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 42 orang dengan tingkat persentase 43,3%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 26 orang dengan tingkat persentase 26,80%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 19 orang dengan tingkat persentase 19,59%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 9 orang dengan tingkat persentase 9,28%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang dengan tingkat persentase 1,03%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{3,6}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,71. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak setuju bahwa proses pelayanan kepada wajib pajak kurang memenuhi persyaratan cepat, tepat dan efisien.

4) Variabel Model Sosialisasi (X_4)

Terdapat lima item pertanyaan dalam Variabel Model Sosialisasi (X_4) yang telah diajukan kepada 97 responden (wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan *e-SPT* dimana teknik yang digunakan ialah kuesioner). Berdasarkan jumlah kuesioner yang telah disebar menunjukkan jawaban mengenai indikator-indikator yang mewakili Variabel Model Sosialisasi (X_4). Berikut penyajian data hasil jawaban responden berdasarkan Variabel Model Sosialisasi (X_4) dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21 Distribusi Frekuensi Variabel Model Sosialisasi (X_4)

indikator	Alternatif Jawaban										Mean
	5		4		3		2		1		
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
$X_{4.1}$	19	19,59	32	32,99	21	21,65	19	19,59	6	6,18	3,40
$X_{4.2}$	15	15,46	30	30,93	29	29,9	17	17,53	6	6,18	3,32
$X_{4.3}$	13	13,40	35	36,08	33	34,02	16	16,5	0	0	3,46
$X_{4.4}$	11	11,34	26	26,80	29	29,9	30	30,93	1	1,03	3,16
$X_{4.5}$	22	22,68	33	34,02	25	25,77	14	14,43	3	3,09	3,59
<i>Grand Mean</i>											3,39

Sumber : Lampiran 2 dan Lampiran 5

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Ragu-Ragu

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan Tabel 21 untuk indikator $X_{4.1}$ tentang suasana selama sosialisasi dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 32 orang dengan tingkat persentase 32,99%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 21 orang dengan tingkat persentase 21,65%. Ada dua jenis jawaban dengan jumlah yang sama yaitu responden yang menjawab sangat setuju sebesar 19 orang dengan tingkat persentase 19,59% dan responden yang menjawab tidak setuju sebesar 19 orang dengan tingkat persentase 19,59%. Pada posisi terakhir responden menjawab sangat tidak setuju sebesar 6 orang dengan tingkat persentase 6,18%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{4.1}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,40. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden menjawab setuju bahwa suasana selama sosialisasi berlangsung interaktif dan menyenangkan.

Indikator $X_{4.2}$ tentang Metode Sosialisasi dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 30

orang dengan tingkat persentase 30,93%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 29 orang dengan tingkat persentase 29,9%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 17 orang dengan tingkat persentase 17,53%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 15 orang dengan tingkat persentase sebesar 15,46%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 6 orang dengan tingkat persentase 6,18%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{4.2}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,32. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak menjawab setuju atas metode sosialisasi yang digunakan terlalu biasa dan kurang inovatif.

Indikator $X_{4.3}$ yaitu Materi yang disampaikan susah dipahami oleh peserta sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 35 orang dengan tingkat persentase 36,08%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 33 orang dengan tingkat persentase 34,02%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 16 orang dengan tingkat persentase 16,5%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat setuju sebesar 13 orang dengan tingkat persentase 13,40%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{4.3}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,46. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak menjawab setuju atas materi yang disampaikan susah dipahami oleh peserta sosialisasi dan dapat langsung diaplikasikan.

Indikator $X_{4.4}$ yaitu waktu penyelenggaraan sosialisasi dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab tidak setuju sebesar 30 orang dengan tingkat persentase 30,93%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 29 orang dengan tingkat persentase 29,9%. Responden yang menjawab setuju sebesar 26 orang dengan tingkat persentase 26,80%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 11 orang dengan tingkat persentase 11,34%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang dengan tingkat persentase 1,03%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{4.4}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,16. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak tidak setuju atas waktu penyelenggaraan sosialisasi sudah efektif.

Indikator $X_{4.5}$ yaitu Kemampuan pegawai pajak dalam menjawab pertanyaan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 33 orang dengan tingkat persentase 34,02%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 25 orang dengan tingkat persentase 25,77%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 22 orang dengan tingkat persentase 22,68%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 14 orang dengan tingkat persentase 14,43%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 orang dengan tingkat persentase 3,09%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $X_{4.5}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,59. Hal ini menunjukkan sebagian

besar wajib pajak setuju atas Kemampuan pegawai pajak dalam menjawab pertanyaan wajib pajak dapat dipahami dengan mudah oleh wajib pajak.

5) Variabel Tingkat Kepatuhan (Y)

Terdapat sembilan item pertanyaan dalam Variabel Tingkat Kepatuhan (Y) yang telah diajukan kepada 97 responden (wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan *e-SPT* dimana teknik yang digunakan ialah kuesioner). Berdasarkan jumlah kuesioner yang telah disebar menunjukkan jawaban mengenai indikator-indikator yang mewakili Variabel Tingkat Kepatuhan (Y). Berikut penyajian data hasil jawaban responden berdasarkan Variabel Tingkat Kepatuhan (Y) dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22 Distribusi Frekuensi Variabel Tingkat Kepatuhan (Y)

indikator	Alternatif Jawaban										Mean
	5		4		3		2		1		
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Y _{1,1}	35	36,08	34	35,05	22	22,68	4	4,12	2	2,06	3,99
Y _{1,2}	24	24,74	36	37,11	21	21,65	15	15,46	1	1,03	3,69
Y _{1,3}	14	14,43	39	40,21	32	32,99	11	11,34	1	1,03	3,56
Y _{1,4}	25	25,77	36	37,11	25	25,77	11	11,34	0	0	3,77
Y _{1,5}	16	16,5	30	30,93	23	23,71	24	24,74	4	4,12	3,31
Y _{1,6}	20	20,62	38	39,18	28	28,86	7	7,22	4	4,12	3,65
Y _{1,7}	18	18,56	36	37,11	24	24,74	17	17,53	2	2,06	3,53
Y _{1,8}	28	28,87	34	35,05	21	21,65	11	11,34	3	3,09	3,75
Y _{1,9}	22	22,68	30	30,93	32	32,99	13	13,40	0	0	3,63
<i>Grand Mean</i>											3,64

Sumber : Lampiran 2 dan Lampiran 5

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Ragu-Ragu

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan Tabel 22 untuk indikator $Y_{1.1}$ tentang suasana selama sosialisasi dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab sangat setuju sebesar 35 orang dengan tingkat persentase 36,08%. Responden yang menjawab setuju sebesar 34 orang dengan tingkat persentase 35,05%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 22 orang dengan tingkat persentase 22,68%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 4 orang dengan tingkat persentase 4,12%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 2 orang dengan tingkat persentase 2,06%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $Y_{1.1}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,99. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak sangat setuju bahwa kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kejelasan dan pemahaman wajib pajak atas penerapan tegas serta pemberlakuan penerapan peraturan tersebut.

Indikator $Y_{1.2}$ tentang Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh kemudahan penggunaan aplikasi e-SPT Masa PPN dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 36 orang dengan tingkat persentase 37,11%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 24 orang dengan tingkat persentase 24,74%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 21 orang dengan tingkat persentase 21,65%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 15 orang dengan tingkat persentase 15,46%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab tidak setuju sebesar 1 orang dengan tingkat

persentase sebesar 1,03%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $Y_{1,2}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,69. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak setuju bahwa kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh kemudahan penggunaan aplikasi e-SPT Masa PPN.

Indikator $Y_{1,3}$ yaitu Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh Kesigapan pegawai dalam membantu pelaksanaan penerapan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 39 orang dengan tingkat persentase 40,21%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 32 orang dengan tingkat persentase 32,99%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 14 orang dengan tingkat persentase 14,43%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 11 orang dengan tingkat persentase 11,34%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 1 orang dengan tingkat persentase 1,03%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $Y_{1,3}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,56. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak setuju bahwa kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh Kesigapan pegawai dalam membantu pelaksanaan penerapan peraturan tersebut.

Indikator $Y_{1,4}$ yaitu Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (perhitungan dan pelaporan SPT) dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 36 orang dengan tingkat persentase

37,11%. Terdapat dua jenis jawaban yang memiliki jumlah yang sama yaitu responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 25 orang dengan tingkat persentase 25,77% dan responden yang menjawab sangat setuju sebesar 25 orang dengan tingkat persentase 25,77%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 11 orang dengan tingkat persentase 11,34%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $Y_{1.4}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,77. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak setuju bahwa kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (perhitungan dan pelaporan SPT).

Indikator $Y_{1.5}$ yaitu Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 30 orang dengan tingkat persentase 30,93%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 24 orang dengan tingkat persentase 24,74%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 23 orang dengan tingkat persentase 23,71%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 16 orang dengan tingkat persentase 16,5%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase 4,12%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $Y_{1.5}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,31. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak setuju bahwa kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pelayanan kurang memuaskan kepada wajib pajak.

Indikator $Y_{1.6}$ yaitu Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 38 orang dengan tingkat persentase 39,18%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 28 orang dengan tingkat persentase 28,86%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 20 orang dengan tingkat persentase 20,62%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 7 orang dengan tingkat persentase 7,22%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase 4,12%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $Y_{1.6}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,65. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak menjawab setuju bahwa Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atas pemberlakuan peraturan terbaru.

Indikator $Y_{1.7}$ yaitu Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 36 orang dengan tingkat persentase 37,11%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 24 orang dengan tingkat persentase 24,74%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 18 orang dengan tingkat persentase 18,56%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 17 orang dengan tingkat persentase 17,53%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 orang dengan

tingkat persentase 2,06%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $Y_{1.7}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,53. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak setuju bahwa kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak.

Indikator $Y_{1.8}$ yaitu Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemberitaan media masa dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 34 orang dengan tingkat persentase 35,05%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 28 orang dengan tingkat persentase 28,87%. Responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 21 orang dengan tingkat persentase 21,65%. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 11 orang dengan tingkat persentase 11,34%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 orang dengan tingkat persentase 3,09%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $Y_{1.8}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,75. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak setuju bahwa kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemberitaan media masa yang menyudutkan Departemen Keuangan khususnya DJP (Direktorat Jenderal Pajak).

Indikator $Y_{1.9}$ yaitu Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh kurang tegasnya dasar hukum dan hukuman atas tindak pidana pajak dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa sebagian besar responden menjawab ragu-ragu sebesar 32 orang dengan tingkat persentase 32,99%.

Responden yang menjawab setuju sebesar 30 orang dengan tingkat persentase 30,93%. Responden yang menjawab sangat setuju sebesar 22 orang dengan tingkat persentase 22,68%. Pada posisi terakhir responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 13 orang dengan tingkat persentase 13,40%. Berdasarkan jawaban responden atas variabel $Y_{1.9}$ maka jumlah rata-rata (*mean*) dari jawaban tersebut adalah 3,63. Hal ini menunjukkan sebagian besar wajib pajak ragu-ragu bahwa kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurang tegasnya dasar hukum dan hukuman atas tindak pidana pajak.

B. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat awal untuk mengetahui data yang diperoleh dari pembagian kuesioner tersebut bias atau tidak. Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan tingkat α sebesar 10%. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain Uji Multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Normalitas.

1. Hasil Uji Multikolieritas

Hasil uji multikolieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghazali, 2006) dalam (Haryanti, 2011:70). Metode yang digunakan ialah menggunakan nilai VIF, jika VIF lebih kecil dari angka 5 ($VIF < 5$) dan nilai $tolerance > 0,1$, maka variabel bebas tersebut tidak terjadi multikolieritas (Sarwono, 2012:223).

Tabel 23 Hasil Uji Multikolieritas

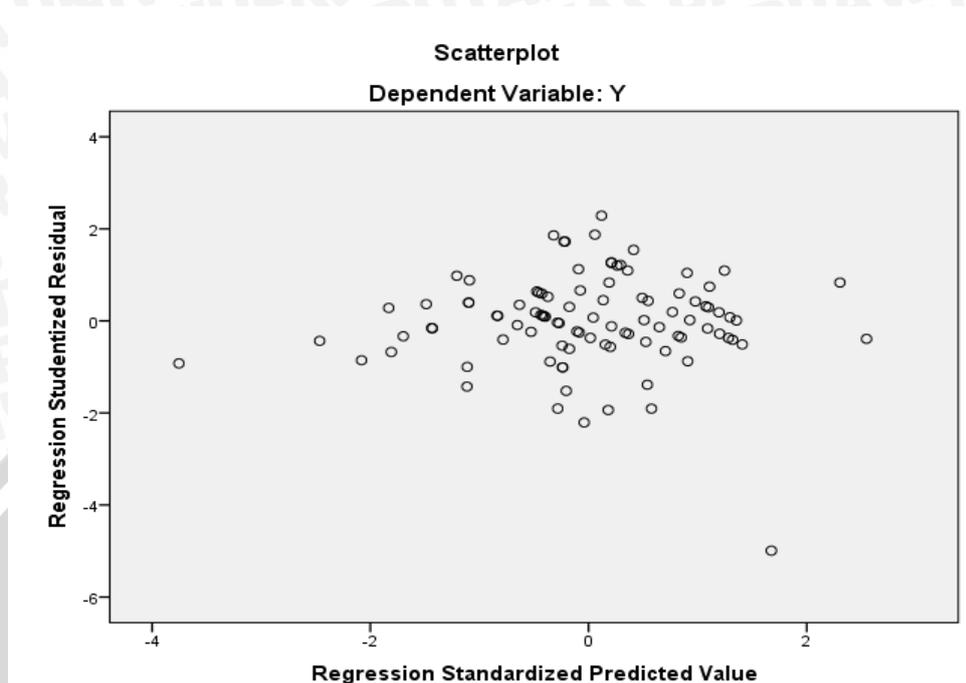
Variabel	Collinierty Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Persepsi Wajib Pajak (X_1)	0,886	1,129	Non Multikolinieritas
Kesiapan Teknologi (X_2)	0,882	1,133	Non Multikolinieritas
Pelayanan (X_3)	0,895	1,117	Non Multikolinieritas
Model Sosialisasi (X_4)	0,905	1,106	Non Multikolinieritas

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan pada tabel 23 dapat diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF lebih kecil dari angka 5 ($VIF < 5$) dan nilai tolerance lebih kecil ($VIF > 0,1$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolieritas antar variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4).

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji dalam model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lain. Cara mendeteksi ada atau tidak adanya adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola pada grafik *scatterplot* dimana ketika data tersebar berpencar di sekitar angka 0 (nol) pada sumbu Y serta tidak membentuk pola atau kecenderungan tertentu. Berdasarkan keterangan diatas maka model regresi tersebut tersebut layak untuk digunakan dalam memprediksi variabel dependen (Sarwono, 2012:228).

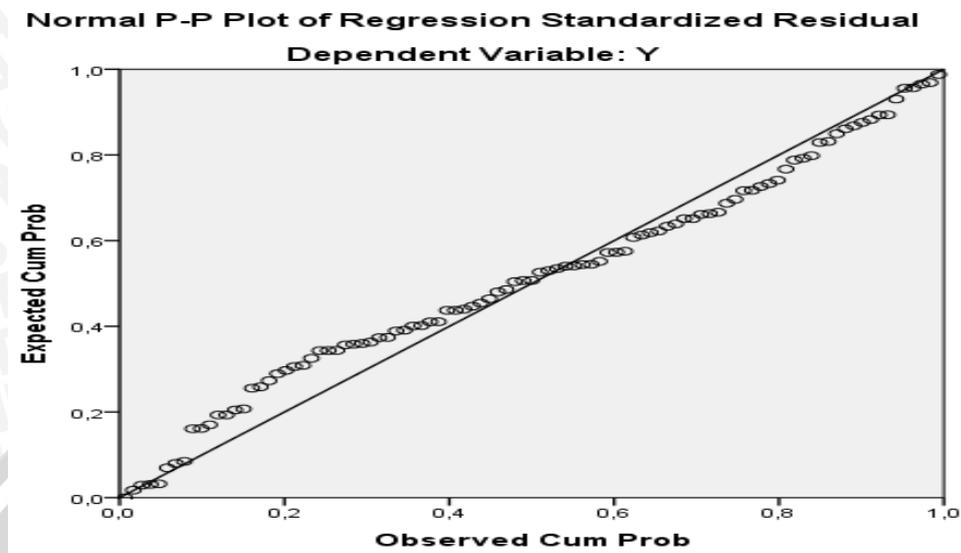


Gambar 3 Hasil Uji Asumsi Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil Uji Heterokedastisitas pada gambar grafik 3 menjelaskan bahwa titik-titik yang terbentuk pada grafik *scatterplot* berpecah dan mengumpul disekitar angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Kesimpulannya model regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas dan model ini layak digunakan dalam penelitian ini.

3. Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan (Sunyoto, 2010:103). Berdasarkan hasil pengujian uji normalitas data yang diperoleh dari 97 responden dalam menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan *e-SPT*, maka didapatkan sebagai berikut :



Gambar 4 Hasil Uji Asumsi Normalitas

Berdasarkan Hasil Uji Normalitas pada gambar grafik 4 dapat dilihat bahwa titik-titik atau sebaran data berada pada posisi disekitar garis lurus yang membentuk garis miring dari arah bawah ke atas walaupun ada sebaran data ada yang sedikit menjauhi garis miring tetapi pada akhirnya mengikuti garis miring tersebut. Kesimpulannya, persyaratan normalitas pada model regresi ini sudah terpenuhi.

C. Hasil Analisis Regresi Linier

Analisis yang dilakukan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji T. Uji F dan uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel persepsi wajib pajak (X1), kesiapan teknologi (X2), Variabel pelayanan (X3), dan Variabel model sosialisasi (X4), terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Analisis linier berganda dalam penelitian ini menggunakan program IBM SPSS *Statistic* 21. Berikut daftar rekapitulasi hasil analisis regresi linier berganda yaitu :

Tabel 24 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B (<i>Unstandardized Coefficient</i>)	Beta (<i>Standardized Coefficient</i>)	t	Sig t	Keterangan
Konstanta	4,979	-	1,750	0,083	-
Persepsi Wajib Pajak (X ₁)	0,357	0,339	4,562	0,000	Signifikan
Kesiapan Teknologi (X ₂)	0,468	0,284	3,810	0,000	Signifikan
Pelayanan (X ₃)	0,301	0,214	2,893	0,005	Signifikan
Model Sosialisasi (X ₄)	0,429	0,334	4,536	0,000	Signifikan
R = 0,740		F _{hitung} = 27,827			
R Square = 0,547		Sig F = 0,000			
Adj R Square = 0,528		α = 10%			
df regresi = 4		N = 97			
df residual = 92					

Sumber : Lampiran 6

Persamaan regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel adalah :

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4X_4$$

Adapun model regresi berdasarkan rekapitulasi rekapitulasi hasil analisis regresi linier berganda sesuai dengan tabel 24 adalah :

$$Y = 4,979 + 0,357X_1 + 0,468X_2 + 0,301X_3 + 0,429X_4$$

Interpretasi dari persamaan model regresi tersebut adalah :

1. Koefisien B (*Unstandardized Coefficient*) pada variabel persepsi wajib pajak (X₁) sebesar 0,357. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan persepsi wajib pajak (X₁) maka tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,357 satuan dengan menganggap variabel bebas yang lain konstan, sebaliknya apabila variabel persepsi wajib pajak (X₁) terjadi penurunan maka pada variabel tingkat kepatuhan

wajib pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,357. Pada variabel persepsi wajib pajak (X1) memiliki signifikansi (α) sebesar 0,000 artinya variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini dikarenakan signifikan (α) $<$ 0,1 (10%).

2. Koefisien B (*Unstandardized Coefficient*) pada variabel kesiapan teknologi (X2) sebesar 0,468. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan kesiapan teknologi (X2) maka tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,468 satuan dengan menganggap variabel bebas yang lain konstan, sebaliknya apabila variabel kesiapan teknologi (X2) terjadi penurunan maka pada variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,468. Pada variabel kesiapan teknologi (X2) memiliki signifikansi (α) sebesar 0,000 artinya variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini dikarenakan signifikan (α) $<$ 0,1 (10%).

3. Koefisien B (*Unstandardized Coefficient*) pada variabel kesiapan teknologi (X3) sebesar 0,301. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pelayanan (X3) maka tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,301 satuan dengan menganggap variabel bebas yang lain konstan sebaliknya apabila variabel pelayanan (X3) terjadi penurunan maka pada variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,357. Pada variabel pelayanan (X3) memiliki signifikansi (α) sebesar 0,005 artinya variabel tersebut

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini dikarenakan signifikan (α) < 0,1 (10%).

4. Koefisien B (*Unstandardized Coefficient*) pada variabel model sosialisasi (X4) sebesar 0,429. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan model sosialisasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,429 satuan dengan menganggap variabel bebas yang lain konstan sebaliknya apabila variabel model sosialisasi (X4) terjadi penurunan maka pada variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,429. Pada variabel model sosialisasi (X4) memiliki signifikansi (α) sebesar 0,000 artinya variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini dikarenakan signifikan (α) < 0,1 (10%).

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Selain itu, koefisien determinasi (R^2) juga digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel *dependent* dan *variabel independent*. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) – satu (1). Nilai yang mendekati angka 1 berarti variabel *independent* memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel *dependent*. Berdasarkan penjelasan tersebut nilai koefisien determinasi pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 25 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b							
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	,740 ^a	,547	,528	2,209	,547	27,827	4

Sumber : lampiran 6

Berdasarkan tabel 25 tentang hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat bahwa koefisien korelasi menunjukkan besarnya hubungan antara variabel independen yaitu variabel persepsi wajib pajak (X1), variabel kesiapan teknologi (X2), variabel Pelayanan (X3), dan variabel model sosialisasi (X4). Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,740 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas tersebut termasuk dalam kategori kuat karena berada diantara 0,6-0,8. Kesimpulannya, jika hubungan antara variabel bebas yaitu variabel persepsi wajib pajak (X1), variabel kesiapan teknologi (X2), variabel Pelayanan (X3), dan variabel model sosialisasi (X4) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bersifat positif artinya ketika variabel bebas semakin ditingkatkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan yang akan berdampak juga pada jumlah penerimaan pajak.

Berdasarkan tabel 25 dapat dilihat pula Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,528. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi nilai variabel *dependent* (Y) dapat dijelaskan pada persamaan regresi yang diperoleh sebesar 52,8% artinya variabel persepsi wajib pajak (X1), variabel kesiapan teknologi (X2), variabel Pelayanan (X3), dan variabel model sosialisasi (X4) mampu menjelaskan variasi perubahan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 52,8%. Sedangkan

sisanya yaitu sebesar 47,2% dipengaruhi faktor-faktor lain di luar persamaan model regresi yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

2. Hasil Uji Hipotesis

Model persamaan regresi yang telah didapatkan, terlebih dahulu dilakukan pengujian baik pengujian secara simultan (Uji F) maupun pengujian secara parsial (Uji T). Pengujian tersebut digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun penjelasan pengujian secara simultan (Uji F) dan pengujian secara parsial (Uji T) sebagai berikut :

a) Uji F (Uji Simultan)

Pengujian secara simultan (Uji F) dilakukan untuk melakukan pengujian tingkat signifikansi pengaruh variabel *independent* (X_1, X_2, X_3, X_4) secara keseluruhan terhadap variabel *dependent* (Y). Uji F yang dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Ketika nilai F_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan nilai F_{tabel} , maka H_0 ditolak dan H_1, H_2, H_3 dalam penelitian ini diterima. Pengujian secara simultan (Uji F) dalam penelitian ini menggunakan program IBM SPSS *Statistic* 21. Hasil pengujian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 26 Hasil Uji F atau Uji Anova

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	543,142	4	135,785	27,827	,000 ^b
Residual	448,920	92	4,880		
Total	992,062	96			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X_4, X_1, X_3, X_2

Sumber: Lampiran 6

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara simultan disajikan dalam Tabel 27 sebagai berikut :

Tabel 27 Uji Hipotesis Model Regresi Secara Simultan

Hipotesis	Nilai	Keputusan
$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, maka variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. $H_1 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, maka variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, paling tidak salah satu dari variabel bebas tersebut. $\alpha = 10\%$	$F_{hitung} = 27,827$ $Sig = 0,000$ $F_{tabel} = 2,006$	H_0 Ditolak H_a Diterima

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan pada tabel 26 tentang hasil uji simultan atau uji F atau uji anova yang dilakukan pada variabel *independent* yaitu variabel persepsi wajib pajak (X1), kesiapan teknologi (X2), Pelayanan (X3), dan model sosialisasi (X4) dengan variabel *dependent* (Y) diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 27,872 dengan signifikansi F sebesar 0,000 ($p < 0,1$) atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $27,872 > 2,006$ ($\alpha = 0,1$; df regresi 4 ; df residual 92) menunjukkan H_0 ditolak. Jika H_0 ditolak maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel persepsi wajib pajak (X1), variabel kesiapan teknologi (X2), variabel Pelayanan (X3), dan variabel model sosialisasi (X4) dapat diterima. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diambil keputusan bahwa H_0 ditolak pada tingkat signifikansi (α) sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel *independent* yaitu variabel persepsi wajib pajak (X1),

kesiapan teknologi (X2), Pelayanan (X3), dan model sosialisasi (X4) dengan variabel *dependent* (Y).

b) Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau uji parsial digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial variabel-variabel bebas (X1, X2, X3, X4) secara keseluruhan terhadap variabel terikat (Y). Untuk menguji hubungan tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Variabel *independent* pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau memiliki signifikansi $(\alpha) < 0,1$. Pengujian secara parsial (Uji F) dalam penelitian ini menggunakan program IBM SPSS *Statistic* 21. Hasil pengujian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 28 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,979	2,844		1,750	,083
X1	,357	,078	,339	4,552	,000
X2	,468	,123	,284	3,810	,000
X3	,301	,104	,214	2,893	,005
X4	,429	,095	,334	4,536	,000

Sumber : Lampiran 6

(a) Variabel Persepsi Wajib Pajak (X1)

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara parsial pada variabel persepsi wajib pajak dijelaskan dalam Tabel 29 sebagai berikut :

Tabel 29 Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial Variabel Persepsi Wajib Pajak (X1)

Hipotesis	Nilai	Keputusan
Ho : $\beta_i = 0$, maka Variabel Persepsi Wajib Pajak (X ₁) tidak mempunyai pengaruh terhadap Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	$t_{hitung} = 4,552$	H ₀ Ditolak
H1 : $\beta_i \neq 0$, maka Variabel Persepsi Wajib Pajak (X ₁) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	$t_{tabel} = 1,662$	H _a Diterima
$\alpha=10\%$	Sig = 0,000	

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan tabel 29 tentang hasil uji hipotesis model regresi secara parsial dengan menggunakan program IBM SPSS *Statistic* 21 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} pada variabel persepsi wajib pajak (X1) sebesar 4,552 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai statistik uji t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($4,552 > 1,662$) dan juga signifikansi (α) lebih kecil daripada 0,1 (10%). Pengujian ini menunjukkan bahwa H₀ ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi wajib pajak (X1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).

(b) Variabel Kesiapan Teknologi (X2)

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara parsial pada variabel persepsi wajib pajak dijelaskan dalam Tabel 30 sebagai berikut :

Tabel 30 Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial Variabel Kesiapan Teknologi (X₂)

Hipotesis	Nilai	Keputusan
Ho : $\beta_i = 0$, maka Variabel Kesiapan Teknologi (X ₂) tidak mempunyai pengaruh terhadap Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	$t_{hitung} = 3,810$	H ₀ Ditolak
	$t_{tabel} = 1,662$	H _a Diterima
	Sig = 0,000	
H1 : $\beta_1 \neq 0$, maka Variabel Kesiapan Teknologi (X ₂) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).		
$\alpha=10\%$		

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan tabel 30 tentang hasil uji hipotesis secara parsial variabel kesiapan teknologi (X₂) dengan menggunakan program IBM SPSS *Statistic* 21 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} pada variabel kesiapan teknologi (X₂) sebesar 3,810 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai statistik uji t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($3,810 > 1,662$) dan juga signifikansi (α) lebih kecil daripada 0,1(10%). Pengujian ini menunjukkan bahwa H₀ ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesiapan teknologi (X₂) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).

(c) Variabel Pelayanan (X₃)

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara parsial pada variabel pelayanan dijelaskan dalam Tabel 31 sebagai berikut :

Tabel 31 Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial Variabel Pelayanan (X3)

Hipotesis	Nilai	Keputusan
Ho : $\beta_i = 0$, maka Variabel Pelayanan (X ₃) tidak mempunyai pengaruh terhadap Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	$t_{hitung} = 2,893$	H ₀ Ditolak
H1 : $\beta_1 \neq 0$, maka Variabel Pelayanan (X ₃) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	$t_{tabel} = 1,662$	H _a Diterima
$\alpha = 10\%$	Sig = 0,005	

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan tabel 31 tentang hasil uji hipotesis secara parsial variabel pelayanan (X₃) dengan menggunakan program IBM SPSS *Statistic* 21 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} pada variabel pelayanan (X₃) sebesar 2,893 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005. Nilai statistik uji t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($2,893 > 1,662$) dan juga signifikansi (α) lebih kecil daripada 0,1 (10%). Pengujian ini menunjukkan bahwa H₀ ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan (X₃) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).

(d) Variabel Model Sosialisasi (X₄)

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara parsial pada variabel model sosialisasi dijelaskan dalam Tabel 32 sebagai berikut:

Tabel 32 Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial Variabel Model Sosialisasi (X₄)

Hipotesis	Nilai	Keputusan
Ho : $\beta_i = 0$, maka Variabel Model Sosialisasi (X ₄) tidak mempunyai pengaruh terhadap Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	$t_{hitung} = 4,536$	H ₀ Ditolak
H1 : $\beta_1 \neq 0$, maka Variabel Model Sosialisasi (X ₄) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	$t_{tabel} = 1,662$	H _a Diterima
$\alpha=10\%$	Sig = 0,005	

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan tabel 31 tentang hasil uji hipotesis secara parsial variabel model sosialisasi (X₄) dengan menggunakan program IBM SPSS *Statistic* 21 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} pada variabel model sosialisasi (X₄) sebesar 4,536 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai statistik uji t_{hitung} tersebut lebih kecil daripada t_{tabel} ($4,536 > 1,662$) dan juga signifikansi (α) lebih besar daripada 0,1 (10%). Pengujian ini menunjukkan bahwa H₀ ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel model sosialisasi (X₄) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).

c) Hasil Uji Dominan

Hasil Uji dominan digunakan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang ketiga yaitu variabel model sosialisasi merupakan variabel yang dominan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk membuktikan kebenaran tersebut, hal yang perlu dilakukan adalah membandingkan koefisien

regresi masing-masing variabel *independent* (X1, X2, X3, X4) yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 33 Hasil Uji Dominan Pada Analisis Regresi Linier Berganda

No	Variabel	<i>Standardized Koefisien Beta</i>
1.	Persepsi Wajib Pajak (X1)	0,339
2.	Kesiapan Teknologi (X2)	0,284
3.	Pelayanan (X3)	0,214
4.	Model Sosialisasi (X4)	0,334

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan pada tabel 33 tersebut, variabel persepsi wajib pajak (X1) adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. Artinya variabel Y lebih banyak dipengaruhi oleh variabel persepsi wajib pajak (X1) daripada variabel kesiapan teknologi (X2), variabel pelayanan (X3), variabel model sosialisasi (X4). Kesimpulan yang di dapat dari penjelasan tersebut adalah hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini tidak terbukti.

D. Pembahasan

Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang terdiri dari variabel persepsi wajib pajak (X1), variabel kesiapan teknologi (X2), variabel pelayanan (X3), dan variabel model sosialisasi (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dapat dibuktikan dari hasil analisis regresi linier berganda, dimana nilai koefisien dari semua variabel bebas yaitu variabel persepsi wajib pajak (X1), variabel kesiapan teknologi (X2), variabel pelayanan (X3), dan variabel model sosialisasi (X4) memiliki nilai positif. Berdasarkan hasil penelitian ini, semua variabel bebas yang digunakan berpengaruh terhadap variabel terikat. Berikut penjelasan masing-masing pengaruh variabel bebas yang terdiri dari variabel persepsi wajib pajak

(X1), variabel kesiapan teknologi (X2), variabel pelayanan (X3), dan variabel model sosialisasi (X4) terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) baik secara simultan maupun secara parsial adalah :

1. Pengaruh secara simultan antara variabel persepsi wajib pajak (X1), variabel kesiapan teknologi (X2), variabel Pelayanan (X3), dan variabel Model Sosialisasi (X4) terhadap variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) atas diberlakukannya PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel persepsi wajib pajak (X1), variabel kesiapan teknologi (X2), variabel pelayanan (X3), dan variabel model sosialisasi (X4) berpengaruh terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Keempat variabel bebas tersebut mempunyai kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 52,8% yang berarti bahwa variabel persepsi wajib pajak (X1), variabel kesiapan teknologi (X2), variabel Pelayanan (X3), dan variabel model sosialisasi (X4) mampu menjelaskan variasi perubahan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 52,8%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 47,2% dipengaruhi faktor-faktor lain di luar persamaan model regresi yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui hubungan secara simultan dari variabel bebas (X1, X2, X3, dan X4) terhadap variabel terikat (Y), dapat ditunjukkan dengan melihat hasil uji F yaitu nilai signifikansi F sebesar 0,000 sedangkan $\alpha = 0,1$ sehingga ($0,000 < 0,1$) atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $27,872 > 2,006$ ($\alpha = 0,1$; df regresi 4 ; df residual 92) menunjukkan H_0 ditolak. Jika H_0 ditolak maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa antara variabel persepsi wajib pajak (X1),

variabel kesiapan teknologi (X2), variabel pelayanan (X3), dan variabel model sosialisasi (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

2. Pengaruh secara parsial antara variabel persepsi wajib pajak (X1), variabel kesiapan teknologi (X2), variabel Pelayanan (X3), dan variabel Model Sosialisasi (X4) terhadap variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) atas diberlakukannya PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013

Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel persepsi wajib pajak (X1), variabel kesiapan teknologi (X2), variabel pelayanan (X3), dan variabel model sosialisasi (X4) berpengaruh secara parsial terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel bebas (X1, X2, X3, dan X4) terhadap variabel terikat (Y), dijelaskan sebagai berikut :

- a. Variabel Persepsi Wajib Pajak (X1) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($4,552 > 1,662$) dan juga signifikansi (α) lebih besar daripada 0,1 (10%). Sehingga H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan pada variabel persepsi wajib pajak (X1) terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Pengaruh positif pada variabel persepsi wajib pajak (X1) didukung oleh indikator-indikator yang dideskripsikan dalam bentuk tabel distribusi. Pengaruh ini berasal dari jawaban-jawaban responden pada indikator-indikator pendukung variabel persepsi wajib pajak yang cenderung menjawab setuju dan sangat setuju. Hasil

penelitian ini didukung dengan beberapa pendapat ahli antara lain Rakhmat (2004:25) dalam Iprianto (2013:89) mendefinisikan “persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi yang menafsirkan pesan”. Sedangkan menurut Robbins (2008:176) dalam Iprianto (2013:89) “bahwa secara implisit persepsi suatu individu terhadap suatu obyek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi Individu lainnya terhadap obyek yang sama”. Untuk itu dalam meningkatkan tingkat persepsi pajak atas pemanfaatan aplikasi *e-SPT* Masa PPN sebaiknya perlu dilakukan pendekatan secara intensif dan secara rutin melakukan evaluasi tentang penerapan peraturan tersebut.

b. Variabel Kesiapan Teknologi (X2) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($3,810 > 1,662$) dan juga signifikansi (α) lebih besar daripada 0,1 (10%). Sehingga H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan pada variabel kesiapan teknologi (X2) terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Pengaruh positif pada variabel kesiapan teknologi (X2) didukung oleh indikator-indikator yang dideskripsikan dalam bentuk tabel distribusi. Pengaruh ini berasal dari jawaban-jawaban responden pada indikator-indikator pendukung variabel kesiapan teknologi yang cenderung menjawab setuju dan ragu-ragu. Penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lai (2008)

dalam Desmayanti (2012:28) “bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi kesiapan teknologi (*technology readiness*) yaitu keyakinan (*optism*), inovasi (*innovativeness*), ketidaknyamanan (*discomfort*), dan ketidakamanan (*insecurity*)”. Berdasarkan faktor tersebut untuk memaksimalkan kesiapan teknologi atas diterapkannya PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 maka pihak DJP harus secara rutin melakukan evaluasi atas *system* aplikasi *e-SPT* Masa PPN untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

c. Variabel Pelayanan (X3) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($2,893 > 1,662$) dan juga signifikansi (α) lebih besar daripada 0,1 (10%). Sehingga H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan pada variabel pelayanan (X3) terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Pengaruh positif pada variabel pelayanan (X3) didukung oleh indikator-indikator yang dideskripsikan dalam bentuk tabel distribusi. Pengaruh ini berasal dari jawaban-jawaban responden pada indikator-indikator pendukung variabel pelayanan yang cenderung menjawab setuju dan ragu-ragu. Hasil penelitian ini didukung dengan pendapat ahli antara lain Menurut Rahayu (2010:28) dalam (winerungan, 2013:963) menyatakan “Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima

kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara”. Ketika pelayanan kepada wajib pajak dapat dioptimalkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak bahkan tingkat pendapatan pajak pun akan meningkat.

d. Variabel Model Sosialisasi (X4) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($4,536 > 1,662$) dan juga signifikansi (α) lebih besar daripada 0,1 (10%). Sehingga H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan pada Variabel Model Sosialisasi (X4) terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Pengaruh positif pada variabel model sosialisasi (X4) didukung oleh indikator-indikator yang dideskripsikan dalam bentuk tabel distribusi. Pengaruh ini berasal dari jawaban-jawaban responden pada indikator-indikator pendukung variabel model sosialisasi yang cenderung menjawab setuju dan ragu-ragu. Hasil penelitian ini didukung dengan pendapat ahli antara lain menurut Mustofa (2007) dalam Restiani (2011:17), “sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif”. Berdasarkan pendapat ahli tersebut sosialisasi adalah salah satu variabel penting dalam memperkenalkan kepada wajib pajak atas penerapan PER 10/PJ/2013

dan PER 11/PJ/2013 tentang mewajibkan wajib pajak dalam pelaporan menggunakan *e-SPT* Masa PPN. Untuk itu pihak DJP harus melakukan inovasi-inovasi dalam model sosialisasi sehingga wajib pajak lebih mengerti dan memahami penerapan peraturan tersebut.

3. Variabel yang lebih dominan adalah variabel Persepsi wajib Pajak diantara variabel-variabel lain. Hal ini bisa di dasari dari hasil analisis regresi linier berganda nilai *Standardized Koefisien Beta* yang dimiliki oleh variabel persepsi wajib pajak tertinggi dibandingkan dengan variabel bebas yang lainnya. Berikut penjelasan yang membuktikan bahwa variabel persepsi wajib pajak merupakan variabel dominan (terdapat pada tabel 33):

Tabel 33 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

No	Variabel	<i>Standardized Koefisien Beta</i>
1.	Persepsi Wajib Pajak (X1)	0,339
2.	Kesiapan Teknologi (X2)	0,284
3.	Pelayanan (X3)	0,214
4.	Model Sosialisasi (X4)	0,334

Sumber : Lampiran 6

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi e-SPT Masa PPN Dalam Pelaporan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan terdapat pengaruh secara simultan antara variabel Persepsi Wajib Pajak (X1), variabel Kesiapan Teknologi (X2), variabel Pelayanan (X3), dan variabel Model Sosialisasi (X4) terhadap tingkat kepatuhan (Y) atas diterapkannya PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013 dapat diterima. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi F ($0,000 < 0,1$) atau $F_{hitung} > F_{tabel}$. Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa H_0 ditolak. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi wajib pajak (X1), variabel kesiapan teknologi (X2), variabel Pelayanan (X3), dan variabel model sosialisasi (X4) jika secara bersama-sama (simultan) ditingkatkan penerapannya maka akan meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak, begitupun sebaliknya jika variabel persepsi wajib pajak (X1), variabel kesiapan teknologi (X2), variabel Pelayanan (X3), dan variabel model sosialisasi (X4) diturunkan penerapannya maka akan menurunkan juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan terdapat pengaruh secara parsial antara variabel Persepsi Wajib Pajak (X1), variabel Kesiapan Teknologi (X2), variabel Pelayanan (X3), dan variabel Model Sosialisasi (X4) terhadap tingkat kepatuhan (Y) atas diterapkannya PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013 dapat diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis regresi secara parsial sebagai berikut :

- a. Variabel Persepsi Wajib Pajak (X1) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan bahwa t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} dan juga signifikansi (α) lebih besar daripada 0,1.
- b. Variabel Kesiapan Teknologi (X2) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan bahwa t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} dan juga signifikansi (α) lebih besar daripada 0,1.
- c. Variabel Pelayanan (X3) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan bahwa t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} dan juga signifikansi (α) lebih besar daripada 0,1.
- d. Variabel Model Sosialisasi (X4) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan bahwa t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} dan juga signifikansi (α) lebih besar daripada 0,1.

- Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan variabel model sosialisasi merupakan variabel yang dominan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak atas diterapkannya PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013 tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan berdasarkan *standardized Coefficients beta* variabel model sosialisasi memiliki nilai lebih rendah (nilai *standardized Coefficients beta* pada posisi kedua) dibandingkan dengan variabel persepsi wajib pajak (nilai *standardized Coefficients beta* tertinggi). Jadi, variabel yang paling dominan diantara keempat variabel bebas adalah variabel persepsi wajib pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Dari Sisi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan KPP Pratama Surabaya Genteng.

Untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi *e-SPT* Masa PPN oleh wajib pajak, hal yang perlu dibenahi oleh KPP Pratama Surabaya Genteng menurut pendapat peneliti adalah :

- Berdasarkan penelitian ini yang merupakan variabel yang paling dominan adalah variabel persepsi wajib pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk itu peneliti ingin memberikan saran kepada DJP dan khususnya KPP Pratama Surabaya Genteng yaitu dalam meningkatkan persepsi wajib pajak sebaiknya pihak DJP dan KPP Pratama Surabaya Genteng harus saling bekerja sama dalam membuat

suatu inovasi demi kesuksesan pemberlakuan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 misalnya, ketika pemberlakuan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 tentang kewajiban penggunaan e-SPT Masa PPN ditetapkan, untuk mempermudah wajib pajak dalam memahami peraturan tersebut maka menggunakan metode seperti iklan produk di tv. Jadi maksudnya disini KPP Pratama Surabaya Genteng dalam melakukan sosialisasi tidak hanya melakukan sosialisasi di tempat wajib pajak terdaftar tetapi bisa juga wajib pajak tanpa bisa datang ke KPP wajib pajak tersebut bisa memahami dengan mudah makna pemberlakuan peraturan tersebut dengan membuat tutorial cara penggunaan aplikasi *e-SPT* Masa PPN yang direkam dalam bentuk dvd atau cd. Hal ini bisa dilakukan karena mengingat banyak wajib pajak yang tidak bisa hadir dalam sosialisasi dengan berbagai alasan. Jadi, ketika persepsi wajib pajak meningkat maka akan berdampak pada semakin banyaknya wajib pajak yang melaporkan tepat waktu karena penggunaan aplikasi *e-SPT* Masa PPN lebih efisien dan mendukung program pemerintah untuk mengurangi penggunaan kertas.

- b) Ketika wajib pajak telah menggunakan *e-SPT* Masa PPN sebaiknya tidak perlu lagi datang ke KPP untuk menyerahkan bukti pelaporan SPT Masa PPN karena menurut persepsi wajib pajak hal tersebut tidak efisien dan wajib pajak banyak yang menganggap penggunaan aplikasi *e-SPT* sia-sia.
- c) KPP Pratama Surabaya Genteng sebaiknya perlu secara berkala melakukan peningkatan kualitas pegawai pajak yang cepat tanggap dan

kompeten dalam menunjang kesuksesan pemanfaatan aplikasi *e-SPT* Masa PPN, sehingga bila terjadi *error* dalam melakukan pengoperasian *e-SPT* maka dapat segera ditangani oleh staf pegawai pajak sehingga wajib pajak merasa puas dengan kinerja staf pajak khususnya KPP Pratama Surabaya Genteng.

- d) DJP sebaiknya secara berkala melakukan perbaikan sistem *e-SPT* Masa PPN karena banyak wajib pajak yang mengeluhkan ketika banyak data yang di input ke dalam sistem *e-SPT* sering terjadi *error*.
- e) KPP Pratama Surabaya Genteng sebaiknya perlu melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, misalnya dengan menambah pegawai di bagian TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) sehingga pelayanan kepada wajib pajak dapat cepat dan akurat sehingga wajib pajak tidak perlu mengantri terlalu lama (efisien).

2. Dari Sisi Wajib Pajak

- a) Wajib pajak sebaiknya harus lebih aktif lagi dalam mengerti dan memahami tentang pemberlakuan peraturan perpajakan. Karena setiap rupiah yang kita bayarkan untuk membayar pajak maka akan berguna bagi wajib pajak sendiri dan pembangunan nasional negara.
- b) Ketika wajib pajak mendapat undangan sosialisasi tentang pemberlakuan peraturan terbaru sebaiknya wajib pajak meluangkan waktu untuk menghadiri. Karena dengan menghadiri sosialisasi tersebut wajib pajak mendapat pengetahuan baru tentang perpajakan sehingga wajib pajak

dapat lebih mudah dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

3. Dari Sisi Keilmuan

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi para peneliti selanjutnya dan mengembangkan pengaruh pemanfaatan aplikasi *e-SPT* Masa PPN terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Disarankan untuk peneliti-peneliti selanjutnya menggunakan variabel-variabel lain yang mempunyai tingkat reabilitas tinggi yang berdasarkan koefisien korelasi (*alpha cronbach*).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinus, Sonny & Kurniawan Isnianto. 2009. *Panduan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Casavera. 2009. *SPT Elektronik, PPh Pekerja Ditanggung Pemerintah dan Bebas Fiskal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Devano, Sonny & Rahayu, Kurnia Siti. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Desmayanti, Esy. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas E-Filling Oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian Spt Masa Secara Online Dan Realtime. *Skripsi* : Universitas Diponegoro.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta : PT Raja grafindo Persada.
- Fransiska, Andi. 2012. Pengaruh Faktor-faktor efektivitas Iklan Televisi Provider Telepon Seluler Global System For Mobile Comunication Terhadap Perilaku Perpindahan merek (Studi Empiris pada Pengunjung Axis Shop Kota Malang). *Skripsi* : Universitas Brawijaya, Malang.
- Haryanti, Nurita Dwi. 2011. Pengaruh Sikap Tax Professional, Niat Tax Professional, kondisi Keuangan, Fasilitas Perusahaan, dan Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Pajak Badan. *Skripsi* : Universitas Brawijaya, Malang.
- Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia (Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi)*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Iprianto. 2013. *Perbedaan Persepsi Wajib Pajak Perorangan Dan Wajib Pajak Tenaga Ahli Terhadap Pelaksanaan Self assessment System Di Kota Bengkulu*, 27(1): 89
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Lingga, Salsalina Ita. 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi

Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak : Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Majalaya. *Skripsi* : Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Lingga, Salsalina Ita. 2013. *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama "X" Jawa Barat I*, 5(1): 50-60.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Muljono, Joko. 2010. *Panduan Brevet Pajak-Akuntansi Pajak dan Ketentuan umum Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Masyhuri dan Zainuddin, M. 2009. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*. Bandung : PT Refika Aditama.

Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.

Pramana, Rendra. 2008. Penerapan Aplikasi Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (e-SPT) Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Skripsi* : Universitas Brawijaya, Malang.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Restiani, Metti. 2011. Analisis Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur. *Skripsi* : Fakultas Ekonomi Universitas Komputer, Bandung.

Rusbiyanti Sripeni. 2011. *Pengaruh Penerapan E-Spt (Masa Ppn) Terhadap Efisiensi Pengisian SPT (Masa Ppn) Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan*, 12(2): 2 3.

Salim, Dhanang. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Sambodo, Agus. 2006. *Kewajiban Perpajakan bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi-Tinjauan dari Sisi Wajib Pajak*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.

Sangarimbun, Masri dan Efendi, Sofian. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.

- Sarwono, Jonathan. 2012. IBM "Advance Statistic" : Prosedur-Prosedur Generalisasi dan Perluasan General Linier Model (GLM). Yogyakarta : Andi.
- Soewandi, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2010. Uji Khi Kuadrat & Regresi (Untuk Penelitian). Yogyakarta : Graha Ilmu
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta : Salemba Empat
- Wibisono, Yusuf. 2009. *Metode Statistik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Winerungan, Lidya Oktaviane. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung*, 1(3):960-970.

Dokumen

- _____. 2012. Monografi Fiskal 2012 KPP Pratama Surabaya Genteng. Surabaya : KPP Surabaya Genteng.
- _____. 2011. Modul User Manual e-SPT Masa PPN.
- Solimun dan Adji Rinaldo. 2008. *Multivariate Analysis: Aplikasi Software SPSS dan Microsoft Excel*. Modul Pelatihan Multivariate Analysis. Malang : LPM UB.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No 42 tahun 2009 atas Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 184/PJ./2004 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran *On-Line* dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-147/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pemungut PPN.

PER-6/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik.

PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

PER-11/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

PER-45/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

PER-10/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

PMK No. 80/PMK.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

PMK No. 152/PMK.03/2009 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.

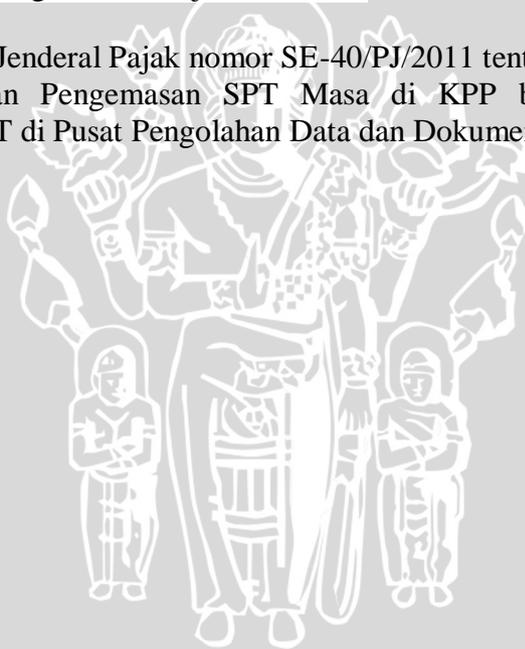
KEP 88/PJ 2004 tentang Penyampaian Surat pemberitahuan Elektronik bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dipandang perlu untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan.

Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 17/PJ/2013 Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-44/Pj/2010 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 18/PJ/2013 Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-10/PJ/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-45/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-40/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengemasan SPT Masa di KPP berkenaan dengan Pengolahan SPT di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



LAMPIRAN 2

Surabaya, November 2013

No Responden :

Tanggal :

Kepada : Yth Wajib Pajak

Ditempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang sedang saya lakukan, maka saya Nani Kharisma selaku peneliti memohon kesediaan saudara dalam hal ini wajib pajak untuk menjawab daftar pertanyaan (kuesioner) yang saya ajukan. Penelitian ini saya ajukan dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi *e-SPT* Masa PPN dalam Pelaporan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng).

Oleh karena itu saya mengharapkan bantuan saudara untuk berkenan memberi jawaban yang sesungguhnya. Saya akan menjamin kerahasiaan jawaban yang saudara berikan, karena jawaban tersebut hanya sebagai bahan penyusunan skripsi dan tidak untuk dipublikasikan.

Demikianlah surat permohonan kesediaan wajib pajak dalam pengisian kuesioner yang saya buat. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penulisan surat ini ada kalimat yang salah ataupun kurang sopan. Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Nani Kharisma

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan *)Coret salah Satu

Jenis Wajib Pajak : Orang Pribadi / Badan *)Coret Salah Satu

Kelurahan Tempat Usaha / :

Tempat Kedudukan

Petunjuk Pengisian : Berikan tanda “√” pada jawaban yang sesuai dengan jawaban anda.

Adapun Keterangan lebih lanjut :

- Kode SS berarti “Sangat Setuju”
- Kode S berarti “Setuju”
- Kode R berarti “Ragu-ragu”
- Kode TS berarti “Tidak Setuju”
- Kode STS berarti “Sangat Tidak Setuju”

A. Pemanfaatan Aplikasi *e-SPT* Masa PPN

1. Pengetahuan Peraturan Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1.	e-SPT Masa PPN merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan dan kemudahan sistem administrasi KPP kepada Wajib Pajak.					
2.	Menurut pendapat anda, setujukah atas penerapan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 tentang mewajibkan Wajib Pajak menggunakan Aplikasi e-SPT Masa PPN.					
3.	Bahasa yang terdapat dalam PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 tentang mewajibkan wajib pajak menggunakan e-SPT Masa PPN susah dimengerti oleh wajib pajak.					

4.	Wajib Pajak kurang memahami isi dan makna dari PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 tentang mewajibkan wajib pajak menggunakan e-SPT Masa PPN karena banyak kalimat yang bersifat ambigu.					
5.	Terdapat ketidaksesuaian penerapan PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013 dengan tingkat kesiapan teknologi informasi dan kesiapan Sumber Daya Manusia pegawai KPP Pratama Surabaya Genteng.					
6.	Penetapan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 tentang mewajibkan Wajib Pajak menggunakan Aplikasi e-SPT Masa PPN yang bermaksud memudahkan wajib pajak dalam penggunaan aplikasi e-SPT Masa PPN.					
7.	Penetapan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013 tentang mewajibkan Wajib Pajak menggunakan Aplikasi e-SPT Masa PPN yang mempermudah wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya					

2. Kesiapan Teknologi

No	Pertanyaan	SYS	TS	R	S	SS
1.	Kurang tersedianya sarana dan fasilitas software, serta hardware yang baik dari pihak KPP dalam pelaksanaan PER 10/PJ/2013 dan PER 11/PJ/2013.					
2.	Kesiapan Pihak KPP dalam menangani kendala-kendala dalam <i>system</i> aplikasi e-SPT Masa PPN.					
3.	Kemampuan pegawai KPP Pratama Surabaya Genteng dalam melakukan sistem pengoperasian aplikasi e-SPT Masa PPN.					

3. Pelayanan

No	Pertanyaan	SYS	TS	R	S	SS
1.	Jadwal pelayanan yang ada sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
2.	Jumlah Pegawai kurang memenuhi dalam					

	melayani wajib pajak.					
3.	Sikap Pegawai dalam melayani wajib pajak ramah dan bersahabat.					
4.	Kemampuan Pegawai dalam penyampaian informasi kepada wajib pajak dapat dipahami dengan mudah oleh wajib pajak.					
5.	Pegawai dalam proses pelayanan kepada wajib pajak menguasai pengoperasian media elektronik secara baik.					
6.	Proses pelayanan kepada wajib pajak kurang memenuhi persyaratan cepat, tepat dan efisien.					

4. Model Sosialisasi

No	Pertanyaan	SYS	TS	R	S	SS
1.	Suasana selama sosialisasi berlangsung interaktif dan menyenangkan.					
2.	Metode Sosialisasi yang digunakan terlalu biasa dan kurang inovatif.					
3.	Materi yang disampaikan susah dipahami oleh peserta sosialisasi dan dapat langsung diaplikasikan.					
4.	Waktu penyelenggaraan sosialisasi sudah efektif.					
5.	Kemampuan pegawai pajak dalam menjawab pertanyaan wajib pajak dapat dipahami dengan mudah oleh wajib pajak.					

B. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	SYS	TS	R	S	SS
1.	Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh kejelasan dan pemahaman wajib pajak atas penerapan tegas serta pemberlakuan penerapan peraturan tersebut.					
2.	Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh kemudahan penggunaan aplikasi e-SPT Masa PPN.					

3.	Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh kesigapan pegawai dalam membantu pelaksanaan penerapan peraturan tersebut.					
4.	Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (perhitungan dan pelaporan SPT).					
5.	Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh pelayanan kurang memuaskan kepada wajib pajak.					
6.	Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atas pemberlakuan peraturan terbaru.					
7.	Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak.					
8.	Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh pemberitaan media masa yang menyudutkan Departemen Keuangan khususnya DJP (Direktorat Jenderal Pajak).					
9.	Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh kurang tegasnya dasar hukum dan hukuman atas tindak pidana pajak.					

LAMPIRAN 3 : DAFTAR HASIL JAWABAN KUESIONER

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1	X2.1	X2.2	X2.3	X2	NO
1	5	5	4	5	4	3	3	28	5	4	5	14	1
2	3	1	2	4	4	2	1	17	3	1	1	5	2
3	2	4	3	5	5	4	2	24	2	3	1	6	3
4	5	4	3	4	5	5	3	26	3	2	2	7	4
5	4	4	5	2	2	1	1	19	2	2	4	8	5
6	3	1	5	5	4	4	4	24	4	3	2	9	6
7	5	3	5	4	3	5	5	30	3	2	3	8	7
8	4	4	5	4	4	4	4	29	4	2	2	8	8
9	5	4	4	4	5	5	4	30	5	5	3	13	9
10	5	4	4	2	4	3	3	25	2	3	2	7	10
11	4	3	4	4	4	2	1	22	3	2	2	7	11
12	5	4	4	4	5	5	5	32	5	2	1	8	12
13	5	5	3	5	5	3	1	27	3	4	2	9	13
14	4	4	4	3	4	3	4	26	2	3	3	8	14
15	5	5	2	4	4	5	1	26	1	4	2	7	15
16	3	3	4	4	5	5	5	29	3	3	4	10	16
17	5	4	5	3	4	3	4	28	4	2	3	9	17
18	3	3	3	4	4	5	3	25	3	3	4	10	18
19	5	5	2	3	3	4	5	27	2	3	4	9	19
20	4	5	5	5	5	4	4	32	1	4	5	10	20
21	4	4	4	4	4	4	5	27	3	3	3	9	21
22	5	5	3	5	4	1	1	24	3	2	2	7	22
23	2	3	3	5	5	4	5	26	4	3	5	12	23
24	4	5	2	4	5	5	4	29	4	3	3	10	24
25	5	4	3	5	5	3	2	27	3	1	3	7	25
26	4	4	5	4	3	2	3	25	4	4	2	10	26
27	5	5	4	3	3	2	3	25	4	3	5	12	27
28	5	5	3	5	2	3	2	25	3	1	3	7	28
29	4	5	4	3	5	4	3	28	5	4	5	14	29
30	5	4	3	4	3	4	2	25	3	3	3	9	30
31	5	4	3	3	3	4	3	25	4	3	3	10	31
32	5	5	4	3	4	4	3	28	4	4	5	13	32
33	4	4	4	4	4	3	4	27	4	1	1	6	33
34	4	4	4	3	3	5	4	27	2	3	4	9	34
35	3	3	2	3	3	1	1	16	3	2	1	6	35
36	4	5	3	4	4	3	4	27	4	4	5	13	36
37	5	4	3	4	3	3	4	26	4	2	2	8	37
38	5	4	4	3	4	4	5	29	3	3	3	9	38
39	5	4	4	4	5	4	5	31	4	5	3	12	39
40	3	3	3	4	4	5	3	25	4	3	2	9	40
41	4	4	4	4	3	4	4	27	2	3	4	9	41
42	5	4	3	5	2	4	4	27	3	5	4	11	42
43	5	4	2	3	4	4	5	27	4	4	4	12	43
44	4	4	5	4	4	3	4	28	3	4	3	10	44
45	5	4	4	3	3	5	5	29	5	4	3	12	45
46	5	4	4	3	3	3	3	25	5	4	3	12	46
47	4	4	4	4	5	4	3	28	4	3	2	9	47
48	4	4	4	4	3	5	3	26	3	3	3	9	48



49	5	4	4	3	5	4	5	30	3	5	5	13	49
50	5	4	4	4	3	4	4	28	4	4	4	12	50
51	4	4	5	4	3	2	3	25	3	3	4	10	51
52	5	4	3	3	3	2	3	23	4	4	3	11	52
53	5	5	4	3	3	2	2	24	4	5	3	12	53
54	4	4	4	4	5	4	5	30	4	3	4	11	54
55	4	4	3	5	2	3	2	23	4	2	4	10	55
56	5	5	4	4	2	3	3	26	3	3	3	9	56
57	5	5	3	4	2	2	3	24	4	2	3	9	57
58	4	4	4	3	5	5	3	28	3	4	4	11	58
59	5	5	4	3	5	4	4	30	4	3	3	10	59
60	4	5	3	4	4	4	4	28	2	2	1	5	60
61	5	4	3	4	3	4	2	25	4	2	3	9	61
62	5	4	3	4	3	4	3	26	3	4	3	10	62
63	5	4	4	3	4	4	3	27	2	3	4	9	63
64	5	5	4	3	3	4	5	29	4	3	5	12	64
65	4	4	4	4	4	3	4	27	4	3	2	9	65
66	5	4	4	3	3	5	4	28	3	4	4	11	66
67	4	5	5	4	4	2	5	29	4	2	3	9	67
68	5	5	2	4	3	4	3	26	5	4	3	12	68
69	4	4	4	4	4	3	4	27	3	3	4	10	69
70	5	2	3	4	3	3	4	24	4	3	2	9	70
71	5	3	4	3	4	4	5	28	4	2	1	7	71
72	4	5	4	3	3	2	3	24	3	4	3	10	72
73	5	5	3	4	3	3	4	27	4	3	3	10	73
74	5	4	5	4	5	4	5	32	2	4	5	11	74
75	5	5	5	3	3	4	5	30	3	2	3	8	75
76	5	5	4	4	4	5	4	31	3	4	3	10	76
77	5	4	3	4	4	5	4	30	5	3	3	11	77
78	5	5	4	4	3	4	4	29	3	3	2	8	78
79	4	5	4	3	3	2	4	25	4	3	3	10	79
80	5	5	3	5	4	4	4	30	3	3	4	10	80
81	5	4	3	4	2	4	4	26	5	5	4	14	81
82	5	5	3	3	3	2	3	24	4	3	2	9	82
83	5	4	2	3	4	4	5	27	3	3	3	9	83
84	4	4	5	4	2	3	4	26	4	4	2	10	84
85	3	3	4	3	3	5	5	26	2	2	4	8	85
86	5	4	3	1	1	5	3	22	3	3	3	9	86
87	4	5	4	2	3	2	2	22	3	3	3	9	87
88	1	3	3	2	4	5	4	22	2	3	3	8	88
89	3	3	4	5	2	2	3	22	3	2	3	8	89
90	5	5	3	3	4	5	5	30	3	3	4	10	90
91	4	5	3	2	4	3	3	24	5	4	4	13	91
92	4	4	3	4	5	3	3	26	4	3	3	10	92
93	4	4	4	3	3	3	2	22	3	3	5	11	93
94	5	5	4	3	4	3	4	28	4	3	2	9	94
95	5	5	4	4	5	5	5	33	3	4	3	10	95
96	5	5	4	3	5	5	5	32	4	3	3	10	96
97	5	5	4	4	3	4	5	30	4	4	3	11	97



X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4	NO
5	4	2	4	1	5	21	1	1	5	4	5	16	1
3	5	3	4	3	4	22	2	4	3	2	5	16	2
3	4	4	4	2	3	20	1	3	4	2	4	14	3
4	2	4	4	3	4	21	5	1	4	4	4	18	4
2	2	5	3	3	3	18	4	2	3	4	3	16	5
1	4	5	3	5	3	21	4	2	3	3	2	14	6
4	5	4	2	5	2	22	2	2	3	3	4	14	7
3	4	2	4	2	4	19	5	2	2	2	4	15	8
2	4	2	3	5	5	21	4	1	4	4	5	18	9
5	5	3	3	2	3	21	4	5	4	1	5	19	10
4	4	5	1	2	5	21	4	2	2	2	4	14	11
5	5	4	3	4	5	26	2	5	4	2	5	18	12
3	4	4	4	4	3	22	4	4	3	2	5	19	13
4	2	3	4	5	5	23	4	5	4	2	2	17	14
2	2	4	4	5	4	21	3	3	4	3	1	14	15
2	2	4	4	4	4	20	2	4	2	2	3	13	16
4	4	4	3	3	5	23	5	3	2	5	5	20	17
4	4	3	3	4	4	22	3	2	4	5	5	19	18
3	3	4	4	5	2	21	1	2	5	5	5	18	19
1	1	3	4	5	5	19	2	4	2	2	5	15	20
2	4	3	3	2	5	19	2	3	3	2	3	13	21
2	1	4	3	4	3	17	4	4	3	3	5	19	22
4	3	4	2	3	3	17	2	1	2	4	3	12	23
3	2	2	5	5	2	19	2	3	3	2	3	14	24
1	2	4	4	3	4	18	3	3	4	2	2	14	25
4	4	4	5	4	2	23	5	4	3	2	4	18	26
2	4	4	5	2	3	20	2	2	4	5	2	15	27
4	3	4	5	5	4	25	4	5	5	3	4	21	28
5	3	5	4	4	5	26	4	4	5	4	5	22	29
4	4	2	2	4	5	21	5	5	3	3	4	20	30
5	4	3	4	2	2	20	4	5	4	5	2	20	31
2	2	4	3	3	2	16	4	5	3	4	5	21	32
4	4	2	2	4	5	20	3	4	4	2	4	17	33
4	4	4	3	3	4	19	2	3	2	3	3	13	34
3	2	4	4	3	4	20	1	3	2	2	2	10	35
3	2	4	4	5	5	23	5	2	3	4	4	18	36
3	4	2	4	1	3	17	1	3	5	2	2	13	37
4	4	5	2	2	5	22	2	3	3	3	3	14	38
4	2	4	4	4	4	22	3	2	4	4	4	17	39
4	5	4	2	3	3	21	4	5	4	3	2	18	40
4	4	3	3	4	4	22	5	5	4	2	4	20	41
5	4	4	3	3	4	23	5	3	3	3	3	17	42
4	5	3	3	4	4	21	4	4	3	3	4	18	43
4	1	3	3	3	3	17	3	4	3	2	5	17	44
2	2	5	4	3	5	22	2	4	5	3	4	18	45
2	5	3	4	2	4	22	2	3	3	2	3	13	46
3	3	4	4	1	3	18	4	3	4	3	3	17	47
4	3	4	3	4	4	22	5	5	4	3	4	21	48

5	5	4	3	3	4	24	4	4	3	4	3	18	49
4	4	5	3	4	1	21	5	5	4	2	3	19	50
4	3	3	4	4	3	21	3	4	4	2	4	17	51
5	5	4	3	2	4	23	4	4	2	3	4	17	52
4	5	4	3	4	3	23	4	3	2	2	3	14	53
4	3	4	3	3	4	21	2	2	4	3	3	14	54
3	4	4	3	3	3	20	3	2	3	4	5	17	55
5	4	3	4	3	3	21	4	4	3	3	4	18	56
5	4	5	4	5	5	28	3	3	2	4	4	16	57
3	4	5	4	4	5	25	4	3	4	4	3	18	58
4	4	2	3	5	5	23	5	5	5	2	3	20	59
5	4	2	2	2	4	19	5	4	4	2	3	18	60
5	4	3	4	3	2	21	4	4	3	2	2	15	61
5	3	3	4	4	4	23	5	4	4	3	2	18	62
4	3	4	3	4	4	22	4	3	4	2	3	16	63
3	5	3	3	5	4	23	4	3	3	4	4	18	64
4	4	5	4	3	3	23	3	2	4	2	3	14	65
3	4	4	4	4	3	22	2	4	5	3	5	19	66
4	2	5	5	4	4	24	3	3	2	4	2	14	67
4	3	4	3	5	4	23	3	4	3	2	3	15	68
4	4	4	3	4	4	23	4	4	2	3	4	18	69
5	5	4	3	4	3	24	3	3	3	2	5	16	70
4	4	4	4	3	3	22	5	3	3	3	3	17	71
5	4	5	4	3	4	25	3	3	4	5	4	19	72
4	4	3	2	4	4	21	4	4	3	2	3	16	73
5	4	4	3	4	4	24	4	4	4	5	5	22	74
3	2	4	2	4	3	18	4	5	3	4	4	20	75
5	5	5	2	3	3	23	3	4	5	3	2	17	76
4	4	5	3	4	4	25	3	3	4	4	4	18	77
5	4	4	3	4	5	25	3	3	4	4	5	19	78
5	4	3	4	4	4	24	2	2	4	5	3	17	79
4	5	5	3	2	2	21	5	4	4	3	2	18	80
3	4	5	4	3	4	24	4	3	3	4	4	17	81
4	3	3	4	4	4	22	3	1	5	5	5	19	82
3	4	4	3	4	4	22	2	4	5	3	2	16	83
4	4	4	4	4	3	23	3	4	4	3	5	19	84
5	5	3	3	3	3	22	4	3	4	5	4	20	85
4	4	4	4	3	3	22	5	5	2	4	4	20	86
4	1	1	3	5	5	19	5	3	3	3	1	15	87
4	2	4	3	4	4	21	5	3	2	3	1	15	88
4	3	3	4	4	4	22	4	4	5	5	4	22	89
3	3	2	2	4	4	18	2	1	3	4	4	14	90
3	2	4	4	3	2	18	1	2	3	4	5	15	91
3	2	4	3	5	4	21	4	2	2	4	3	15	92
2	3	3	3	4	3	18	5	5	5	4	3	22	93
5	3	3	5	5	4	24	4	4	4	3	4	19	94
5	4	4	4	3	4	24	3	3	3	4	4	17	95
4	3	2	3	4	4	20	2	2	3	4	4	15	96
4	4	4	4	4	4	24	3	4	4	3	4	18	97



Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y
5	2	4	4	2	5	4	5	5	36
4	4	3	3	3	1	2	1	5	26
4	5	3	4	1	3	1	3	4	29
3	3	1	5	5	5	4	4	3	32
3	4	4	2	2	2	5	1	3	26
2	2	5	2	4	4	3	3	2	27
4	4	2	4	4	3	3	4	4	32
1	4	3	5	5	4	4	2	4	32
5	5	4	5	4	4	4	2	4	36
5	5	4	3	1	5	5	2	3	33
3	1	3	5	2	4	2	3	4	27
5	5	5	5	4	4	3	3	4	38
4	4	4	3	3	5	4	4	2	33
5	4	4	5	2	3	4	5	4	36
5	4	3	3	2	4	5	4	2	32
4	5	4	5	2	4	4	1	4	33
3	2	3	4	4	4	4	5	5	34
3	3	5	5	2	5	4	5	4	36
5	4	5	4	2	4	5	5	3	37
4	4	4	3	2	3	5	5	3	33
4	3	3	2	4	4	5	4	2	31
5	5	3	2	5	1	3	2	4	28
5	5	3	4	5	3	3	2	2	32
5	5	4	2	2	3	2	5	4	32
2	3	4	3	5	4	2	4	2	29
5	4	2	4	3	5	5	5	3	36
5	4	5	5	4	4	5	2	2	36
4	2	5	5	4	5	4	4	4	37
5	5	4	4	2	4	4	5	5	38
5	4	5	3	2	4	5	5	5	38
5	5	4	4	2	4	4	4	3	35
4	4	3	5	3	5	4	5	4	37
5	4	3	4	1	3	2	5	4	31
4	4	2	4	3	3	3	5	3	31
3	2	3	3	2	3	2	3	2	22
5	4	5	2	2	5	4	5	4	36
3	3	3	4	3	2	3	4	3	28
4	4	2	3	1	3	5	5	3	30
5	5	4	5	2	3	4	3	5	36
5	4	3	3	2	4	2	5	3	31
4	5	3	2	3	4	5	4	5	35
4	3	4	4	4	3	2	4	5	33
5	2	4	3	3	5	4	5	3	34
3	3	5	3	2	2	3	3	4	28
4	4	4	5	5	3	4	4	3	36
5	2	3	3	3	2	5	5	5	33
3	4	3	4	4	3	2	4	3	30
3	2	3	4	4	3	4	4	3	30



4	4	4	3	3	3	4	4	5	26
4	5	3	4	4	5	5	3	3	36
4	4	3	5	5	4	3	4	4	36
5	3	4	4	5	4	3	3	3	34
4	2	3	4	4	5	4	4	2	32
3	3	3	4	4	3	3	3	3	29
4	2	4	5	3	2	3	4	4	31
4	4	5	4	5	4	1	3	5	35
3	5	4	3	3	2	4	5	5	34
3	4	3	4	5	5	4	4	5	37
5	4	2	5	5	3	3	4	4	35
4	4	2	3	3	4	3	3	5	31
5	5	2	3	3	4	2	3	3	30
3	5	4	4	4	3	4	4	5	36
4	5	5	5	2	1	2	4	5	33
5	2	4	5	4	3	5	4	3	35
5	2	4	2	3	3	4	4	5	32
4	3	4	4	4	3	3	5	3	33
4	3	3	2	2	5	5	4	4	32
5	3	4	4	3	3	5	4	5	36
4	4	5	4	4	3	4	3	3	34
3	5	4	4	3	4	2	3	5	33
3	4	5	3	2	5	3	3	2	30
4	4	4	5	4	2	2	5	5	35
5	2	3	4	4	1	4	5	4	32
5	2	4	5	5	4	5	5	5	40
5	4	3	4	4	3	4	5	4	36
4	5	3	3	4	4	4	5	3	35
5	3	2	5	5	4	3	4	4	35
3	3	5	4	4	5	3	3	4	34
4	5	2	5	5	4	3	2	2	32
4	4	2	3	3	5	4	5	3	33
5	4	3	4	4	3	4	4	4	35
5	4	3	3	2	4	4	4	3	32
4	3	4	4	4	4	3	3	2	31
4	2	2	3	3	4	4	5	4	31
3	5	4	5	4	4	2	2	3	32
4	3	4	2	2	4	3	3	4	29
2	3	4	4	4	4	3	3	3	30
3	3	4	2	2	3	4	4	4	29
4	4	3	3	3	4	2	2	3	28
2	3	4	4	4	5	5	2	3	32
1	4	4	5	3	4	4	4	2	31
3	5	4	3	5	4	2	3	3	32
5	4	3	4	4	3	3	4	3	33
4	3	4	3	3	5	4	4	5	35
3	5	4	4	4	5	4	4	3	36
5	3	3	5	5	4	2	2	4	33
3	5	4	4	3	4	3	5	4	35



LAMPIRAN 4 : HASIL UJI VALIDITAS DAN REABILITAS

Variabel Persepsi Wajib Pajak (X1)

Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6
Pearson Correlation	1	,279	,304	,300	,141	,392*
X1.1 Sig. (2-tailed)		,136	,103	,107	,457	,032
N	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,279	1	,225	,506**	,122	,172
X1.2 Sig. (2-tailed)	,136		,232	,004	,522	,364
N	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,304	,225	1	,191	,037	,343
X1.3 Sig. (2-tailed)	,103	,232		,311	,846	,064
N	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,300	,506**	,191	1	,332	,049
X1.4 Sig. (2-tailed)	,107	,004	,311		,073	,798
N	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,141	,122	,037	,332	1	,368*
X1.5 Sig. (2-tailed)	,457	,522	,846	,073		,046
N	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,392*	,172	,343	,049	,368*	1
X1.6 Sig. (2-tailed)	,032	,364	,064	,798	,046	
N	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,482**	,213	,092	,056	,203	,308
X1.7 Sig. (2-tailed)	,007	,259	,630	,767	,281	,098
N	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,672**	,524**	,583**	,493**	,474**	,648**
X1 Sig. (2-tailed)	,000	,003	,001	,006	,008	,000
N	30	30	30	30	30	30

Correlations

		X1.7	X1
X1.1	Pearson Correlation	,482	,672
	Sig. (2-tailed)	,007	,000
	N	30	30
X1.2	Pearson Correlation	,213	,524
	Sig. (2-tailed)	,259	,003
	N	30	30
X1.3	Pearson Correlation	,092	,583
	Sig. (2-tailed)	,630	,001
	N	30	30
X1.4	Pearson Correlation	,056	,493**
	Sig. (2-tailed)	,767	,006
	N	30	30
X1.5	Pearson Correlation	,203	,474
	Sig. (2-tailed)	,281	,008
	N	30	30
X1.6	Pearson Correlation	,308*	,648
	Sig. (2-tailed)	,098	,000
	N	30	30
X1.7	Pearson Correlation	1**	,662
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	30	30
X1	Pearson Correlation	,662**	1**
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**.. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,644	7



Variabel Kesiapan Teknologi (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,276	,340	,795**
	Sig. (2-tailed)		,140	,066	,000
	N	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	,276	1	,546**	,729**
	Sig. (2-tailed)	,140		,002	,000
	N	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	,340	,546**	1	,760**
	Sig. (2-tailed)	,066	,002		,000
	N	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	,795**	,729**	,760**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,608	3

Variabel Pelayanan (X3)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6
X3.1	Pearson Correlation	1	,342	,096	,016	,311	,343
	Sig. (2-tailed)		,064	,615	,935	,095	,063
	N	30	30	30	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	,342	1	,045	,248	,254	,179
	Sig. (2-tailed)	,064		,815	,186	,175	,344
	N	30	30	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	,096	,045	1	,192	,152	,356
	Sig. (2-tailed)	,615	,815		,310	,422	,053
	N	30	30	30	30	30	30
X3.4	Pearson Correlation	,016	,248	,192	1	,121	,159
	Sig. (2-tailed)	,935	,186	,310		,525	,401
	N	30	30	30	30	30	30
X3.5	Pearson Correlation	,311	,254	,152	,121	1	,153
	Sig. (2-tailed)	,095	,175	,422	,525		,420
	N	30	30	30	30	30	30
X3.6	Pearson Correlation	,343	,179	,356	,159	,153	1
	Sig. (2-tailed)	,063	,344	,053	,401	,420	
	N	30	30	30	30	30	30
X3	Pearson Correlation	,565**	,589**	,533**	,522**	,585**	,607**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,002	,003	,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30

Correlations

		X3
X3.1	Pearson Correlation	,565
	Sig. (2-tailed)	,001
	N	30
X3.2	Pearson Correlation	,589
	Sig. (2-tailed)	,001
	N	30
X3.3	Pearson Correlation	,533
	Sig. (2-tailed)	,002
	N	30
X3.4	Pearson Correlation	,522
	Sig. (2-tailed)	,003
	N	30
X3.5	Pearson Correlation	,585
	Sig. (2-tailed)	,001
	N	30
X3.6	Pearson Correlation	,607
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	30
X3	Pearson Correlation	1**
	Sig. (2-tailed)	
	N	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,601	6



Variabel Model Sosialisasi (X4)

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4
X4.1	Pearson Correlation	1	,216	,439*	,198	,543**	,776**
	Sig. (2-tailed)		,251	,015	,295	,002	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X4.2	Pearson Correlation	,216	1	,196	,016	,174	,526**
	Sig. (2-tailed)	,251		,299	,934	,357	,003
	N	30	30	30	30	30	30
X4.3	Pearson Correlation	,439*	,196	1	,064	,346	,613**
	Sig. (2-tailed)	,015	,299		,737	,061	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X4.4	Pearson Correlation	,198	,016	,064	1	,213	,483**
	Sig. (2-tailed)	,295	,934	,737		,258	,007
	N	30	30	30	30	30	30
X4.5	Pearson Correlation	,543**	,174	,346	,213	1	,730**
	Sig. (2-tailed)	,002	,357	,061	,258		,000
	N	30	30	30	30	30	30
X4	Pearson Correlation	,776**	,526**	,613**	,483**	,730**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,000	,007	,000	
	N	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,609	5



Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6
Y1.1	Pearson Correlation	1	,635**	,285	,013	,336	,300
	Sig. (2-tailed)		,000	,127	,945	,069	,107
	N	30	30	30	30	30	30
Y1.2	Pearson Correlation	,635**	1	,228	,150	,354	,103
	Sig. (2-tailed)	,000		,225	,428	,055	,588
	N	30	30	30	30	30	30
Y1.3	Pearson Correlation	,285	,228	1	,081	-,098	,243
	Sig. (2-tailed)	,127	,225		,669	,606	,196
	N	30	30	30	30	30	30
Y1.4	Pearson Correlation	,013	,150	,081	1	,364*	,446*
	Sig. (2-tailed)	,945	,428	,669		,048	,013
	N	30	30	30	30	30	30
Y1.5	Pearson Correlation	,336	,354	-,098	,364*	1	,356
	Sig. (2-tailed)	,069	,055	,606	,048		,054
	N	30	30	30	30	30	30
Y1.6	Pearson Correlation	,300	,103	,243	,446*	,356	1
	Sig. (2-tailed)	,107	,588	,196	,013	,054	
	N	30	30	30	30	30	30
Y1.7	Pearson Correlation	,341	,222	,520**	,277	,085	,352
	Sig. (2-tailed)	,065	,238	,003	,138	,653	,057
	N	30	30	30	30	30	30
Y1.8	Pearson Correlation	,205	,059	,146	,232	,113	,281
	Sig. (2-tailed)	,278	,758	,440	,217	,551	,133
	N	30	30	30	30	30	30
Y1.9	Pearson Correlation	,144	,128	,455*	,294	,224	,425*
	Sig. (2-tailed)	,447	,499	,012	,115	,234	,019
	N	30	30	30	30	30	30
Y1	Pearson Correlation	,546**	,563**	,516**	,614**	,531**	,520**
	Sig. (2-tailed)	,002	,001	,004	,000	,003	,003
	N	30	30	30	30	30	30



Correlations

		Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1
Y1.1	Pearson Correlation	,341	,205**	,144	,546
	Sig. (2-tailed)	,065	,278	,447	,002
	N	30	30	30	30
Y1.2	Pearson Correlation	,222**	,059	,128	,563
	Sig. (2-tailed)	,238	,758	,499	,001
	N	30	30	30	30
Y1.3	Pearson Correlation	,520	,146	,455	,516
	Sig. (2-tailed)	,003	,440	,012	,004
	N	30	30	30	30
Y1.4	Pearson Correlation	,277	,232	,294	,614
	Sig. (2-tailed)	,138	,217	,115	,000
	N	30	30	30	30
Y1.5	Pearson Correlation	,085	,113	,224	,531*
	Sig. (2-tailed)	,653	,551	,234	,003
	N	30	30	30	30
Y1.6	Pearson Correlation	,352	,281	,425	,520*
	Sig. (2-tailed)	,057	,133	,019	,003
	N	30	30	30	30
Y1.7	Pearson Correlation	1	,394	,052**	,644
	Sig. (2-tailed)		,031	,786	,000
	N	30	30	30	30
Y1.8	Pearson Correlation	,394	1	,336	,505
	Sig. (2-tailed)	,031		,070	,004
	N	30	30	30	30
Y1.9	Pearson Correlation	,052	,336	1*	,494
	Sig. (2-tailed)	,786	,070		,006
	N	30	30	30	30
Y1	Pearson Correlation	,644**	,505**	,494**	1**
	Sig. (2-tailed)	,000	,004	,006	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



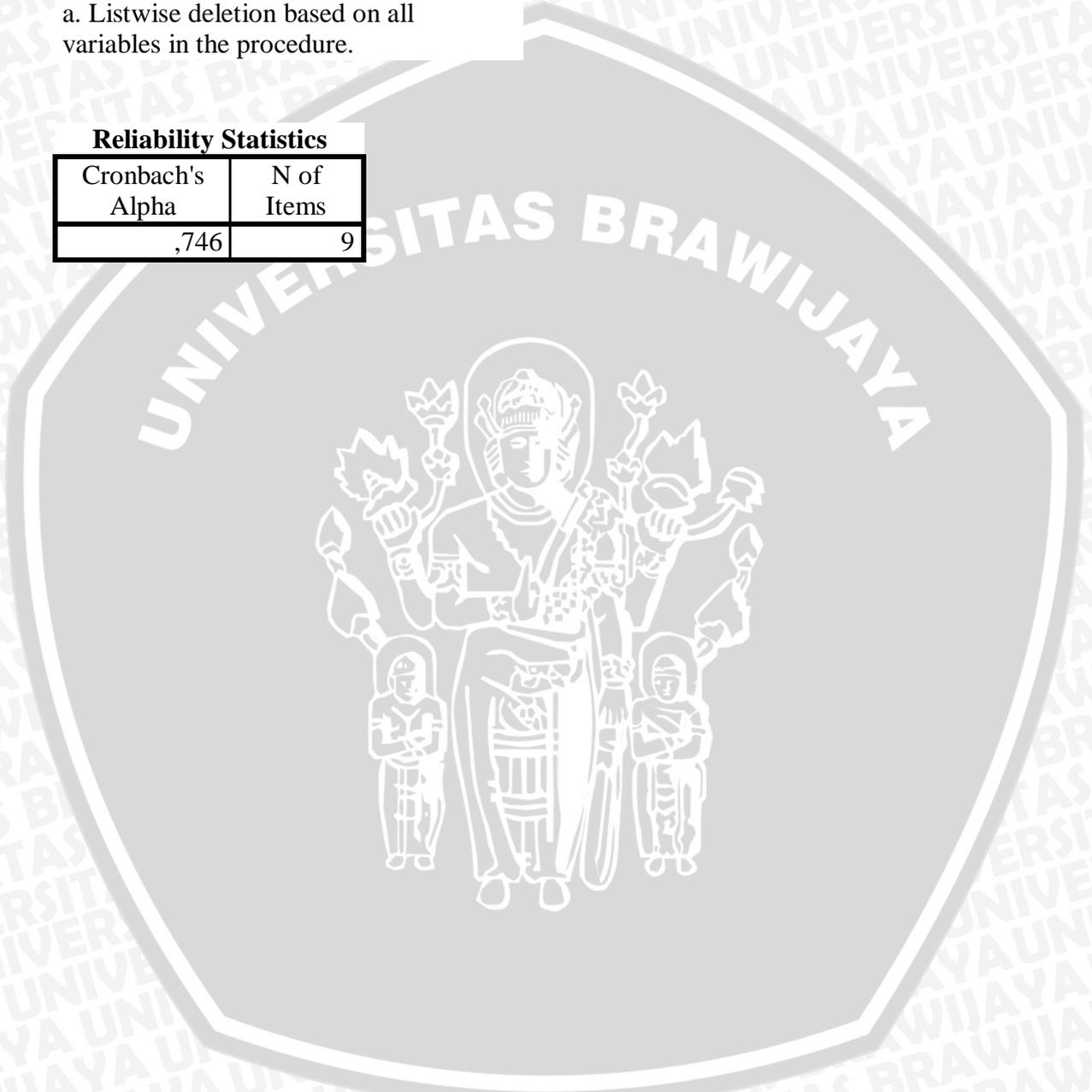
Case Processing Summary

	N	%
Valid	30	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,746	9



LAMPIRAN 6 : HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	32,75	3,215	97
X1	26,60	3,054	97
X2	9,63	1,954	97
X3	21,49	2,287	97
X4	16,98	2,504	97

Correlations

		Y	X1	X2	X3	X4
Pearson Correlation	Y	1,000	,500	,468	,404	,473
	X1	,500	1,000	,320	,142	,117
	X2	,468	,320	1,000	,151	,126
	X3	,404	,142	,151	1,000	,293
	X4	,473	,117	,126	,293	1,000
Sig. (1-tailed)	Y	.	,000	,000	,000	,000
	X1	,000	.	,001	,082	,126
	X2	,000	,001	.	,070	,109
	X3	,000	,082	,070	.	,002
	X4	,000	,126	,109	,002	.
N	Y	97	97	97	97	97
	X1	97	97	97	97	97
	X2	97	97	97	97	97
	X3	97	97	97	97	97
	X4	97	97	97	97	97

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X4, X1, X3, X2 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	,740 ^a	,547	,528	2,209	,547	27,827	4

Model Summary^b

Model	Change Statistics	
	df2	Sig. F Change
1	92 ^a	,000

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	543,142	4	135,785	27,827	,000 ^b
	Residual	448,920	92	4,880		
	Total	992,062	96			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,979	2,844		1,750	,083
	X1	,357	,078	,339	4,552	,000
	X2	,468	,123	,284	3,810	,000
	X3	,301	,104	,214	2,893	,005
	X4	,429	,095	,334	4,536	,000

Coefficients^a

Model		90,0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics
		Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance
1	(Constant)	,252	9,705				
	X1	,227	,487	,500	,429	,319	,886
	X2	,264	,672	,468	,369	,267	,882
	X3	,128	,475	,404	,289	,203	,895
	X4	,272	,587	,473	,427	,318	,905

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		VIF	
1	(Constant)		
	X1		1,129
	X2		1,133
	X3		1,117
	X4		1,106



a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X3
1	1	4,941	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,030	12,828	,01	,00	,86	,02
	3	,015	18,309	,03	,23	,12	,02
	4	,009	22,853	,01	,46	,02	,55
	5	,004	33,245	,96	,31	,00	,41

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Variance Proportions
		X4
1	1	,00
	2	,10
	3	,73
	4	,15
	5	,02

a. Dependent Variable: Y

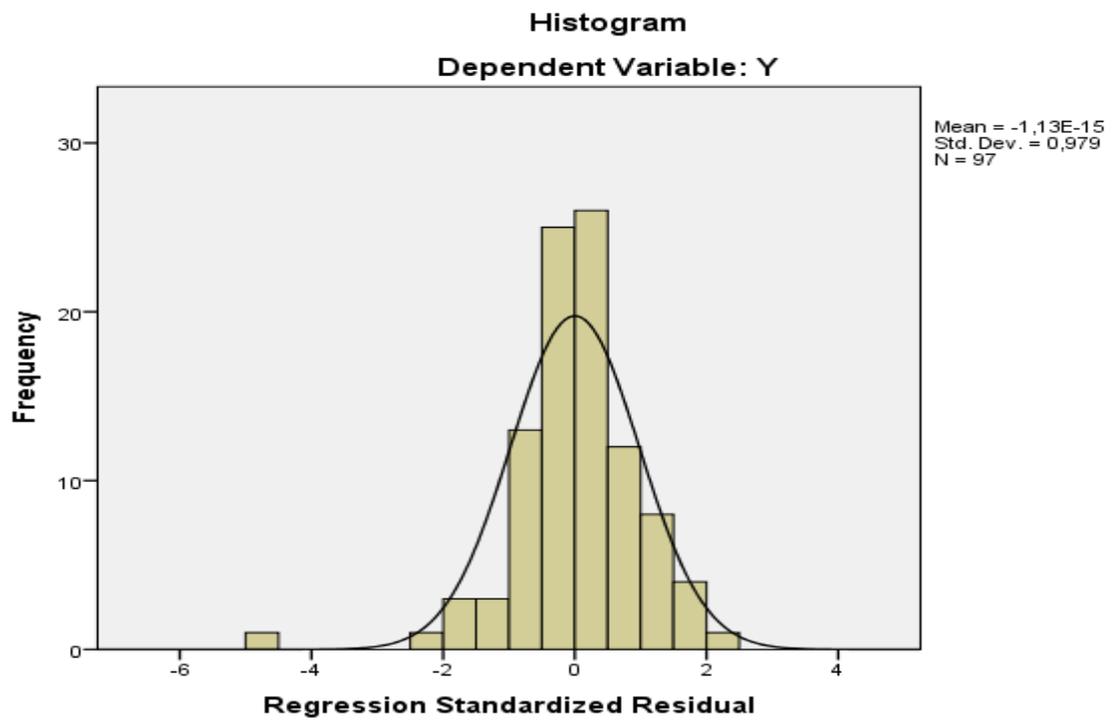
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	23,82	38,81	32,75	2,379	97
Std. Predicted Value	-3,754	2,548	,000	1,000	97
Standard Error of Predicted Value	,250	,994	,479	,150	97
Adjusted Predicted Value	24,28	38,91	32,76	2,357	97
Residual	-10,738	4,965	,000	2,162	97
Std. Residual	-4,861	2,247	,000	,979	97
Stud. Residual	-4,992	2,286	-,001	1,005	97
Deleted Residual	-11,322	5,137	-,004	2,278	97
Stud. Deleted Residual	-5,814	2,341	-,009	1,056	97
Mahal. Distance	,244	18,446	3,959	3,301	97
Cook's Distance	,000	,271	,011	,030	97
Centered Leverage Value	,003	,192	,041	,034	97

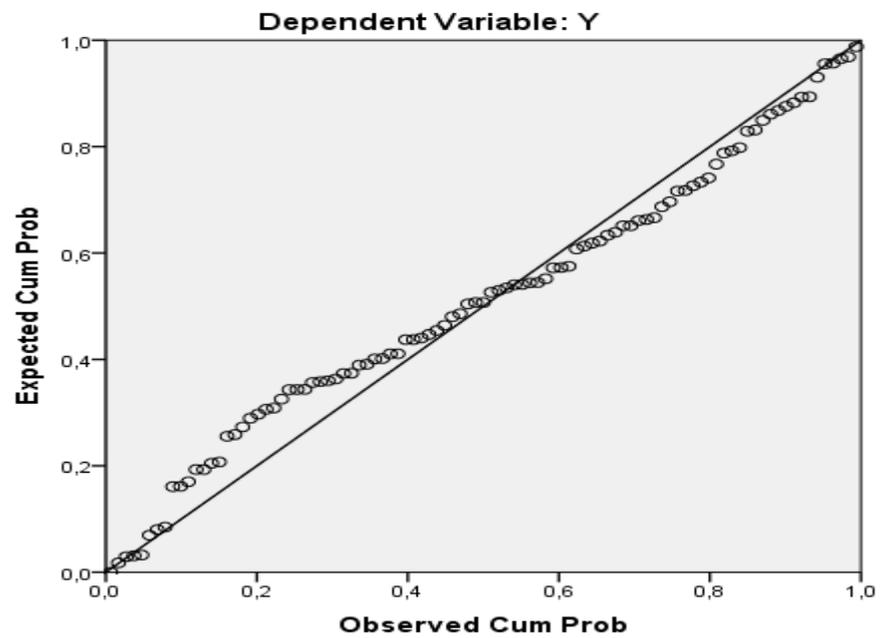
a. Dependent Variable: Y



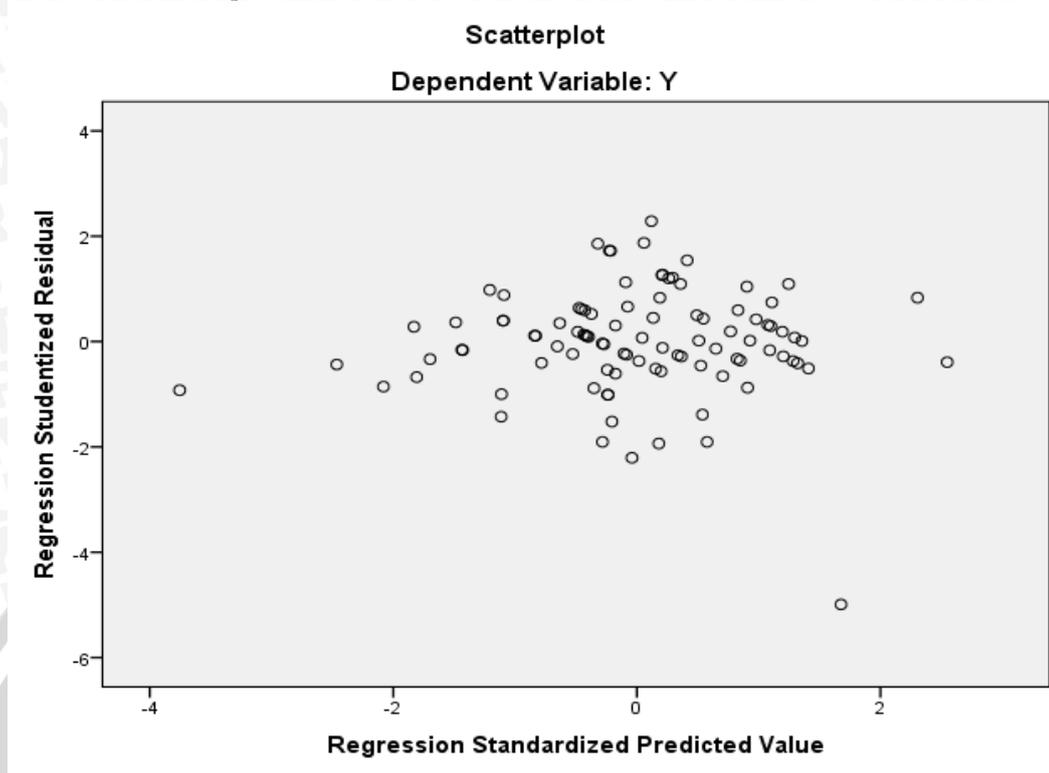
Charts : Hasil Uji Asumsi Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Charts : Hasil Uji Asumsi Heterokedastisitas



CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Nani Kharisma

Alamat : Jl. Tambak Wedi baru 15/12, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya,ProvinsiJawaTimur.

Tanggal lahir : 1 Agustus 1991

Tempat lahir : Surabaya

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Anak : Anak Pertama dari duabersaudara

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat email : nanikharisma@gmail.com

No telepon : 085815557259

Hobi : Olahraga dan Menonton

Pendidikan : 1. SDN Ujung XIII Surabaya Tamat tahun 2003
 2. SMPN 31 Surabaya Tamat tahun 2006
 3. SMAN 1 Surabaya Tamat tahun 2009
 4. Universitas Brawijaya Tamat Maret 2014

Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Tahun	Jabatan
1.	Research Study Club	2010	Anggota

Hormat Saya,

(Nani Kharisma)

